

Jurnal Perencanaan

volume VIII, 2021

Sumber Foto:
Google Maps/Fatchur Rozi
Hipwee.com
Beritasatu.com
Agto Nugroho



Cetakan I

Dionysius Desembriarto dan Galang Yunawan

Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Kapanewon/Kemantren se-DIY

Dionysius Desembriarto dan Dadang Wibowo

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-DIY

Kencana Suluh Hikmah dan Anif Muchlashin

Jimpitan Ronda: Jaminan Sosial Berbasis Kearifan Lokal di RW 01 Kocoran, Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman

Dwi Sucihartini

Pengaruh Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di DIY

Rufariza

Efektivitas Penyebarluasan Informasi Keistimewaan

M. A. Fathoni

Sembilan Tahun Implementasi Keistimewaan DIY Urusan Tata Ruang



Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021

Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213
Telp. 0274-562811 (Psw. 1209-1220, 1243-1247, 1253), 589583
Fax. 0274-586712
website <http://bappeda.jogjapro.go.id>
e-mail : bappeda@bappeda.jogjapro.go.id



Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021

JURNAL PERENCANAAN

Volume VIII, Tahun 2021

Diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA DIY)

Apresiasi

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan penyusunan Jurnal Perencanaan, yaitu Tim Penerbitan Jurnal Perencana Tahun 2021

Penanggungjawab

Drs. Beny Suharsono, M.Si.

Pemimpin Dewan Redaksi

Dra. Sri Mulyani, M.Si.

Penyunting

Antarikso Trisno Bawono, S.T., M.T.

Peer Reviewer

Imam Karyadi Aryanto, SIP, MPA
Antarikso Trisno Bawono, S.T., M.T.
Imam Budidharma, S.T., M.Ec.Dev.
Muh. Taufiq Arahman, S.I.P., MPA.
Pangky Arbindarta Kusuma, S.E.
Mei Ardi Nugrahaini, S.T.

Penulis Naskah

Dionysius Desembriarto, S.E., M.Si., M.A. dan Galang Yunawan S.Si.
Dionysius Desembriarto, S.E., M.Si., M.A. dan Dadang Wibowo S.Si.
Dwi Sucihartini, S.E., M.Ec.
Kencana Suluh Hikmah, S.I.P., M Comn & Media St. dan Anif Muchlashin, S. Sos., M.Sc.
Rufariza, S.T.
M. A. Fathoni, S.Si., M.Sc.

Penata Letak/Layout

M. A. Fathoni, S.Si., M.Sc.

Sekretariat

Kencana Suluh Hikmah, S.I.P., M Comn & Media St.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Jurnal Perencanaan Volume VIII Tahun 2021 dapat terselesaikan. Jurnal ini disusun sebagai bagian dari proses memberikan ruang ilmiah sekaligus mempublikasikan hasil penulisan artikel para Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BAPPEDA DIY). Penulisan artikel pada jurnal ini merupakan upaya BAPPEDA DIY mendorong peningkatan kompetensi pejabat fungsional perencana dalam penulisan artikel perencanaan.

Buku Jurnal Perencanaan ini memuat 6 (enam) artikel dari berbagai isu dan sejumlah alternatif solusi untuk bahan pengambilan kebijakan strategis. Beberapa substansi yang disampaikan tersebut memuat konsep dan pendekatan perencanaan multidimensi yang diharapkan dapat memperkaya khazanah perencanaan bagi publik dan menjadi bahan masukan dalam proses perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang oleh para pemangku kepentingan di DIY.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal ini. Semoga Jurnal Perencanaan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, Desember 2021

KEPALA

Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Kapanewon/Kemantren se-DIY	1
Dionysius Desembriarto dan Galang Yunawan	
Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-DIY	10
Dionysius Desembriarto dan Dadang Wibowo	
Jimpitan Ronda: Jaminan Sosial Berbasis Kearifan Lokal di RW 01 Kocoran, Kalurahan 17 Caturtunggal, Depok, Sleman	
Kencana Suluh Hikmah dan Anif Muchlashin	
Pengaruh Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di DIY...	27
Dwi Sucihartini	
Efektivitas Penyebarluasan Informasi Keistimewaan	38
Rufariza	
Sembilan Tahun Implementasi Keistimewaan DIY Urusan Tata Ruang	48
M. A. Fathoni	

Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Kapanewon/Kemantren se-Daerah Istimewa Yogyakarta

Dionysius Desembriarto¹ dan Galang Yunawan²

desembriarto@gmail.com

¹Perencana Muda Bappeda DIY, ²CPNS BPPSD Bappeda DIY

Abstrak

Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah terjadi dalam proses perkembangan pembangunan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal tersebut ditunjukkan dengan masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan ekonomi yang diukur oleh pendapatan per kapita dengan pendekatan PDRB per kapita. Selama ini ketimpangan pembangunan ekonomi yang diketahui adalah ketimpangan antar kabupaten dan kota. Analisis ini bertujuan untuk meneliti perkembangan ketimpangan pembangunan ekonomi antar kapanewon/kemantren baik di lingkup wilayah kabupaten dan kota maupun di tingkat DIY. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar kapanewon/kemantren di tingkat kabupaten dan kota tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2013. Namun tingkat ketimpangan antar kapanewon/kemantren di tingkat DIY mengalami penurunan. Penurunan ketimpangan di tingkat DIY tersebut disebabkan oleh peningkatan rata-rata kapanewon yang kurang sejahtera lebih tinggi dari pada kapanewon/kemantren yang lebih sejahtera. Upaya intervensi afirmatif harus dilakukan oleh pemerintah untuk lebih menggiatkan aktivitas perekonomian daerah kurang sejahtera yang didominasi oleh daerah berkarakter perdesaan.

Kata kunci: ketimpangan pembangunan ekonomi, pendapatan per kapita, PDRB per kapita

I. Pendahuluan

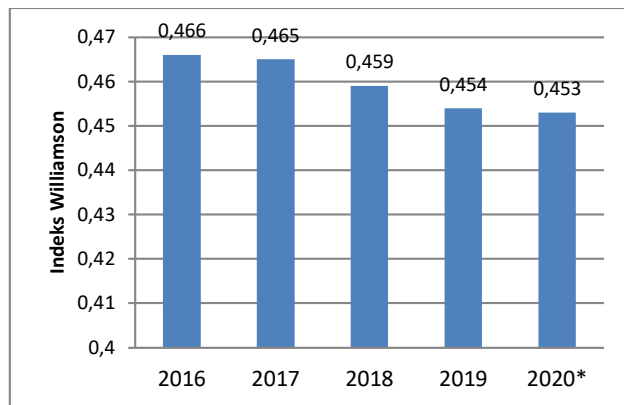
Negara berkembang dan daerah-daerah yang relatif masih belum maju senantiasa melakukan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara atau daerah dan masyarakatnya. Berbagai permasalahan dihadapi dalam menjalani proses pembangunan. Salah satu masalah tersebut adalah ketimpangan capaian pembangunan akibat dampak pelaksanaan pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah atau daerah. Kesenjangan adalah tantangan yang berkelanjutan di banyak negara berkembang dan merupakan tantangan terkini pada proses pembangunan daerah (Shankar dan Anwar, 2003, dan Pito, 2013 dalam Aini, Harianto dan Puspitawati, 2016). Ketimpangan pembangunan terutama pembangunan ekonomi mengindikasikan aspek ketidakadilan baik antara wilayah maupun penduduk serta kekurangberpihakan pada pihak yang lemah dan lebih tertinggal. Selanjutnya

ketimpangan pembangunan antar daerah akan berimplikasi terhadap masalah tingkat kesejahteraan masyarakat pada daerah yang tertinggal atau kurang maju. Dampak ketimpangan dapat berakibat kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat (Simbolon, 2009).

Proses pembangunan ekonomi di DIY mengindikasikan adanya ketimpangan antar wilayah. Di tingkat antar kabupaten/kota, ketimpangan ekonomi dapat diketahui dari Indeks Williamson antar wilayah tersebut.

Ketimpangan pembangunan ekonomi DIY menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun pada periode 2016 – 2020. Pada tahun 2016, Indeks Williamson adalah 0,466 yang turun terus menjadi 0,453 di tahun 2020. Ketimpangan tersebut disebabkan karena masih ada dispersi

pendapatan per kapita yang didekati dengan PDRB per kapita antar kabupaten dan kota.



Gambar 1. Indeks Williamson DIY Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan
Keterangan: *olahan

Tabel 1. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kulon Progo	15.793,01	16.552,31	18.152,12	20.386,66	19.367,28
Bantul	16.649,79	17.291,77	18.030,22	18.809,15	18.289,50
Gunungkidul	16.188,92	16.838,72	17.542,47	18.317,63	18.035,10
Sleman	25.043,54	26.091,56	27.461,57	28.931,90	27.508,06
Yogyakarta	56.341,42	58.591,32	61.116,58	64.095,36	61.971,23
DIY	26.003,34	27.073,14	28.460,59	30.108,14	29.034,23

Sumber: BPS Provinsi DIY, beberapa tahun

Selama periode 2016 – 2020, PDRB per kapita Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta selalu di atas rata-rata DIY. PDRB per kapita tertinggi dicapai oleh Kota Yogyakarta yaitu Rp56,341 juta di tahun 2016 yang meningkat terus menjadi Rp61,971 juta di akhir periode. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo mencapai tingkat PDRB per kapita terendah di tahun 2016 dan 2017. Sedangkan daerah yang mencapai PDRB per kapita terendah pasca 2017 adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pada tingkat kapanewon/kemantren (Kapanewon adalah nomenklatur bagi daerah setingkat kecamatan di Kabupaten dan kemantren di Kota), selama ini tidak pernah ada penghitungan Indeks Williamson yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi antar kapanewon. Hal tersebut disebabkan oleh tidak

adanya penghitungan PDRB di tingkat kapanewon. Untuk mengetahui ketimpangan antar kapanewon, penelitian ini ditujukan mengukur Indeks Williamson dengan menghitung data proksi PDRB per kapita. Penelitian ini dilakukan agar terdapat gambaran ketimpangan pembangunan ekonomi di DIY yang lebih komprehensif.

II. Telaah Teori dan Metodologi Penelitian

2.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (Bappeda, 2021). Nilai PDRB memberikan informasi kinerja ekonomi dan bagaimana produksi/pendapatan dihasilkan dan pengeluaran dialokasikan.

Terdapat 3 cara penghitungan PDRB, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dengan mendasari pada PDRB atas dasar harga konstan dikelompokkan dalam lapangan usaha (sektor)

PDRB dalam pendekatan ini didefinisikan sebagai semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi impor).

Dalam pendekatan pendapatan, PDRB merupakan penjumlahan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, di mana besarnya adalah sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi

subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Secara konseptual, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Di Indonesia selama ini, PDRB yang merupakan salah satu data dasar dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan produksi (lapangan usaha) dan pendekatan pengeluaran. Terdapat dua jenis data PDRB yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Pada PDRB ADHB, nilai barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan harga pada tahun saat PDRB tersebut dihitung. Sedangkan nilai barang dan jasa yang dihitung dalam PDRB ADHK menggunakan harga pada tahun dasar. Saat ini tahun dasar yang digunakan dalam menghitung PDRB ADHK adalah tahun 2010. Penghitungan PDRB ADHK ditujukan untuk menghilangkan efek kenaikan harga tiap tahun agar penghitungan PDRB menghasilkan nilai riil pada tahun bersangkutan.

2.2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita mencerminkan nilai output rata-rata yang dihasilkan oleh setiap penduduk daerah yang memiliki nilai PDRB terkait. PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk (Wijayanto, 2016)

2.3. Indeks Williamson

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah (regional) adalah indeks ketimpangan daerah yang diperkenalkan oleh Jeffry G. Williamson. Indeks Williamson menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah. Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin kecil nilai indeks tersebut maka tingkat ketimpangannya semakin kecil, sebaliknya ketimpangan semakin besar jika nilai indeks semakin mendekati 1. Tingkat ketimpangan yang diukur oleh Indeks Williamson tersebut menunjukkan ketimpangan yang terjadi di daerah tingkat di bawahnya. Misalnya, Indeks Williamson provinsi menunjukkan tingkat

ketimpangan pendapatan antara kabupaten/kota di provinsi tersebut. Rumus penghitungan indeks Williamson dapat ditulis sebagai berikut (Bappeda, 2021):

$$IW = \sqrt{\frac{\sum_i (Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}}$$

Keterangan:

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota i

Y = PDRB per kapita Provinsi

f_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota i

n = Jumlah penduduk Provinsi

2.4. Pengeluaran per Kapita dalam Indeks Pembangunan Manusia

Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita merupakan salah satu komponen penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY, 2019). *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan paradigma baru model pembangunan yaitu konsep "Pembangunan Manusia (*Human Development*)" Semenjak tahun 1990 (Sulistiyaningrum, 2019 dan Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY, 2019). Menurut model tersebut, pembangunan manusia dimaknai sebagai upaya memperluas pilihan bagi setiap penduduk untuk mengembangkan dirinya. Ukuran capaian pembangunan manusia diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasar yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak (Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY, 2019). Dalam IPM, dimensi kesehatan, diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) waktu lahir. Dimensi pengetahuan dasar diukur dengan gabungan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan, dimensi hidup layak diukur dengan indikator kemampuan daya beli (KDB). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. (Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY, 2019)

2.5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara atau daerah dengan jumlah penduduk negara atau daerah tersebut pada suatu periode tertentu. Pada tataran daerah, pendapatan daerah dicerminkan melalui PDRB (Syahrullah Dio, 2012 dalam Hanum dan Sarlia, 2019). Pendapatan per kapita dapat dipakai untuk melihat tingkat kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Pendapatan per kapita yang meningkat merupakan salah satu indikasi bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat. Pendapatan per kapita memperlihatkan pula apakah kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, berapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut.

2.6. Hubungan antara Pendapatan dan Pengeluaran

Pendapatan per kapita merupakan faktor yang sangat penting untuk mengetahui kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Jika pendapatan per kapita naik maka konsumsi masyarakat juga meningkat (Azizah, Wahyu, Sudarti dan Kusuma, 2018)

Hubungan antara pengeluaran dan pendapatan dapat dijelaskan dengan Fungsi Konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu persamaan matematik yang menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi seseorang atau rumah tangga dengan pendapatan disposibel atau pendapatan nasional. Jika fungsi konsumsi merupakan fungsi yang dipengaruhi oleh pendapatan disposibel maka dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut (Sukirno, 2001 dalam Hanum dan Sarlia, 2019):

$$C = a + bY_d$$

Keterangan:

a : konsumsi autonomus,

b : kecenderungan mengkonsumsi marginal,

Y_d : pendapatan disposibel

Keynes membuat dugaan-dugaan mengenai fungsi konsumsi berdasarkan instrospeksi dan observasi kasual. Dugaan tersebut di antaranya adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata dan konsumsi tersebut dipengaruhi oleh pendapatan serta tidak memiliki hubungan yang penting dengan tingkat bunga. Kecenderungan

mengkonsumsi marginal (*Marginal Propensity to Consume/MPC*) maksudnya adalah tambahan jumlah yang dikonsumsi apabila adanya tambahan pendapatan yang memiliki nilai antara nol hingga satu.

III. Analisis dan Pembahasan

3.1. Data Penelitian

Penelitian ini menganalisis data di kapanewon se-DIY pada tahun 2013 dan 2018. Data yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah:

- a. Pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penelitian ini besaran padahal variabel pengeluaran per kapita yang digunakan untuk mengukur kemampuan daya beli dalam penghitungan IPM. Penelitian ini menggunakan data pengeluaran per kapita tingkat kabupaten dan kapanewon/kemantren. Data pengeluaran per kapita kabupaten digunakan dalam regresi fungsi konsumsi untuk mendapatkan keterkaitan antara pengeluaran per kapita dan pendapatan per kapita. Data pengeluaran per kapita dirilis oleh BPS Provinsi DIY setiap tahunnya sebagai bagian dari penghitungan IPM. Penelitian ini menggunakan data pengeluaran per kapita kapanewon/kemantren yang merupakan bagian penghitungan IPM tingkat kapanewon/kemantren. Data ini diproduksi oleh BPS yang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY pada tahun 2013 dan 2018. Satuan pengeluaran per kapita adalah Rupiah;
- b. PDRB per kapita mencerminkan pendapatan per kapita. Dalam model regresi fungsi konsumsi PDRB per kapita menggantikan pendapatan disposibel. Nilai PDRB per kapita akan dihasilkan dari fungsi konsumsi yang menggambarkan pengaruh pengeluaran per kapita terhadap PDRB per kapita. Data PDRB per kapita yang digunakan dalam persamaan regresi tersebut adalah PDRB per kapita tingkat kabupaten/kota. Sedangkan PDRB per kapita tingkat kapanewon/kemantren dihitung dari penerapan fungsi konsumsi yang sudah dihasilkan sebelumnya. Satuan PDRB per kapita adalah Rupiah;

- c. Jumlah penduduk per kapanewon/kemantren adalah data jumlah penduduk tiap kapanewon/kemantren di DIY yang dirilis oleh BPS Kabupaten dan Kota. Satuan jumlah penduduk adalah Orang;

3.2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan beberapa langkah untuk mendapatkan nilai Indeks Williamson tingkat kapanewon yang digunakan dalam menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar kapanewon/kemantren. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Melakukan regresi persamaan fungsi konsumsi untuk mendapatkan pengaruh pendapatan per kapita terhadap pengeluaran per kapita tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data *time series* dari 2013 sampai 2018;
2. Menghitung pendapatan per kapita tingkat kapanewon menggunakan hasil fungsi regresi pada langkah 1 dengan menggunakan data pengeluaran per kapita tingkat kapanewon/kemantren. Data pendapatan per kapita adalah data tahun 2013 dan 2018;
3. Menghitung Indeks Williamson tahun 2013 dan 2018 dengan menggunakan data pendapatan per kapita yang dihitung di poin 2 dan jumlah penduduk di tingkat kapanewon/kemantren pada tahun 2013 dan 2018.

3.3. Hasil Analisis

3.3.1. Hasil Analisis Regresi

Regresi yang dilakukan terhadap lima kabupaten dan kota menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Data pengeluaran per kapita dan pendapatan per kapita tingkat kabupaten/kota disajikan pada Lampiran 1. Persamaan regresi untuk tiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut dan output hasil regresi disajikan pada Lampiran 2:

1. Kabupaten Kulon Progo:
Pengeluaran per kapita = $3.543,05 + 0,341$
Pendapatan per kapita
2. Kabupaten Bantul:

Pengeluaran per kapita = $6.045,99 + 0,519$
Pendapatan per kapita

3. Kabupaten Gunungkidul:
Pengeluaran per kapita = $3.444,60 + 0,319$
Pendapatan per kapita

4. Kabupaten Sleman:
Pengeluaran per kapita = $6.073,27 + 0,355$
Pendapatan per kapita

5. Kota Yogyakarta:
Pengeluaran per kapita = $7.106,45 + 0,188$
Pendapatan per kapita.

3.3.2. Penghitungan Pendapatan per Kapita tingkat Kapanewon/kemantren

Berdasarkan hasil regresi pada poin 3.3.1., pendapatan per kapita tingkat kapanewon/kemantren dihitung dengan menggunakan regresi pada tingkat kabupaten/kota yang merupakan wilayah di atas hirarki kapanewon/kemantren terkait. Data pengeluaran per kapita tingkat kapanewon/kemantren dan hasil penghitungan pendapatan per kapita tingkat kapanewon disajikan pada Lampiran 3.

3.3.3. Penghitungan dan Analisis Indeks Williamson

Berdasarkan data pendapatan per kapita yang dihasilkan pada bagian 3.3.2., nilai Indeks Williamson tiap kabupaten/kota yang menggambarkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar kapanewon/kemantren yang berada pada hirarki di bawahnya adalah sebagai berikut:

Wilayah	Tahun	
	2013	2018
Kulon Progo	0,0011	0,2509
Bantul	0,0023	0,1781
Gunungkidul	0,0014	0,2666
Sleman	0,0034	0,3319
Yogyakarta	0,0020	0,1195
DIY	0,4901	0,4860

Secara umum, perkembangan tingkat ketimpangan antar kapanewon/kemantren dan pendapatan per kapita adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan antar kapanewon/kemantren di tiap kabupaten dan kota menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2018;
2. Pada tahun 2013, ketimpangan antar kapanewon/kemantren tertinggi di tingkat kabupaten/kota terjadi di Kabupaten Sleman dengan Indeks Williamson sebesar 0,0034;
3. Pada tahun 2018, ketimpangan antar kapanewon/kemantren tertinggi di tingkat kabupaten/kota juga terjadi di Kabupaten Sleman dengan Indeks Williamson sebesar 0,3319;
4. Ketimpangan antar kapanewon/kemantren di tingkat DIY menunjukkan penurunan dengan Indeks Williamson sebesar 0,4901 di tahun 2013 menjadi 0,4860 di tahun 2018;
5. Peningkatan rata-rata pendapatan per kapita seluruh kabupaten dan kota tahun 2018 dari tahun 2013 adalah 21,10%. Kabupaten Kulon Progo dan Bantul yang merupakan dua daerah dengan pendapatan per kapita relative rendah meningkatkan pendapatan per kapita lebih tinggi dari rata-rata. Peningkatan pendapatan per kapita Kabupaten Kulonprogo 24,95% dan Kabupaten Bantul adalah 23,04%. Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah berpendapatan per kapita tertinggi hanya mencapai peningkatan pendapatan per kapita sebesar 14,86%. Dinamika tersebut menyebabkan tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten dan kota mengalami penurunan. Penurunan ketimpangan secara keseluruhan disebabkan juga oleh *catching up* beberapa kapanewon berpendapatan per kapita tertinggi di wilayah yang kurang sejahtera terhadap kapanewon/kemantren berpendapatan terendah di wilayah yang lebih sejahtera. Sebagai contoh, perbandingan antara Kapanewon Wates di Kabupaten Kulon Progo dan Kapanewon Wonosari di Kabupaten Gunungkidul dengan Kapanewon Turi di Kabupaten Sleman dan Kemantren Gondomanan di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Perbandingan	2013	2018
Turi - Wates	1,55	0,93
Gondomanan - Wates	3,50	1,97
Turi - Wonosari	1,50	0,85
Gondomanan - Wonosari	3,41	2,50

- Angka perbandingan menunjukkan bahwa perbandingan nilai antara kapanewon/kemantren yang lebih sejahtera dibandingkan kapanewon/kemantren yang kurang sejahtera pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Pendapatan per kapita Kapanewon Turi adalah 1,55 kali Kapanewon Wates di tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2018, pendapatan per kapita Kapanewon Turi turun menjadi 0,93 kali Wates;
6. Kapanewon/kemantren yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi dapat mencapai peningkatan pendapatan per kapita tertinggi. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan per kapita antar kapanewon/kemantren di tiap kabupaten dan kota mengalami peningkatan;
 7. Pada tahun 2018, mayoritas kapanewon/kemantren yang mencapai pendapatan tertinggi adalah daerah yang merupakan atau didominasi kawasan perkotaan.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten dan kota se-DIY menunjukkan tren menurun selama lima tahun terakhir;
2. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kapanewon/kemantren di tiap kabupaten dan kota menunjukkan peningkatan di tahun 2018 dibandingkan tahun 2013;
3. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kapanewon/kemantren di tingkat DIY menunjukkan penurunan di tahun 2018 dibandingkan tahun 2013;
4. Dinamika ketimpangan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa wilayah yang didominasi kawasan perkotaan mencapai tingkat kinerja ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang didominasi kawasan perdesaan;
5. Pemerintah Kabupaten dan Kota harus melakukan kebijakan afirmatif untuk mengintervensi perekonomian kapanewon/kemantren yang masih kurang sejahtera agar ketimpangan pembangunan semakin berkurang. Peningkatan kapasitas pemerintah di kapanewon/kemantren yang masih kurang maju harus dilakukan untuk dapat meningkatkan produktivitas sumber daya yang terdapat di daerahnya agar dapat tumbuh lebih tinggi. Pemda DIY juga harus melakukan kebijakan yang sama dengan memberikan perhatian yang memadai untuk

- melakukan intervensi kapanewon/kemantren yang kurang berkembang secara ekonomi;
6. Pembangunan sektor ekonomi harus lebih diarahkan untuk menggiatkan aktivitas perekonomian di daerah perdesaan. Peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan usaha tani yang memadai dapat menjadi intervensi penting dalam menggiatkan perekonomian perdesaan. Upaya ini dapat didampingi dengan peningkatan usaha pengolahan hasil pertanian dan usaha *off-farm* yang terkait dengan sektor pertanian. Semua intervensi tersebut harus didasari pada potensi sumber daya terutama sumber daya alam;
 7. Intervensi sektor lain yang dapat dilakukan untuk mendorong perkembangan dinamika ekonomi perdesaan adalah penyediaan yang memadai atas akses infrastruktur transportasi, komunikasi dan permodalan;
 8. Pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia perdesaan juga mutlak dilakukan agar daerah perdesaan memiliki kapasitas organisasi daerah dan sumber daya yang siap menerapkan praktek-praktek bisnis yang lebih modern agar pengelolaan semua bidang bisnis perdesaan dapat lebih baik.

Daftar Pustaka

- Aini, Nur Dewi, Harianto dan Herien Puspitawati (2016) Ketimpangan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pembangunan Manusia di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8 (1), 71-85
- Azizah, Elda Wahyu, Sudarti dan Hendra Kusuma (2018) Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol 2. Jilid 1.
- Banendro, Sigit Dewahyu (2017) *Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 - 2012*, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79039>, diakses 30 September 2021.
- Bappeda DIY (2021) *Analisis Makroekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta*
- Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY (2019) *Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per Kecamatan Daerah Istimewa Yogyakarta*
- BPS Kabupaten Bantul (2014) *Kabupaten Bantul Dalam Angka 2014*
- BPS Kabupaten Bantul (2019) *Kabupaten Bantul Dalam Angka 2019*
- BPS Kabupaten Gunungkidul (2014) *Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2014*
- BPS Kabupaten Gunungkidul (2019) *Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2019*
- BPS Kabupaten Kulon Progo (2014) *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2014*
- BPS Kabupaten Kulon Progo (2019) *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2019*
- BPS Kabupaten Sleman (2014) *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2014*
- BPS Kabupaten Sleman (2019) *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2019*
- BPS Kota Yogyakarta (2014) *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2014*
- BPS Kota Yogyakarta (2019) *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019*
- BPS Provinsi DIY (2012) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2012*
- BPS Provinsi DIY (2014) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014*
- BPS Provinsi DIY (2016) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016*
- Hanum, Nurlaila dan Sari Sarlia (2019) Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Konsumsi di Provinsi Aceh , *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 3, No. 1, April
- Riduwan dan Sunarto (2009) *Pengantar Statistika Untuk Penelitian, Pendidikan, Sosial, Ekonomi dan Bisnis*. Alfabeta, Jakarta
- Simbolon, Tiur Roida (2009) *Analisis Keterkaitan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatera*. Diakses tanggal 25 Juni 2021 dari <https://osf.io/xzmr9>.
- Walpole, Ronald E. (1995) *Pengantar Statistika*. Edisi ke-3. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Wijayanto, Anton Tri (2016) Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000 – 2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16. No. 02.

Lampiran

Lampiran 1. Pengeluaran per Kapita dan Pendapatan per Kapita Kabupaten dan Kota tahun 2013 - 2018

Wilayah dan Tahun	Pengeluaran per Kapita	Pendapatan per Kapita
Kulon Progo		
2013	8.468	14.242
2014	8.480	14.726
2015	8.688	15.240
2016	8.938	15.794
2017	9.277	16.551
2018	9.698	18.151
Bantul		
2013	13.902	14.929
2014	13.921	15.479
2015	14.320	16.046
2016	14.880	16.650
2017	14.995	17.292
2018	15.386	18.030
Gunungkidul		
2013	8.202	14.535
2014	8.235	15.033
2015	8.336	15.591
2016	8.447	16.189
2017	8.788	16.839
2018	9.163	17.543
Sleman		
2013	14.085	22.218
2014	14.170	23.138
2015	14.562	24.067
2016	14.921	25.043
2017	15.365	26.092
2018	15.844	27.461
Yogyakarta		
2013	16.645	50.263
2014	16.755	52.268
2015	17.317	54.259
2016	17.770	56.341
2017	18.005	58.590
2018	18.629	61.116

Lampiran 2. Hasil Regresi atas Pengaruh Pendapatan per Kapita terhadap Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota

a. Regresi Kabupaten Kulon Progo

Variabel	Koefisien	P-Value (Sig.)
Konstanta	3.543,051	0,001
Pengeluaran per Kapita	0,3409644	0,000
$R^2 = 0,9798$ Adj $R^2 = 0,9748$		

b. Regresi Kabupaten Bantul

Variabel	Koefisien	P-Value (Sig.)
Konstanta	6.045,995	0,002
Pengeluaran per Kapita	0,5194565	0,001
$R^2 = 0,9587$ Adj $R^2 = 0,9483$		

c. Regresi Kabupaten Gunungkidul

Variabel	Koefisien	P-Value (Sig.)
Konstanta	3.444,604	0,010
Pengeluaran per Kapita	0,3188486	0,003
$R^2 = 0,9187$ Adj $R^2 = 0,8984$		

d. Regresi Kabupaten Sleman

Variabel	Koefisien	P-Value (Sig.)
Konstanta	6.073,268	0,000
Pengeluaran per Kapita	0,3547341	0,000
$R^2 = 0,9853$ Adj $R^2 = 0,9816$		

e. Regresi Kota Yogyakarta

Variabel	Koefisien	P-Value (Sig.)
Konstanta	7.106,452	0,001
Pengeluaran per Kapita	0,1877264	0,000
$R^2 = 0,9801$ Adj $R^2 = 0,9752$		

Lampiran 3. Pengeluaran per Kapita dan Pendapatan per Kapita Kapanewon/Kemantren se-DIY (dalam Rupiah)

Kabupaten/Kota dan Kapanewon	Pengeluaran per Kapita		Pendapatan per Kapita	
	2013	2018	2013	2018
Kulon Progo				
Temon	8.474,00	12.857,00	14.461,77	27.316,49
Wates	8.477,00	12.862,00	14.470,57	27.331,15
Panjatan	8.465,00	10.381,00	14.435,38	20.054,73
Galur	8.467,00	9.328,00	14.441,24	16.966,43
Lendah	8.478,00	9.834,00	14.473,50	18.450,46
Sentolo	8.466,00	8.607,00	14.438,31	14.851,84
Pengasih	8.470,00	9.484,00	14.450,04	17.423,96
Kokap	8.465,00	8.606,00	14.435,38	14.848,91
Girimulyo	8.464,00	8.605,00	14.432,44	14.845,98
Nanggulan	8.466,00	8.607,00	14.438,31	14.851,84
Kalibawang	8.466,00	8.607,00	14.438,31	14.851,84
Samigaluh	8.458,00	8.599,00	14.414,85	14.828,38
Bantul				
Srandakan	13.872,00	14.103,00	15.065,76	15.510,45
Sanden	13.888,00	17.347,00	15.096,56	21.755,44

Kabupaten/Kota dan Kapanewon	Pengeluaran per Kapita		Pendapatan per Kapita	
	2013	2018	2013	2018
Kretak	13.908,00	15.392,00	15.135,06	17.991,89
Pundong	13.877,00	16.092,00	15.075,38	19.339,45
Bambanglipuro	13.879,00	13.926,00	15.079,23	15.169,71
Pandak	13.885,00	13.931,00	15.090,78	15.179,34
Bantul	13.902,00	18.224,00	15.123,51	23.443,74
Jetis	13.884,00	18.202,00	15.088,86	23.401,39
Imogiri	13.898,00	16.153,00	15.115,81	19.456,88
Dlingo	13.872,00	13.918,00	15.065,76	15.154,31
Pleret	13.883,00	15.758,00	15.086,93	18.696,47
Piyungan	13.889,00	13.935,00	15.098,48	15.187,04
Banguntapan	13.920,00	14.828,00	15.158,16	16.906,14
Sewon	13.916,00	17.569,00	15.150,46	22.182,81
Kasihan	13.917,00	18.244,00	15.152,39	23.482,25
Pajangan	13.873,00	13.919,00	15.067,68	15.156,24
Sedayu	13.897,00	15.380,00	15.113,88	17.968,79
Gunungkidul				
Panggang	8.193,00	9.321,00	14.892,32	18.430,05
Purwosari	8.205,00	8.554,00	14.929,96	16.024,52
Paliyan	8.210,00	8.559,00	14.945,64	16.040,20
Saptosari	8.198,00	8.547,00	14.908,00	16.002,57
Tepus	8.188,00	8.536,00	14.876,64	15.968,07
Tanjungsari	8.195,00	9.246,00	14.898,59	18.194,83
Rongkop	8.198,00	8.547,00	14.908,00	16.002,57
Girisubo	8.197,00	9.283,00	14.904,87	18.310,87
Semanu	8.201,00	9.238,00	14.917,41	18.169,74
Ponjong	8.199,00	8.548,00	14.911,14	16.005,70
Karangmojo	8.205,00	8.554,00	14.929,96	16.024,52
Wonosari	8.213,00	13.052,00	14.955,05	30.131,53
Playen	8.199,00	10.639,00	14.911,14	22.563,67
Patuk	8.193,00	9.732,00	14.892,32	19.719,06
Gedangsari	8.203,00	8.551,00	14.923,68	16.015,11
Nglipar	8.199,00	8.548,00	14.911,14	16.005,70
Ngawen	8.190,00	8.538,00	14.882,91	15.974,34
Semin	8.195,00	8.943,00	14.898,59	17.244,54
Sleman				
Moyudan	14.046,00	16.028,00	22.475,23	28.062,52
Minggir	14.072,00	15.204,00	22.548,53	25.739,65
Seyegan	14.055,00	15.118,00	22.500,61	25.497,22
Godean	14.064,00	15.197,00	22.525,98	25.719,92
Gamping	14.063,00	15.196,00	22.523,16	25.717,10
Mlati	14.100,00	17.626,00	22.627,46	32.567,30
Depok	14.112,00	20.506,00	22.661,29	40.686,06
Berbah	14.080,00	15.215,00	22.571,08	25.770,66
Prambanan	14.047,00	15.178,00	22.478,05	25.666,36

Kabupaten/Kota dan Kapanewon	Pengeluaran per Kapita		Pendapatan per Kapita	
	2013	2018	2013	2018
Kalasan	14.080,00	15.214,00	22.571,08	25.767,84
Ngemplak	14.088,00	15.223,00	22.593,63	25.793,21
Ngaglik	14.113,00	17.642,00	22.664,11	32.612,40
Sleman	14.058,00	15.190,00	22.509,06	25.700,19
Tempel	14.036,00	15.116,00	22.447,04	25.491,58
Turi	14.035,00	15.116,00	22.444,23	25.491,58
Pakem	14.076,00	15.210,00	22.559,80	25.756,57
Cangkringan	14.066,00	15.119,00	22.531,61	25.500,04
Yogyakarta				
Mantrijeron	16626,00	17248,00	50709,69	54023,02
Kraton	16645,00	17267,00	50810,90	54124,24
Mergangsan	16631,00	18254,00	50736,33	59381,89
Umbulharjo	16662,00	17627,00	50901,46	56041,92
Kotagede	16633,00	17596,00	50746,98	55876,79
Gondokusuman	16671,00	21259,00	50949,40	75389,23
Danurejan	16650,00	17273,00	50837,54	54156,20
Pakualaman	16636,00	21215,00	50762,96	75154,84
Gondomanan	16607,00	17228,00	50608,48	53916,49
Ngampilan	16617,00	17224,00	50661,75	53895,18
Wirobrajan	16633,00	17438,00	50746,98	55035,14
Gedong Tengen	16619,00	18600,00	50672,40	61225,00
Jetis	16624,00	17245,00	50699,04	54007,04
Tegalrejo	16638,00	17260,00	50773,62	54086,95

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-DIY

Dionysius Desembriarto¹ dan Dadang Wibowo²

desembriarto@gmail.com

¹Perencana Ahli Muda Bappeda DIY, ²Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang BPPSD Bappeda DIY

Abstrak

Paradigma pembangunan manusia telah menjadi acuan pembangunan di DIY. Tingkat capaian pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY menggambarkan bahwa pembangunan manusia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan tingkat capaian pembangunan manusia DIY lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Di lain pihak, tingkat kemiskinan di DIY selalu berada di atas rata-rata nasional. Hal itu menunjukkan prestasi capaian pembangunan DIY tidak diikuti dengan hasil prestasi capaian tingkat kemiskinan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan. Hasil regresi penelitian ini menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Semakin meningkatnya pembangunan manusia maka tingkat kemiskinan semakin menurun. Meskipun demikian, IPM bukan merupakan variabel dominan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Intervensi yang harus dilakukan adalah peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan kualitas SDM masyarakat yang sudah cukup baik dengan landasan pembangunan manusia dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan.

Kata-kunci : indeks pembangunan manusia, pengangguran, tingkat kemiskinan

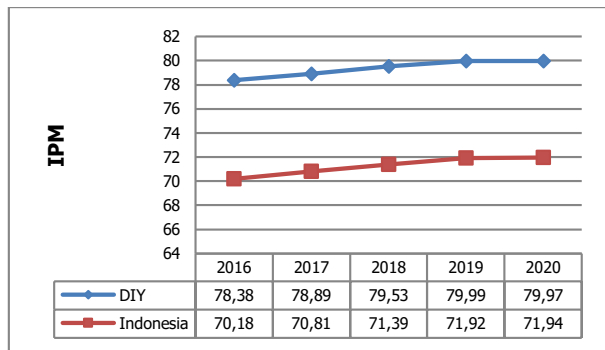
I. Pendahuluan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan perwujudan dari tiga aspek pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir. Dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Sedangkan standar hidup yang layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Capaian pembangunan manusia DIY sampai dengan tahun 2019 selalu menunjukkan peningkatan dan selalu berada pada tingkat "IPM

Tinggi" yang nilai IPM berkisar antara 70 dan 80. Pada tahun 2020, IPM turun menjadi 79,97 dibanding tahun sebelumnya yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Meskipun demikian, capaian IPM DIY selalu lebih tinggi dibandingkan IPM nasional sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 dan menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia.

Di tingkat kabupaten/kota, IPM empat wilayah selalu masuk kategori tinggi. IPM di wilayah-wilayah tersebut juga senantiasa di atas tingkat nasional. Hanya Kabupaten Gunungkidul yang masih mempunyai tingkat pembangunan manusia sedang.



Gambar 1. IPM DIY dan Indonesia, 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi DIY, beberapa tahun

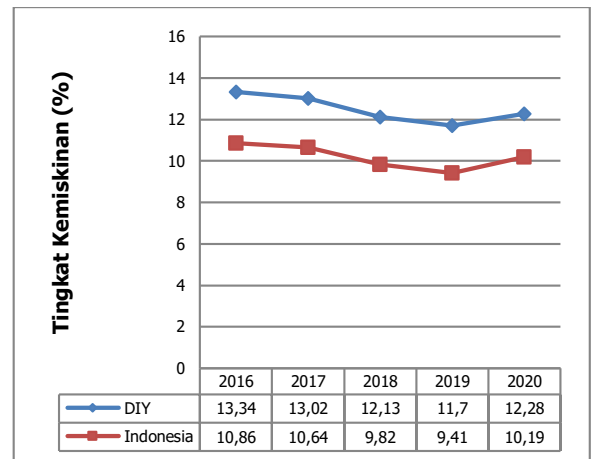
Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kulon Progo	72,38	73,23	73,76	74,44	74,76
Bantul	78,42	78,67	79,45	80,01	80,01
Gunungkidul	67,82	68,73	69,24	69,96	69,98
Sleman	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84
Yogyakarta	85,32	85,49	86,11	86,65	86,61

Sumber: BPS Provinsi DIY, beberapa tahun

Pada aspek kemiskinan, tingkat kemiskinan DIY sampai dengan 2019 mengalami penurunan dan meningkat di tahun 2020. Pola yang sama juga terjadi di tingkat nasional. Kenaikan tingkat kemiskinan disebabkan oleh dampak pandemi. Meskipun kemiskinan senantiasa menurun sebelum pandemi, namun hingga saat ini tingkat kemiskinan DIY selalu di atas tingkat nasional. Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan DIY adalah 14,91% sedangkan nasional adalah 11,22%. Di akhir periode, tingkat kemiskinan DIY adalah 12,28% dan nasional adalah 10,19%. Pada periode 2016 sampai 2019, rata-rata penurunan tingkat kemiskinan DI adalah 0,8% sedangkan nasional adalah 0,45%.

Perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota se-DIY juga mengikuti pola DIY dan nasional. Sebanyak tiga wilayah di DIY mengalami tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional, sedangkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta selalu di atas nasional.



Gambar 2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia Tahun 2016 – 2019 (dalam persen)

Sumber: BPS Provinsi DIY, beberapa tahun

Tabel 2. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016-2020 (%)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kulon Progo	20,30	20,03	18,30	17,39	18,01
Bantul	14,55	14,07	13,43	12,92	13,5
Gunungkidul	19,34	18,65	17,12	16,61	17,07
Sleman	8,21	8,13	7,65	7,41	8,12
Kota Yogyakarta	7,70	7,64	6,98	6,84	7,27

Sumber: BPS Provinsi DIY, beberapa tahun

Perbandingan capaian IPM dan tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan adanya kontradiksi bahwa capaian pembangunan manusia DIY tidak diikuti dengan perkembangan tingkat kemiskinan. IPM DIY tergolong tinggi di Indonesia, namun tingkat kemiskinannya juga relatif tinggi di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keterkaitan antara IPM dan tingkat kemiskinan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk mengefektifkan upaya penurunan tingkat kemiskinan di DIY melalui pembangunan manusia.

II. Telaah Teori dan Kajian Sebelumnya

2.1. Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan paradigma baru model pembangunan yaitu konsep "Pembangunan Manusia (*Human Development*)" Semenjak tahun 1990 (Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY, 2019). Menurut model tersebut, pembangunan manusia

dimaknai sebagai upaya memperluas pilihan bagi setiap penduduk untuk mengembangkan dirinya. Perluasan pilihan sebagai dasar pembangunan manusia dapat diwujudkan dalam pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan; sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan/ketrampilan mereka. Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada capaian-capaian kinerja kesejahteraan terutama peningkatan pendapatan ekonomi.

Pembangunan manusia berimplikasi bahwa arah pembangunan: a. harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian; b. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal; c. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Ukuran capaian pembangunan manusia diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasar yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak (Rory, 2019 dan Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY, 2019). Menurut UNDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu: a. Dimensi kesehatan yang diwakili umur panjang dan sehat. b. Dimensi pengetahuan c. Dimensi kehidupan yang layak. Dalam IPM, dimensi kesehatan, diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) waktu lahir. Dimensi pengetahuan dasar diukur dengan gabungan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan, dimensi hidup layak diukur dengan indikator kemampuan daya beli (KDB). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. (Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY, 2019, hal. 11)

2.2. Tingkat Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga yang mempunyai kewenangan mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia. Konsep terkait kemiskinan yang digunakan BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan dijelaskan pada bagian berikut.

2.2.1. Penduduk Miskin

Pengukuran konsep untuk mengukur kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Menurut konsep ini, kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Besaran kebutuhan pengeluaran minimal untuk mencukupi kebutuhan dasar yang digunakan sebagai acuan pengukuran kemiskinan disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). GK adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. Sumber data utama yang digunakan sebagai data dasar dalam pengukuran penduduk miskin adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi untuk menentukan GKM. Sementara itu GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan adalah 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

2.2.2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan diukur dengan *Head Count Index* (HCI-P0) merupakan persentase penduduk yang berada di bawah GK. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

keterangan:

α : 0

z : garis kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk selama sebulan yang berada

dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
 n : jumlah penduduk

2.3. Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Upaya peningkatan pembangunan manusia di Indonesia sejalan dengan dengan pengurangan kemiskinan (Ginting, 2008 dalam Sulistyaningrum dan Muta'ali, 2020). Pembangunan manusia dilaksanakan melalui investasi modal manusia yang berupa upaya investasi di bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama intervensi dalam bidang kesehatan dan pendidikan diharapkan dapat berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga pekerja, penguasaan keterampilan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta mampu mengembangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Bosman, 2010, dalam Sulistyaningrum dan Muta'ali, 2020). Hasil dalam investasi sumber daya manusia tersebut akan meningkatkan pendapatan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan (Hidayat, 2008, dalam Sulistyaningrum dan Muta'ali, 2020).

2.4. Kajian Terkait Sebelumnya

Berikut ini adalah beberapa kajian atau penelitian yang fokus pada subyek penelitian sejenis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yustie (2017) untuk menguji dan menganalisis secara parsial pengaruh IPM dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan dan menguji dan menganalisis secara simultan kedua variabel independen tersebut terhadap kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur tahun 2012 – 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016;
2. Mukhtar, Saptono dan Arifin (2019) melakukan penelitian terhadap pengaruh IPM dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menemukan bahwa *pertama*, secara parsial indeks pembangunan manusia berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Kedua*, secara parsial tingkat pengangguran terbuka berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Ketiga*, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh dan signifikan secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Indonesia;
3. Penelitian oleh Rory (2019) melakukan analisis lebih lanjut mengenai hubungan kemiskinan dan IPM melalui 4 komponen IPM yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita disesuaikan, sehingga bisa diketahui sejauh mana peranan masing-masing komponen terhadap penurunan angka kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kemiskinan dan IPM beserta komponennya dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah regresi *nonparametric spline truncated linier* yang mengasumsikan bahwa besar kelinieran hubungan masing-masing komponen IPM terhadap kemiskinan hanya pada interval tertentu saja, besaran kelinierannya akan berubah pada interval lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun kenaikan nilai IPM menyebabkan penurunan angka kemiskinan tetapi tidak semua komponennya mempunyai peranan terhadap penurunan angka tersebut. Komponen IPM yang mempunyai peranan dalam penurunan kemiskinan adalah rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita disesuaikan. Besar peranan komponen-komponen tersebut terhadap penurunan kemiskinan tergantung pada posisi nilai komponen terhadap nilai interval komponen masing-masing;
4. Penelitian Safuridar dan Putri (2019) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia, pengangguran dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Kota/Kabupaten Aceh Bagian Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data IPM, pengangguran dan jumlah penduduk, serta data mengenai tingkat kemiskinan pada periode 2008-2017. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, Dari hasil penelitian dapat dijelaskan secara parsial pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang tidak signifikan. Di Kabupaten Aceh IPM berpengaruh signifikan sementara itu pengangguran di Kabupaten Aceh tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan di Kota Langsa pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kota/Kabupaten Aceh Bagian Timur adalah signifikan;

5. Penelitian Sinaga (2020) mengenai pengaruh IPM dan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Papua tahun 2015 – 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa IPM dapat memberikan kontribusi bagi penurunan tingkat kemiskinan di provinsi papua. Semakin tinggi angka IPM yang dicapai, maka kualitas sumber daya manusianya semakin baik, yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya perolehan pendapatan dan nantinya diharapkan menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi terbukti tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan;
6. Yulianti (2020) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh IPM dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010 – 2019. Hasil analisis menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Setiap kenaikan IPM sebesar 1% maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 31,60% *ceterisparibus*. Sementara itu pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kemiskinan.

III. Analisis dan Pembahasan

3.1. Data Penelitian

Penelitian ini menganalisis data di tingkat kabupaten dan kota se-DIY selama periode tahun 2011 sampai 2020. Data yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah:

- d. Pertumbuhan penduduk miskin dengan data mentah penduduk miskin yang merupakan angka jumlah penduduk miskin setiap tahunnya dirilis oleh BPS Provinsi DIY. Satuan pertumbuhan jumlah penduduk miskin adalah persen;
- e. Pertumbuhan IPM dengan data mentah IPM yang mengukur tingkat capaian pembangunan manusia. IPM setiap tahun dirilis oleh BPS Provinsi DIY. Satuan pertumbuhan IPM adalah persen;
- f. Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan penambahan atau pengurangan TPT pada suatu waktu terhadap waktu sebelumnya. Data dasar TPT adalah persentase jumlah penduduk yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja dengan satuan persen. TPT dirilis oleh BPS Provinsi DIY. Satuan perubahan TPT adalah persen.

3.2. Model Regresi

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan regresi *pooling data* dengan menerapkan metode CEM (*Common Effect Model*) untuk meneliti pengaruh pertumbuhan IPM dan perubahan TPT. Perubahan TPT dimasukkan dalam model sebagai variabel kontrol. Adapun persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + cX_2 + e$$

di mana:

- Y : Pertumbuhan Penduduk Miskin
a : Konstanta
X₁ : Pertumbuhan IPM
b : Koefisien X₁
X₂ : Perubahan tingkat pengangguran terbuka
e : Error

3.3. Hasil Analisis Regresi

Berikut adalah hasil regresi dengan Tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependen dan IPM sebagai variabel independen:

Variabel	Koefisien	P-Value (Sig.)
Konstanta	0,677	0,669
Pertumbuhan IPM	-4.480	0,039
Perubahan TPT	1,178	0,124
F hitung= 5,211 Sig. = 0,009 R ² = 0,199 Adj R ² = 0,161		

Berdasarkan output hasil regresi tersebut, variabel konstan (nilai Prob. = 0.669 > 0.05) dan X2 (nilai Prob. = 0.124 > 0.05) berpengaruh tidak secara signifikan terhadap variabel Y pada tingkat kepercayaan 95%. Adapun variabel X1 memiliki nilai Prob= 0.039 < 0.05, sehingga pada tingkat kepercayaan 95% berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

Berdasarkan hasil regresi pertama, model yang akan diregresi menghilangkan konstanta dan variabel perubahan tingkat pengangguran terbuka. Model kedua hanya menggunakan variabel pertumbuhan penduduk miskin sebagai variabel dependen.

Variabel	Koefisien	P-Value (Sig.)
Pertumbuhan IPM	-3,933	0,0005
R ² = 0,133 Adj R ² = 0,133		

Model yang terbentuk berdasarkan hasil regresi kedua adalah:

Pertumbuhan Jumlah Penduduk miskin = -3,933 pertumbuhan IPM + e

Nilai koefisien pada variabel IPM adalah sebesar (-3,933) yang bernilai negatif yang berarti IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dengan nilai elastisitas sebesar (-3,933) Artinya jika IPM di DIY naik 1%, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 3,933%, sebaliknya

jika IPM menurun, maka jumlah penduduk miskin akan meningkat dengan elastisitas sesuai besaran koefisien IPM. Sementara itu nilai *Adjusted R²* hanya sekitar 0,133 atau 13,3%. Angka tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 13,3% variasi atau perubahan pada pertumbuhan jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh pertumbuhan IPM. Sekitar 86,7% variasi atau perubahan pertumbuhan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh variabel lainnya.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

- Capaian pembangunan manusia DIY menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2011 – 2019 dan selalu berada di atas tingkat nasional. Pada tahun 2020, nilai IPM menurun akibat dampak pandemic Covid – 19;
- Tingkat kemiskinan DIY selalu menurun dari tahun ke tahun selama periode 2011 - 2019 namun tingkat kemiskinan DIY masih di atas rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan meningkat di tahun 2020 akibat dampak pandemi;
- Pembangunan manusia sejalan dengan upaya pengurangan kejadian kemiskinan yang ditunjukkan dengan pengaruh berbanding terbalik pertumbuhan IPM dengan pertumbuhan penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang memadai dan tepat sasaran untuk meningkatkan pembangunan harus selalu dilakukan agar untuk mengurangi tingkat kemiskinan di DIY. Sesuai dengan komponen dalam IPM, intervensi harus dilakukan di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
- Upaya pembangunan manusia juga harus diimbangi dengan peningkatan derajat pengaruh IPM terhadap kejadian kemiskinan sehingga dampak peningkatan IPM terhadap tingkat kemiskinan dapat lebih tinggi. Kondisi manusia yang baik menjadi landasan yang memadai untuk meningkatkan produktivitas sehingga intervensi yang harus dilakukan adalah dengan pengembangan tingkat produktivitas untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang ditujukan pada peningkatan pendapatan. Peningkatan

pendapatan dapat berpotensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan;

13. Berdasarkan sebaran data IPM dan tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota se-DIY, tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo, sementara itu dua wilayah tersebut memiliki capaian IPM yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa harus tetap ada kebijakan afirmatif dari Pemerintah Daerah DIY untuk memberikan perhatian yang memadai bagi dua wilayah tersebut;
14. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan faktor-faktor lain yang berpengaruh besar terhadap kejadian kemiskinan di DIY mengingat hasil studi ini pertumbuhan IPM hanya dapat menjelaskan sebagian kecil pertumbuhan penduduk miskin.

Daftar Pustaka

- Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY (2019) *Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per Kecamatan Daerah Istimewa Yogyakarta*
- BPS Provinsi DIY (2012) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2012*
- BPS Provinsi DIY (2014) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014*
- BPS Provinsi DIY (2016) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016*
- BPS Provinsi DIY (2018) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2018*
- BPS Provinsi DIY (2020) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2020*
- Fadlillah, Nurul, Sukiman dan Agustin Susyatna Dewi (2016) Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Eko-Regional*. Vol.11. No.1. Maret
- Mukhtar, S., A. Saptono dan AS Arifin (2019) The Analysis Of The Effects Of Human Development Index and Opened Unemployment Levels to the Poverty In Indonesia, *Jurnal Ecoplan*, Vol.2 No.2, Oktober, hlm. 77-89.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin dan U. Sulia Sukmawati (2018) Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 6, Nomor 2, 217 – 240.
- Pudjianto, Bambang dan M. Syawie (2015) Kemiskinan Dan Pembangunan Manusia Poverty and Human Development, *Sosio Informa* Vol. 1, No. 03, September - Desember,
- Riduwan dan Sunarto. (2009). *Pengantar Statistika Untuk Penelitian, Pendidikan, Sosial, Ekonomi dan Bisnis*. Alfabeta, Jakarta
- Rory (2019) Analisis Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Paremeter*, Vol. 4, No. 8, Juni, diakses 30 September 2021
- Safuridar dan Natasya Ika Putri (2019) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh Bagian Timur, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 3, No. 1, April 2019,
- Saragih, Juli Panglima (2014) Faktor Penyebab dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menghapus Kemiskinan. *JESP*. Vol. 6, No 2. Nopember.
- Sinaga, Indah Dewintari (2020) *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2015 – 2019*.
- Sulistyaningrum, Anita Nur dan Luthfi Muta'ali (2020) Analisis Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jateng Tahun 2013-2018, *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol 9, No 4
- Walpole, Ronald E. (1995) *Pengantar Statistika* .Edisi ke-3. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yulianti, Atik (2020) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Periode Tahun 2010-2019.
- Yustie, Renta (2017) Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur, *Equilibrium*, Edisi Khusus Oktober, Hal. 49-57.

Jimpitan Ronda: Jaminan Sosial Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di RW 01 Kocoran Caturtunggal, Depok, Sleman

Kencana Suluh Hikmah¹ dan Anif Muchlashin²

ibundakani@gmail.com

¹ Perencana Ahli Muda Bappeda DIY; ² Tenaga Ahli Sebermas Bappeda DIY

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan jaminan sosial oleh masyarakat kalurahan di RW 01 Kocoran Kalurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jaminan sosial tersebut biasa dikenal dengan nama Jimpitan Ronda. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan Jimpitan Ronda melibatkan modal sosial seperti rasa saling percaya dan semangat gotong royong yang kemudian didukung oleh kelembagaan yang terstruktur. Sebagai hasilnya, sistem jaminan sosial ini membawa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat baik dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan pembangunan dalam skala rukun warga (RW). Harapannya dengan penemuan ini dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi modal-modal sosial yang ada di masyarakat sebagai bagian dari pemetaan potensi untuk memecahkan masalah masyarakat yang berbasis partisipatif di masyarakat dan sebagai bagian dari pemerintah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di DIY yang berbasis partisipatif.

Kata kunci: gotong royong, jaminan sosial, masyarakat kota, modal sosial, kearifan lokal.

A. PENDAHULUAN

Budaya asing yang lebih mengedepankan individualisme dan ketergantungan akan teknologi sudah "mencemari" budaya Bangsa Indonesia yang syarat akan kebersamaan dan gotong royong (Muin, 2006). Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari globalisasi yang meminimalisir kendala batas geografis antar negara dengan didukung oleh teknologi sebagai alat pemersatunya (Ermawan T, 2017). Budaya persatuan dan gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia semakin terkikis eksistensinya dengan derasnya arus budaya asing yang masuk ke Indonesia.

Kondisi seperti ini menjadi keuntungan tersendiri bagi mereka yang dapat memanfaatkan teknologi dalam rangka mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Namun, kesejahteraan akan sulit tercapai bagi masyarakat yang tidak mampu mengambil peran, akhirnya muncul disparitas antar masyarakat. Kelompok masyarakat yang

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya kemudian akan mengandalkan bantuan dari negara dalam mencapai kesejahteraannya. Terkait dengan hal ini, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 telah mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk masyarakat. Namun, pada saat ini regulasi tersebut masih terbatas pada pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Output jaminan sosialnya masih sebatas BPJS dan KIS bagi kelompok masyarakat miskin yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terutama pada aspek jaminan kesehatan. Padahal, kebutuhan hidup masyarakat lebih beragam dari pada itu.

Kebutuhan hidup yang semakin beragam menjadikan pos-pos pengeluaran ekonomi masyarakat semakin banyak, sebagian golongan masyarakat tertentu tidak dapat mengatasinya secara individual. Kegelisahan ini kemudian memunculkan ide dan gagasan dari masyarakat yang merasa butuh untuk menyelenggarakan

jaminan sosial. Alhasil, munculah inisiatif-inisiatif dan gerakan masyarakat yang mengedepankan pencarian solusi atas masalah dengan cara optimalisasi potensi yang masyarakat miliki secara kolektif. Kesadaran kolektif dalam menjadi kekuatan dalam menjalankan kegiatan jaminan sosial di masyarakat. Jimpitan ronda merupakan nama jaminan sosial yang dibangun di RW 01 Kocoran Kalurahan Catur Tunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta yang juga sebagai fokus dalam penelitian ini.

Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian pada masyarakat RW 01 Dusun Kocoran, diawali ketika peneliti melihat keberadaan kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin di lingkungan tersebut yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara utuh namun pada kenyataannya mereka, para masyarakat dapat terus berjuang melewati berbagai masa sulit dalam hidupnya. Kemudian, peneliti juga menemukan fakta bahwa kekuatan kelompok berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut, terlebih pada masa krisis kehidupan mereka seperti saat mengalami sakit, terpapar Covid-19, sedang masa isolasi mandiri, atau ketika ada anggota keluarga yang meninggal baik karena Covid-19 atau faktor lain. Kekuatan kelompok tersebut secara fisik berwujud jaminan sosial Jimpitan Ronda. Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Lengwiler (2015), jaminan sosial muncul untuk menjawab permasalahan yang masyarakat hadapi, dengan kesadaran bersama membangun sistem yang dapat mengatasi permasalahan secara bersama dengan tujuan dan latar belakang masalah yang sama.

Secara non fisik, kekuatan kelompok tersebut berupa modal sosial. Abdullah, S (2013) menjelaskan bahwa kekuatan modal sosial dapat menjadi pengikat, perekat, penyambung, menjembatani, pengikat, koneksi dan jaringan. Kekuatan ini menjadi kekuatan utama dalam membangun kerja sama sehingga melalui kegiatan modal sosial ini keinginan dan harapan individu dapat tercapai secara efektif dan efisien secara komunal.

Peneliti menilai, besarnya kekuatan modal sosial yang dimiliki masyarakat ini perlu mendapat perhatian tersendiri dalam upaya penanganan kemiskinan masyarakat kedepannya. Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 yang menyebabkan

kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cenderung meningkat. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021 angka kemiskinan di DIY adalah sebesar 12,80. Jika dilihat secara mendetail, kemiskinan di perkotaan meningkat menjadi 12,23 dari angka 11,53 pada rilis BPS di bulan Maret 2020 dan 12,17 pada rilis BPS September 2020.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mempelajari lebih lanjut tentang jaminan sosial yang berlaku sebagai kearifan lokal masyarakat setempat. Obyek yang peneliti pilih adalah kegiatan jaminan sosial Jimpitan Ronda yang masih eksis dalam skala Rukun Warga (RW) 01 Dukuh Kocoran, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah ini memiliki latar belakang demografis desa-kota yang masyarakatnya sudah multikultur karena letak geografisnya dekat dengan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Namun, keadaan demografis yang multikultur tersebut tidak menghilangkan adat istiadat dan tradisi gotong royong yang sudah melekat pada masyarakat setempat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Jaminan Sosial

Jaminan sosial pada awalnya merupakan sebuah perlindungan dari negara untuk warga negara dalam menangani resiko yang tidak terduga. Hal ini diharapkan menjadi penjamin kehidupan warga negara terutama dalam kesulitan sosial dan ekonomi masyarakat agar dapat lebih tenang dalam menjalani kehidupannya. Jaminan sosial yang sudah diberikan negara sampai saat ini masih terbatas pada jaminan sosial kesehatan BPJS dan KIS bagi masyarakat yang tidak mampu melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional. Hal itu bukan berarti negara sebagai penyelenggara tunggal dalam kegiatan jaminan sosial. Berdasarkan teori yang dituliskan Lengwiler (2015) masyarakat dapat membuat jaminan sosial secara kolektif dengan tujuan dan fungsi masing-masing sesuai kebutuhan dan kesulitan masing-masing masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Jaminan sosial dapat dijadikan investasi sosial yang dapat memberikan benefit jangka panjang dengan pilar utama yang ditekankan redistribusi

pendapatan dan juga solidaritas sosial (Suharto, 2004), melalui teori ini dapat disimpulkan bahwa solidaritas muncul dengan adanya jaminan sosial yang berdampak jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pendapat Habibullah (2008) jaminan sosial merupakan mekanisme yang diciptakan masyarakat untuk saling melindungi diantara masyarakat baik masyarakat sebagai penerima maupun pemberi manfaat. Pada kegiatan jaminan sosial juga terjadi sebuah mekanisme saling memberikan perlindungan setiap anggota masyarakat baik yang memberikan ataupun menerima yang hal tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupan bersama yang berkelanjutan (Habibullah, 2008).

Fungsi utama yang mendasar dalam pembuatan jaminan sosial pada masyarakat adalah menolong, membantu dan memberikan tumpuan dalam kehidupan sosial sebagai bentuk dari tindakan sosial (Sumarto Nugroho, 1997). Jaminan sosial pada hakikatnya diberikan oleh negara namun bukan tidak mungkin jaminan sosial juga dapat bersumber dari masyarakat itu sendiri. Sistem jaminan sosial yang berasal dari masyarakat pada hakikatnya berasal dari kebutuhan akan hidup yang tidak dapat disamakan setiap anggota masyarakat dalam lingkup negara akan tetapi jaminan sosial dapat membantu kebutuhan hidup yang sifatnya dapat disamakan untuk menjawab kebutuhan pada masing-masing masyarakat yang menjalankannya (Ditch, 1999).

Strategi dan pendekatan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh negara seringkali bersifat terstruktur, formal dan cenderung mengabaikan nilai-nilai yang diyakini dalam sebuah masyarakat. Pendekatannya cenderung mengabaikan sistem yang sudah ada dalam masyarakat. Jaminan sosial yang diciptakan oleh negara hanya sedikit melibatkan masyarakat hal ini yang terkadang mengikis rasa kepercayaan atas jaminan sosial yang diciptakan oleh negara (Suparjan, 2006). Kondisi ini yang kemudian memberikan gerakan dalam masyarakat dalam membuat perlindungan yang diinisiasi oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Sistem jaminan yang ada dengan semangat lokalitas berdasarkan semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi hal yang khas dalam jaminan sosial yang diinisiasi oleh

masyarakat. Hal inilah yang kemudian disebut dengan kearifan lokal.

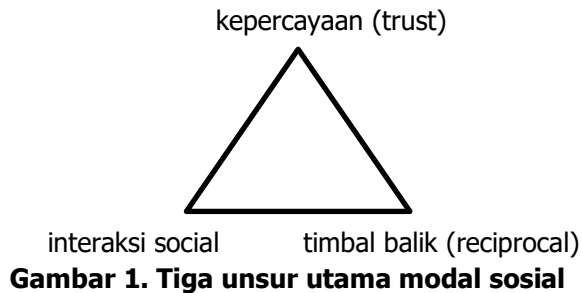
Nurhadi (2006) menyatakan bahwa sistem jaminan sosial yang banyak berkembang di Indonesia adalah berbentuk community based organization yakni jaminan sosial yang berdasarkan bantuan yang berasal dari antar anggota dari satu komunitas atau masyarakat yang sama. Jaminan sosial yang terlembagakan berasal dari kepedulian dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat (Sutoro & Krisdyatmiko, 2006). Bahkan jaminan sosial yang lebih dipahami oleh masyarakat adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melindungi masyarakat yang lemah, rentan dan miskin yang dianggap hidupnya di bawah standar kehidupan agar dapat memicu masyarakat yang lemah agar lebih mampu bergerak dan bertumbuh menuju peningkatan kesejahteraan dalam hidupnya (Saefudin, 2003).

Modal Sosial

Modal sosial merupakan kerangka teoritis yang dianggap dapat menjadi paradigma dalam pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Modal sosial juga dapat memberikan paradigma pembangunan yang lebih humanis dengan mengedepankan bottom-up daripada top down dalam paradigma pembangunannya. Modal sosial termasuk dalam bab pembangunan yang berkelanjutan karena pendekatan yang mengintegrasikan tiga dimensi kehidupan yakni dimensi ekonomis, dimensi sosial dan dimensi lingkungan. Modal sosial dalam pembangunan berperan penting pada dimensi politik karena mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan aksesibilitas dan mendukung kebebasan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Fathy, 2019).

Berdasarkan definisinya modal sosial diartikan sebagai nilai dan norma yang dibangun antar anggota masyarakat yang dimungkinkan memunculkan kerjasama diantara masyarakat (Fukuyama, 2002). Konsep utama munculnya modal sosial adalah anggota masyarakat tidak dapat mengatasi masalah secara individual, para anggotanya perlu kerjasama dan kebersamaan yang baik antar anggota masyarakat yang saling

berkaitan untuk mengatasi masalah bersama (Syahra, 2003). Modal sosial banyak bersinggungan dengan ikatan sosial asset yang menjadi pegangan utama adalah kerjasama yang kuat demi mencapai tujuan bersama (Field, 2010). Terdapat tiga unsur utama dalam modal sosial yakni kepercayaan (trust), interaksi sosial dan timbal balik (reciprocal).



Gambar 1. Tiga unsur utama modal sosial

Menurut Fukuyama (2002) kepercayaan (trust) merupakan nilai dan norma utama yang dipegang oleh para anggota masyarakat. Kesadaran menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan individu. Sikap saling percaya ini akan meningkatkan rasa kebersamaan sehingga para anggotanya cenderung ikut untuk menegakan aturan yang telah disepakati bersama. Interaksi sosial dalam modal sosial akan semakin mengikat dan berdampak positif diantara anggotanya dan timbal balik (reciprocal) merupakan alat koordinasi agar dalam menjalankan upaya koordinasi dan kerjasama semakin lancar dan saling menguntungkan guna memecahkan masalah bersama (Fathy, 2019).

C. METODE PENELITIAN

Sejalan dengan fokus permasalahan dan tujuan penelitian ini maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, disajikan dengan cara deskriptif. Penggunaan kualitatif deskriptif dipilih dengan pertimbangan data di lapangan yang didapatkan di lapangan dalam bentuk fakta yang dianalisis dengan mendalam sehingga akan mendapatkan makna. Penelitian ini mendorong untuk mendapatkan data yang didapatkan dengan cara peneliti terlibat langsung di lapangan.

Penelitian kualitatif pada dasarnya bertujuan untuk memahami seseorang sebagai subjek penelitian secara mendalam dan menemukan makna dalam kegiatannya atau kehidupannya. Berdasarkan

pendapat dari Richie menyatakan bahwa untuk menginterpretasikan dunia sosial maka perlu meyakinkan tentang konsep, persepsi, perilaku dan persolan dari kegiatan manusia yang ditelitinya (Moleong, 2007).

Obyek yang peneliti pilih adalah kegiatan jaminan sosial jimpitan ronda yang berjalan dalam skala Rukun Warga (RW) 01, Dukuh Kocoran, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta. Objek ini dipilih melalui pertimbangan peneliti karena secara letak geografis masuk dalam kawasan perkotaan namun secara eksis masih memegang modal sosial yang kuat meskipun keberagaman masyarakatnya yang sudah multikultur karena kedatangan banyak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan di UGM, UNY, Universitas Sanada Dharma begitu juga para pendatang yang juga banyak berdatangan dari banyak wilayah di luar DIY.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan metode observasi dengan mengamati secara langsung kegiatan jimpitan ronda dan wawancara dengan informan yang terlibat dalam proses jaminan sosial jimpitan ronda yang berlangsung di Rukun Warga (RW) 01, Dukuh Kocoran, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta.

Teknik analisisnya menggunakan interpretasi, yakni proses menggali makna di balik fakta yang ada di lapangan (Moleong, 2013). Berdasarkan Creswell dalam melakukan analisis data adalah usaha untuk menjelaskan, memaknai, diinterpretasikaikan dan direfleksikan dalam sebuah temuan penelitian (Kusumastuti, A dan M. Khoiron, A, 2019). Data yang digunakan peneliti menggunakan kumpulan data empiris secara observasi, wawancara, interaksi dengan informan yang terlibat dan visual, serta pengamatan keseharian dalam kegiatan Jimpitan Ronda. Peneliti menjadi instrument langsung dalam mengumpulkan data pada objek penelitian. Hasil temuan di lapangan kemudian menjadi bahan peneliti untuk mendapatkan nilai yang dijelaskan dalam bentuk diskriptif yang akan disajikan dalam hasil penyajian temuan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari data demografi dan monografi Dukuh Kocoran, Kalurahan Karangbendo spesifiknya pada masyarakat RW 01 yang terlibat dalam kegiatan jimpitan ronda termasuk dalam kategori masyarakat pada keadaan ekonomi kelas menengah ke bawah. Kondisi ini dikarenakan masyarakat asli Kalurahan Karangbendo memaksimalkan penghasilan dari para pendatang yang banyak datang ke sekitaran Karangbendo untuk menimba ilmu. Namun beberapa masyarakat lain ada yang membuat kegiatan wirausaha seperti toko dan warung sembako meskipun yang membuka wirausaha seperti ini tidaklah banyak dan jarang. Kondisi lain masyarakat yang berada di RT 02 berada dan menempati tanah kas desa untuk membangun rumahnya, mereka membayar 80.000/m² per tahun kepada pihak kalurahan atas penempatan rumah tempat tinggal yang ditempatinya. Pajak ini tidak menjadi penghapus pada pajak PBB yang juga harus dibayarkan setiap tahunnya.

Sistem Jaminan Sosial Jimpitan Ronda

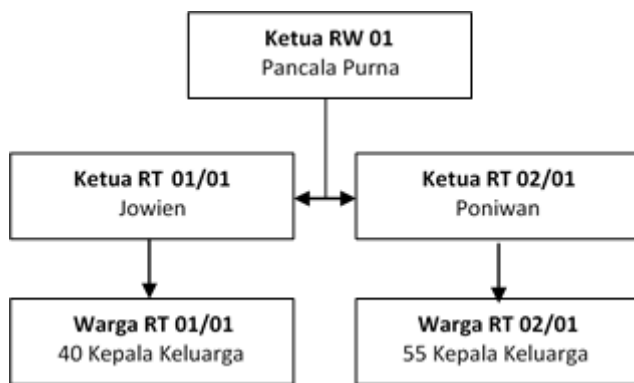
Sistem jaminan sosial yang masyarakat lokal lebih akrab menyebutnya dengan Jimpitan Ronda, merupakan kegiatan yang sudah dilakukan secara turun temurun sejak lama di RW 01 Kelurahan Caturtunggal. Secara periode⁴, tidak ada informan yang dapat menjawab secara pasti mulai dari kapan kegiatan jimpitan ronda ini diberlakukan. Akan tetapi para informan hanya mengatakan kegiatan ini sudah dilaksanakan secara turun temurun di RW 01 yang masih eksis hingga sekarang. Berdasarkan informan Pancala Purna (56 tahun) kegiatan ini dilakukan dalam skala lingkup Rukun Warga (RW). Jimpitan dilakukan atas dasar kesadaran dan kebutuhan warga serta secara terbuka dipertanggungjawabkan dalam kegiatan RT dan RW setiap bulannya. Karena para merasakan banyak manfaatnya, kegiatan ini terus berjalan dan eksis hingga sekarang.



Gambar 2. Wadah Uang Jimpitan Setiap Rumah Warga RW 01 Kalurahan Catur Tunggal

Sistem yang dilakukan adalah setiap warga menyediakan uang minimal Rp. 500,- dalam kotak yang sudah disediakan yang ditaruh dalam depan rumah warga masing-masing, kemudian setiap malam ada petugas ronda yang mengambil uang jimpitan tersebut. Setiap petugas ronda jumlahnya berbeda. RT 01 terdapat 3-4 orang dalam setiap malam dan RT 02 terdapat 5-7 orang petugas ronda tiap malamnya. Perbedaan ini dikarenakan jumlah warga masing-masing RT berbeda dan cenderung lebih banyak RT 02. Berdasarkan informasi dari Pancala Purna (56) meskipun batas minimalnya Rp. 500,- namun warga ada juga yang menyediakan lebih dari Rp. 500,- atau lebih dari minimum batas iuran jimpitan. Namun ada juga masyarakat yang menengah yang tidak dapat mengikuti kegiatan ronda dan jimpitan mereka dapat membayar iuran pembangunan sebanyak minimal Rp. 50.000/bulan, dibayarkan ketika anggota tersebut mengikuti kegiatan rutin pertemuan ke-RT.an.

Anggota yang mengikuti kegiatan jimpitan ronda ini ada 95 rumah tangga yang terbagi dalam dua rumah tangga (RT) yakni RT 01/01 sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) dan RT 02/01 sebanyak 55 KK sebagaimana tersaji pada gambar 3.



Gambar 3. Struktur Kelembagaan Jimpitan Ronda, data olah peneliti 2021

Sistem jaminan sosial yang diperoleh setiap malamnya akan dikumpulkan oleh masing-masing Bendahara RT dan dalam kegiatan rutin RT dan RW akan disampaikan bersama-sama sembari dilakukan musyawarah dalam penggunaan kas tersebut. Secara perolehan jika dihitung secara matematis setiap keluarga minimal mengeluarkan Rp. 500,- dalam sehari, maka dalam satu bulan mereka mengeluarkan sebesar Rp. 15.000,- jika pada RT 01 terdapat 40 KK maka perolehannya Rp. 600.000,-/bulan sedangkan pada RT 2 terdapat 55 KK maka perolehannya sebanyak Rp. 825.000,-/bulan dan jika dijumlahkan dalam skala RW sebanyak Rp. 1.425.000,- dan jika dalam waktu 1 tahun maka akan terkumpul uang kas sebesar Rp. 17.100.000,-. Jika dilihat jumlahnya tentu dana tersebut tidak cukup besar jika dalam lingkup RW, namun secara nilai konsistensi dan kebersamaan masyarakat lebih bernilai dari nominal uang yang dihasilkan.

Pak RW 01, Pancala Purna menyatakan bahwa tidak ada konsekuensi jika masyarakat tidak turut serta dalam kegiatan jimpitan ronda, namun dalam kegiatan-kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat mau tidak mau secara disengaja ataupun tidak sengaja harus aktif dalam kegiatan tersebut, sehingga sangsi sosial tidak diciptakan namun secara otomatis akan tercipta secara sendiri. Masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan jimpitan tentu akan tertinggal dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sosial dan pembangunan dari kegiatan jimpitan ronda.

Kegiatan jaminan sosial ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ahli Nugroho dalam Sutoro & Krisdyatmiko (2006) yang menyatakan bahwa perputaran dana jaminan sosial berasal dari sesama anggota. Jaminan sosial berdiri atas dasar

kepedulian atas rasa yang sama yang sedang dialami masyarakat terutama dalam hal ini adalah masalah ekonomi dan sosial. Kegiatan sosial dan pembangunan yang dirasa lebih mudah teratasi dengan kegiatan jimpitan ronda yang dilakukan secara konsisten oleh masyarakat RW 01.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kegiatan jaminan sosial masih dikuasai oleh para laki-laki sebagai aktor dalam kegiatan jaminan sosial, untuk kegiatan yang dilakukan oleh para Ibu-Ibu ada forum tertentu seperti kegiatan arisan, pengajian dan PKK dalam lingkup RW. Kegiatan-kegiatan tersebut juga memiliki dana sosial sehingga dalam kegiatan jimpitan sosial peran perempuan kurang mendapatkan tempat. Meskipun demikian kegiatan Jimpitan Ronda ini mengadopsi kegiatan gotong royong. Gotong royong yang termasuk dalam inisiatif warga. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat nilai positif yang terkandung diantaranya berdasarkan Koetjaraningrat (1987) adalah kebersamaan. Gotong royong merupakan cerminan dari sikap kebersamaan yang tumbuh dalam suatu lingkungan masyarakat. Bersamaan dengan gotong royong maka masyarakat bersamasama saling bantu membantu orang lain dan untuk dirinya sendiri membangun kegiatan sosial dan pembangunan untuk dapat dimanfaatkan secara bersama.

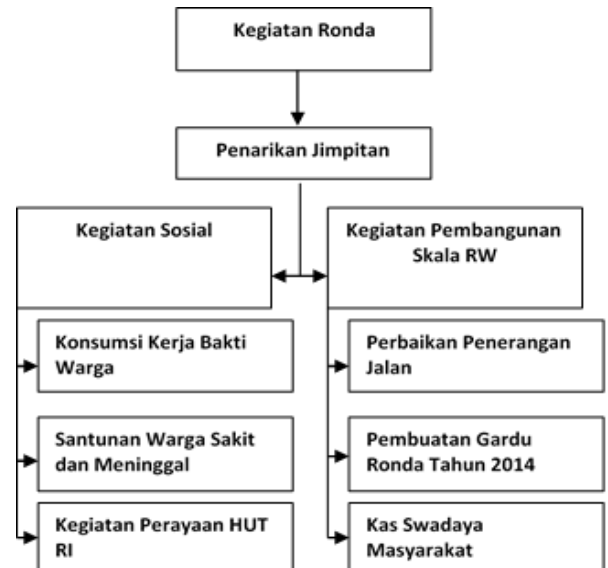
Fungsi kedua adalah sebagai alat pemersatu. Kebersamaan dari hasil gotong royong melahirkan persatuan diantara masyarakat, persatuan yang ada semakin lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan bersama yang ada dalam masyarakat. Fungsi ketiga adalah rela berkorban. Kegiatan jimpitan ronda yang bersifat gotong royong mengajarkan kepada masyarakat untuk saling rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berupa waktu, pemikiran, tenaga dan uang. Semua pengorbanan tersebut demi tujuan bersama, masyarakat pelaku jimpitan ronda dapat mengesampingkan tujuan pribadi untuk tujuan bersama.

Fungsi keempat adalah tolong menolong. Kegiatan gotong royong membuat masyarakat saling terpacu untuk saling menolong masyarakat satu sama lain. Sekecil apapun dalam rangka untuk membantu kepentingan masyarakat lain dalam rangka memberikan pertolongan dan manfaat bagi kehidupan orang lain. Partisipasi dan kehadiran aktif dalam tolong menolong masyarakat menjadi

nilai positif dalam keterlibatan dalam memberikan nilai positif dari setiap permasalahan, objek dan kebutuhan di sekelilingnya. Partisipasi aktif tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tenaga, mental spiritual, fisik, ketrampilan, sumbangan pemikiran, nasihat yang konstruktif dan membangun, hingga dalam bentuk materi dan keuangan hingga yang ada mengambil peran dalam bentuk doa kepada Sang Pencipta. Namun pengambilan peran ini sebagai bentuk dari persetujuan yang diaktualisasikan dalam bentuk gerakan baik besar maupun kecil untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan kecil berupa jimpitan ronda.

Pemanfaatan Dana Jaminan Sosial Jimpitan Ronda Sistem jaminan sosial yang diperoleh akan digunakan untuk mengatasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip demokrasi yakni dari masyarakat dan akan dinikmati dan kembali kepada kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan hasil dari jaminan sosial berupa jimpitan ronda ini digunakan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua yakni kegiatan sosial dan kegiatan pembangunan dalam masyarakat.

Berdasarkan pernyataan dari Julika (46) sebagai warga, dirinya sangat terbantu dengan kegiatan jimpitan ronda dengan adanya kas jimpitan ini. Salah satu manfaat yang dirasakan adalah ketika ada warga yang sakit atau meninggal, maka tidak perlu dilakukan pengumpulan sumbangan lagi kepada setiap warga. Berdasarkan informasi dari Pancala Purna (56) setiap warga RW 01 yang mengalami sakit akan diberikan uang santunan sebesar Rp. 150.000,- dan jika ada anggota warga yang meninggal maka akan diberikan uang santunan sebesar Rp. 250.000,- dari kas jimpitan ronda. Uang jimpitan juga digunakan pada momentum kegiatan sosial seperti kerja bakti warga rutin setiap bulan, serta kegiatan perayaan HUT RI sebagaimana tersaji pada gambar 4.



Gambar 4. Pemanfaatan Dana Jaminan Sosial, Olah Data Peneliti 2021

Kegiatan pembangunan juga tidak lepas dari pemanfaatan dana dari kas jimpitan ronda. Salah satu manfaatnya adalah untuk pemeliharaan penerangan lampu jalan dan untuk pembangunan pos ronda yang sudah dilakukan pada tahun 2014. Selain itu, kas ini juga digunakan untuk alokasi pembangunan skala RW sebagai dana swadaya untuk mendukung proses pembangunan yang sudah dialokasikan dengan dana dari kelurahan.



Gambar 4. Pemanfaatan Dana Jaminan Sosial Jimpitan Ronda

Pancala Purna (56) menyatakan tidak setiap bulan mengeluarkan dana kas untuk kegiatan sosial dan kegiatan pembangunan. Dengan adanya pandemi Covid-19 dana kas jimpitan ronda yang dimiliki juga dapat digunakan untuk kepentingan penanganan Covid-19 skala RW seperti pembangunan portal pengaman, bilik disinfektan, dan penyemprotan disinfektan. Meskipun dalam realitanya terdapat anggota satuan tugas (Satgas) tersendiri dalam mengatasinya, namun uang kas jimpitan ronda ini juga salah satunya mendukung program Satgas Covid-19 terhitung selama tahun

2020-2021. Saat pandemi Covid-19, jika terdapat warga yang melakukan isolasi mandiri para Ketua RT menginformasikan ke Ketua RW agar dapat difasilitasi bantuan kebutuhan pangan yang dikelola oleh warga dalam Satgas Covid-19. Bantuan yang diberikan nantinya berupa kebutuhan pokok dan lauk pauk yang sudah dikoordinir secara baik oleh Tim Satgas Covid-19.

Hal ini di validasi oleh Tukiyamto (70) yang menyatakan uang kas jimpitan ronda dapat digunakan multifungsi, meskipun pada awalnya digunakan untuk kegiatan sosial dan pembangunan warga RW 01 namun dapat juga digunakan sesuai dengan kebutuhan warga. Dijelaskan juga bahwa tidak ada warga yang merasa keberatan dengan hal itu, karena yang penting adalah kas jimpitan digunakan untuk kemasalahatan bersama warga RW 01, termasuk ketika ada pandemi Covid-19 seperti ketika terdapat warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa sikap percaya dan pasrah pada penggunaan kas hasil jimpitan tersebut didukung oleh kondisi bahwa kegiatan Jimpitan Ronda ini dapat dipertanggungjawabkan dan diinformasikan melalui forum RT dan forum RW yang dilakukan setiap bulan. Selain itu terdapat dokumentasi penggunaan uang dari jimpitan sosial tersebut.

Tabel 1. Penggunaan Jimpitan Ronda Tahun 2021

No	Penggunaan	Banyak	Jumlah
1	Santunan Orang Meninggal;	2	500.000
2	Santunan Orang Sakit;	12	1.800.000
3	Isolasi Masyarakat terkena Covid-19;	10	3.000.000
4	Perbaikan Lampu Jalan;	-	1.000.000
5	Swadaya Pembangunan Talud.	-	10.000.000
Total			16.300.000

Sumber: Arsip RW 01, 2021.

Nilai yang Dibangun Masyarakat dari Kegiatan Jimpitan Ronda

Nilai dasar dari kegiatan jimpitan ronda adalah trust (kepercayaan) yang dibangun dari warga masyarakat anggota jimpitan ronda. Pancala Purna (56) memberikan informasi bahwa kegiatan ronda yang sudah berjalan rutin selain untuk memastikan keamanan lingkungan RW 01 juga sekaligus untuk mengambil jimpitan yang sudah

disediakan di depan rumah warga masing-masing. Hal ini berdampak luas dalam pemanfaatannya diantaranya untuk kegiatan sosial dan pembangunan yang sudah dirasakan positif oleh masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut Julika (46) mengatakan sebagai warga RT 01 merasa uang yang tidak seberapa dapat dimanfaatkan dalam kebutuhan masyarakat secara bersama.

Nilai yang kedua adalah rasa aman dan saling menjaga warga sekitar. Niatan awal mula munculnya kegiatan ini melalui kegiatan ronda, karena pada awalnya masyarakat menginginkan lingkungannya aman terkendali. Sejalan dengan pendapat Poniwan (47), kegiatan jimpitan ini sebagai suplemen terhadap kegiatan ronda juga memberikan perlindungan sosial ketika masyarakat sedang dalam kesulitan, sehingga muncul rasa aman dan tumbuh rasa perasaudarannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Habibullah (2008) bahwa penyelenggaraan jaminan sosial menjadi sebuah mekanisme yang saling melindungi antar masyarakat sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Cara membangun trust bukan hanya secara alamiah mengalir begitu saja namun nilai itu perlu dirawat dengan adanya transparansi dana. Hal ini menjadi nilai selanjutnya yang dibangun antar masyarakat. Setiap bulan sekali pada awal bulan penggunaan dananya dijelaskan dalam kegiatan RT pada masing-masing RT, dan pada akhir bulan kegiatan dalam lingkup RW dijelaskan oleh RW dalam kegiatan kumpulan rutin RW yang biasanya dilakukan dalam akhir bulan di balai RW.

Ketua RW, Pancala Purna (56) selalu menekankan pentingnya menjaga kas RW yang dilakukan oleh masing-masing RT untuk selalu hidup, meskipun dalam pelaksanaannya ada masyarakat yang belum terbantu secara langsung setidaknya dirinya tidak mengalami penderitaan seperti orang yang sedang mengalami kesusahan, mental kaya dan menjauhkan kurang bersyukur sudah seharusnya ditegakan oleh seluruh warga. Hal ini juga dirasakan oleh Sumirah (59) merasa dirinya lebih sehat dan bahagia dengan mengisi kas jimpitan ronda meski dirinya belum pernah merasakan hasilnya secara langsung. Kegiatan jaminan sosial ini sama dengan fungsi utama yang mendasar dalam pembuatan jaminan sosial pada masyarakat

yang dijelaskan oleh Nugroho (1997) pada prinsipnya adalah menolong, membantu dan memberikan tumpuan dalam kehidupan sosial sebagai bentuk dari tindakan sosial. Sistem jaminan sosial yang berasal dari masyarakat pada hakikatnya berasal dari kebutuhan akan hidup yang tidak dapat disamakan namun jaminan sosial dapat membantu kebutuhan hidup yang sifatnya dapat disamakan untuk menjawab kebutuhan pada masing-masing masyarakat yang menjalankannya (Ditch, 1999).

Jowien (41) selaku ketua RT juga menuturkan nilai yang dibangun adalah konsistensi meskipun kecil. Pada hakikatnya uang Rp. 500,- tidak ada harganya namun ketika konsisten dan dilakukan secara bersama maka akan bernilai besar, selain itu saling mengerti diantara masyarakat dengan kesadaran bergotong royong dan rasa memiliki hasilnya juga menjadi nilai tersendiri yang dibangun dalam mendirikan jimpitan ronda yang sudah dilakukan sejauh ini. Jika dikaitkan dengan teori jimpitan ronda ini para masyarakatnya menjadi kelompok yang tergolong dalam paguyuban. Masyarakat secara sadar membentuk kelompok yang saling menyatukan pendapat diantara mereka demi kepentingan bersama, Soekanto (1990) menyatakan bahwa paguyuban ini muncul secara sukarela yang memunculkan kekuatan batin diantara masyarakat yang bersifat alami yang dalam hal ini keberlangsungannya kekal. Melalui pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya keterikatan batin antara masyarakat yang muncul alami dengan menghasilkan kegiatan secara nyata. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui jimpitan ronda yang masih eksis hingga sekarang yang dilandasi oleh kepercayaan yang kuat diantara masyarakatnya..

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Telah terselenggara jaminan sosial yang terlembaga dengan baik dan ditopang kuat oleh modal sosial di lingkungan masyarakat RW 01 Kalurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta.
2. Dalam pemanfaatannya, jaminan yang biasa disebut Jimpitan Ronda ini dapat mereka

andalkan untuk mendukung pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah dan membantu warga masyarakat yang yang membutuhkan. Lebih detail, manfaat jimpitan ini khususnya paling dirasakan dalam hal pemeliharaan sarana prasarana umum, dan bantuan kesejahteraan warga.

3. Penyelenggaraan jimpitan ini melibatkan berbagai modal sosial, termasuk semangat gotong royong, saling percaya, interaksi, keikhlasan, dan tolong menolong yang tumbuh atas kesadaran masyarakat dan dapat dipertahankan hingga sekarang. Hal ini menjadi modal yang baik dalam menangani kemiskinan yang naik akibat pandemi Covid-19 di D.I. Yogyakarta.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan bagi pembangunan di DIY yaitu:

1. Pemerintah daerah perlu mengetahui berbagai kegiatan komunal berdasarkan modal sosial yang diterapkan masyarakat yang berpotensi membantu pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan,
2. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan modal sosial ataupun jaminan sosial sebagai program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari masyarakat (bottom-up),
3. Pemerintah perlu memberikan dukungan nyata bagi kegiatan tersebut dalam proses perencanaan dan pembangunan supaya kegiatan tersebut bisa terselenggara secara sustain
4. Berbagai modal sosial yang ada dan terus dikelola dalam kehidupan masyarakat DIY telah menjadi modal utama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat secara mandiri. Oleh karena itu diperlukan dukungan pemerintah dalam melestarikan modal sosial tersebut dan menindaklanjutinya dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. 2013. Potensi dan Kekuatan Modal Sosial dalam Suatu Komunitas. Dalam Jurnal Socius, Vol. 12. Pp. 1-8.
- BPS. 2021. Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: BPS.
- Ditch, John. 1999. Introduction to Social Security: Policies, Benefits, and Poverty. London, UK: Routledge.
- Ermawan T, D. 2017. Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia, dalam Jurnal Kajian Lemhanas RI Edisi 32 Desember 2017.
- Fathy, R. 2019. Modal Sosial konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 6, No. 1 Januari 2019
- Field, J. 2010. Modal Sosial. Terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Fukuyama, J. 2002. Trust Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. Yogyakarta PT Qalam.
- Habibullah. 2008. Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal: Studi Kasus Perkumpulan Kematian Al-Khoiro Di Desa Ulak Kerbau Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol 13. No 03. Pp. 73-82.
- J. Moleong, Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jhabvala, Renana. 1998. Social Security for Unorganised Sector. Journal of Economic and Political Weekly. Vol 33. No 22. Pp. 7-11.
- Lengwiler, Martin. 2015. Culture Meanings of Social Security in Postwar Europe. Journal of Social Science History. Vol 39. No 1. Pp. 85-106.
- Kusumastuti, A dkk. 2019. Metode Penelitian Kualitatif., Semarang: Penerbit LPPSP.
- Koetjaningrat. 1987. Sejarah Teori Antropologi. Jakarta: UI Press.
- Moore, Kathryn. L. 2012. Social Security in an Era Retrenchment: What Would Happen if the Social Security Trust Funds Were Exhausted?. ABA Journal of Labour and Employment Law. Vol 28. No 01. Pp. 43-57.
- Muin, I. 2006. Sosiologi. Jakarta: PT Erlangga.
- Nurhadi. 2006. Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan. Yogyakarta: Media Wacana.
- Saefuddin, Asep. 2003. Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Mode Sistem Keterjaminan Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumarnonugroho, T. 1987. Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya.
- Suharto, Edi. 2004. Jaminan Sosial: Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial Konsepsi dan Strategi. Jakarta: Balatbangsos.
- Suparjan. 2006. Jaminan Sosial Berbasis Komunitas: Respon Atas kegagalan Negara dalam Penyediaan Jaminan Kesejahteraan. Diakses melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10952/8193>. Tanggal 02 Oktober 2021.
- Sutoro, Eko & Krisdyatmiko. 2006. Kaya Proyek Miskin Kebijakan. Yogyakarta: IRE Press.
- Syakra, R. 2003. Eksklusi Sosial: Konsep dan Aplikasinya. Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 1, Januari 2003.
- Thopson, Lawrence. H. 1983. The Social Security Reform Debate. Journal of Economic Literature. Vol 21. No 04. Pp. 1425-1467.
- Vega, Alma. 2015. The Impact of Social Security on Return Immigration Among Latin American Elderly in The US. Journal of Population Research and Policy Review. Vol 34. No 03. Pp. 307-330.

Wawancara:

- Wawancara dengan Pancala Purna tentang Sistem Jimpitan Ronda, 30 Oktober 2021
- Wawancara dengan Jowien tentang Sistem Jimpitan Ronda di RT 01, 30 Oktober 2021
- Wawancara dengan Tuki Yamto tentang Tanggapan Warga RT 01 terhadap Jimpitan, Ronda, 27 Oktober 2021
- Wawancara dengan Sumirah tentang Kepuasan Warga terhadap Jimpitan Ronda, 01, 28 Oktober 2021
- Wawancara dengan Poniwan tentang Sistem Jimpitan Ronda RW 02, 30 Oktober 2021
- Wawancara dengan Julika tentang Kepuasan Warga RW 02 terhadap Jimpitan Ronda, 30 Oktober 2021.

Observasi:

- Observasi pada kegiatan Jimpitan Ronda di tempat Bapak Tuki Yamto, 01 Oktober 2021

Pengaruh Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di DIY

Dwi Sucihartini

dsuci.hartini@gmail.com

Perencana Ahli Muda, Bappeda DIY

Abstrak

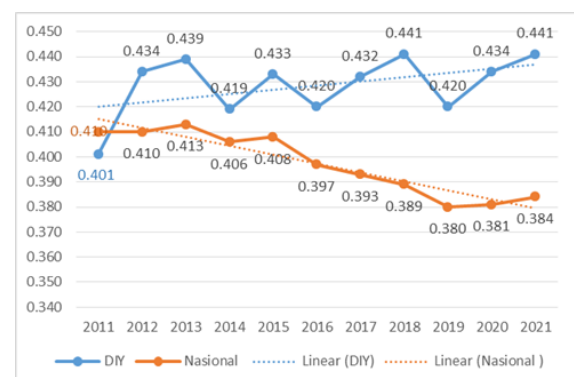
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, khususnya Pertanian, Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Penyediaan Akomodasi Makan Minum terhadap ketimpangan pendapatan di DIY. Perekonomian DIY telah mengalami transformasi struktural dimana pada satu sisi berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan sisi lain berdampak negatif terhadap kesenjangan antar sektor. Hal ini menjadi dasar dugaan bahwa sektor-sektor ekonomi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap ketimpangan pendapatan. Untuk mengetahui lebih jauh terkait ketimpangan pendapatan DIY, dalam penelitian mengakomodir beberapa indikator lain sebagai variabel bebas (PDRB per Kapita, IPM, TPT, dan upah minimum). Dengan menggunakan metode regresi data panel 5 kabupaten/kota di DIY Tahun 2011-2019, hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum, PDRB per Kapita, IPM, dan upah minimum berpengaruh signifikan sedangkan pertumbuhan sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Konstruksi, dan TPT tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Kata kunci: ketimpangan pendapatan, pertumbuhan sektor ekonomi, regresi data panel

A. PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketimpangan pendapatan DIY diindikasikan oleh Rasio Gini menunjukkan tren yang meningkat selama sepuluh tahun terakhir (Gambar 1). Pada Tahun 2011 Rasio Gini DIY sebesar 0,401 (40,1%) meningkat sebesar 0,04 poin menjadi 0,441 (44,1%) pada Tahun 2021. Lebih lanjut, dari perkembangan selama periode 2011-2021 terlihat bahwa Rasio Gini DIY hampir selalu diatas angka Nasional bahkan pada Tahun 2020 dan 2021 tercatat sebagai Rasio Gini tertinggi se-Indonesia. Meskipun masih termasuk dalam kategori ketimpangan sedang (0,3-0,5), ketimpangan pendapatan DIY perlu mendapat perhatian karena cenderung meningkat terus-menerus dalam jangka panjang. Kecenderungan peningkatan ketimpangan pendapatan dalam

jangka panjang akan mengganggu proses pertumbuhan dan menyebabkan ketidakstabilan sosial (Raeskyesa, 2020).



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar 1. Perkembangan Rasio Gini DIY dan Nasional, 2011-2021

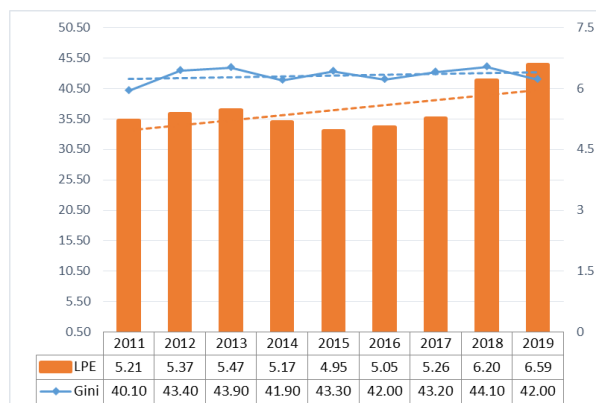
Perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terhadap masalah ketimpangan pendapatan dituangkan dalam dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun tahunan. Rasio Gini menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang ditargetkan menurun selama periode perencanaan jangka menengah 2017-2022. Namun, berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pemda, capaian Rasio Gini masih selalu diatas target yang ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang harus dipecahkan dalam pembangunan ekonomi DIY.

Tabel 1. Target dan Capaian Rasio Gini DIY

Rasio Gini	2018	2019	2020	2021	2022
Target	0.392	0.385	0.378	0.371	0.364
Capaian	0.441	0.420	0.434	0.441	-

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022; BPS Provinsi DIY, 2021

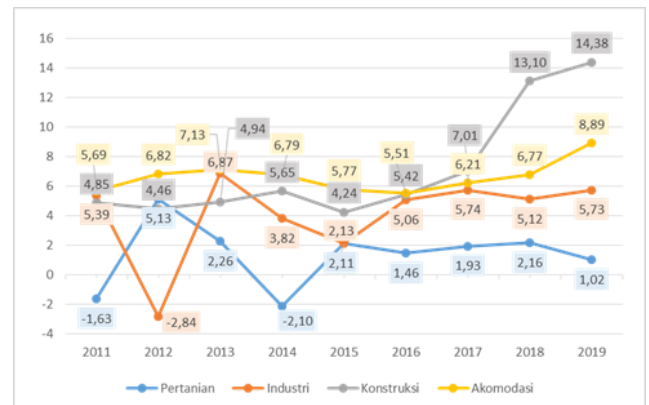
Dalam proses pembangunan ekonomi, salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan pemerataan. Menurut Todaro (1997) dampak yang paling sering ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi terhadap distribusi pendapatan adalah penurunan pendapatan penduduk miskin yang berarti tidak ada bukti efek peneteskan ke bawah (trickle down effect). Selama 2011-2019, Pertumbuhan ekonomi DIY cenderung meningkat diiringi ketimpangan pendapatan yang masih relatif tinggi (Gambar 2).



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

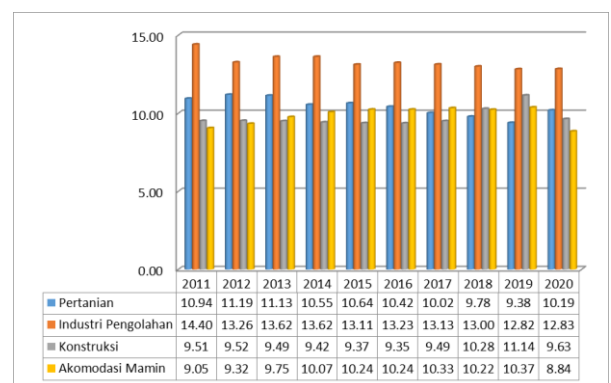
Gambar 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini DIY, 2011-2019

Perekonomian DIY telah mengalami pergeseran struktural ditandai dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi yang terlihat dari perubahan kontribusi sektoral dalam PDRB serta pertumbuhan beberapa sektor ekonomi yang lebih cepat dibandingkan sektor lainnya (Gambar 3 dan 4). Perubahan atau pergeseran struktural pada satu sisi memberikan dampak positif, antara lain meningkatkan pendapatan sedangkan disisi lain membawa dampak negatif, diantaranya adalah meningkatkan kesenjangan antar sektor (Arsyad, 2010).



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar 3. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Penyediaan Akomodasi Makan Minum di DIY, 2011-2019



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar 4. Perkembangan Empat Sektor yang Memiliki Kontribusi Terbesar dalam Pembentukan PDRB DIY, 2011-2020

Terjadinya kesenjangan antar sektor ekonomi dapat menyebabkan pengaruh pertumbuhan masing-masing sektor terhadap ketimpangan

pendapatan menjadi berbeda. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan studi lebih mendalam terkait ketimpangan pendapatan di DIY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di DIY. Selain itu, dalam penelitian ini mengakomodir beberapa indikator lain sebagai variabel bebas, seperti PDRB per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan upah minimum.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan pendapatan menunjukkan perbedaan kesejahteraan antar kelompok pendapatan penduduk (Putra dan Lisna, 2020). Kuznets menyatakan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Hubungan ini digambarkan dalam bentuk kurva U-terbalik (Todaro, 1997). Dalam Hipotesisnya, Kuznets menemukan kaitan antara ketimpangan pendapatan dengan tingkat pendapatan per kapita dimana pada tahap awal pertumbuhan, distribusi pendapatan cenderung memburuk tetapi pada tahap berikutnya akan membaik seiring meningkatnya pendapatan per kapita (Arsyad, 2010).

Selanjutnya, hubungan antara pertumbuhan sektoral dengan ketimpangan distribusi pendapatan ditunjukkan dalam proses pergeseran atau transformasi struktural. Transformasi struktural terjadi melalui proses peralihan dari ekonomi subsisten menjadi perekonomian yang lebih modern. Proses yang menandai pembangunan ekonomi ini pada satu sisi memberikan dampak positif, antara lain meningkatkan pendapatan sedangkan disisi lain membawa dampak negatif, diantaranya adalah meningkatkan kesenjangan antar sektor (Arsyad, 2010). Romli et al. (2016) mengemukakan bahwa pada periode transformasi struktural pertumbuhan beberapa sektor lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Selanjutnya, menurut Arsyad (2019) pada tahap awal proses transformasi struktural distribusi pendapatan akan memburuk karena kontribusi sektoral terpusat pada sektor modern dan pendapatan yang diperoleh dari sektor tradisional lebih rendah dan

timpang dibandingkan pendapatan di sektor modern.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah (Todaro, 1997). United Nations for Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa manusia dan kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara. IPM merupakan pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (BPS & BPPSD, 2020). Suatu daerah dianggap memiliki SDM yang handal dan memiliki peluang untuk sejahtera apabila nilai IPM-nya baik. Namun, peningkatan IPM pada suatu daerah tanpa diiringi peningkatan IPM di daerah lain akan memicu ketimpangan distribusi pendapatan (Putra & Lisna, 2020).

Lebih lanjut, hubungan antara pengangguran dan upah minimum (ketenagakerjaan) dikemukakan dalam beberapa literatur. Arsyad (2010) menyatakan bahwa salah satu mekanisme pokok untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan adalah dengan memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat miskin. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan memiliki keterkaitan erat. Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya gap pendapatan yang diterima antara kelompok kaya dan miskin. Salah satu cara ampuh mengatasi kemiskinan adalah dengan menanggulangi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan (Todaro, 1997).

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah kelompok penduduk yang merupakan bagian dari angkatan kerja, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja. Kelompok ini terdiri dari tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, atau mereka yang merasa mungkin tidak mendapatkan pekerjaan (BPS & BPPSD, 2020). Tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Kebijakan upah minimum diterapkan karena dianggap sebagai salah satu instrumen yang mampu memperbaiki distribusi pendapatan. Penerapan upah minimum berdampak pada distribusi upah melalui dua jalur, yaitu: pertama, dampak langsung, yaitu meningkatkan upah pekerja yang memiliki upah rendah atau dibawah upah minimum; kedua, dampak tidak langsung (spillover), yaitu meningkatkan upah pekerja yang pendapatannya lebih dari upah minimum (Rohman & Sastiono, 2021).

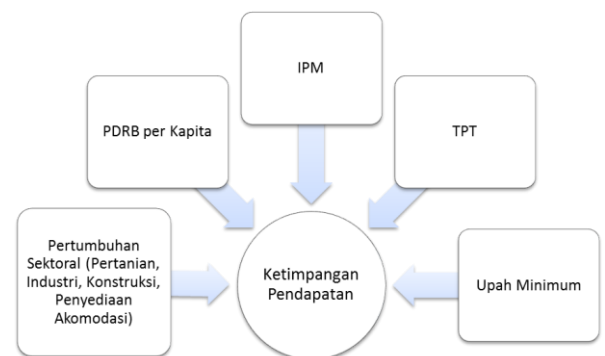
Penelitian tentang analisis pengaruh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, antara lain dilakukan oleh Raeskyesa (2020) dan Romli et al. (2016). Raeskyesa (2020) menganalisis pengaruh pertumbuhan sektoral (pertanian, manufaktur, dan jasa) terhadap ketimpangan pendapatan dengan metode regresi data panel pada 5 negara Asean, yaitu Indonesia, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina (1998-2018). Hasil studinya menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki pengaruh negatif signifikan. Selanjutnya, penelitian Romli et al. (2016) dengan menggunakan analisis regresi data panel 4 kabupaten di Pulau Madura (1998-2014) menunjukkan bahwa sektor pertanian berpengaruh negatif signifikan sedangkan sektor industri dan jasa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Beberapa penelitian terkait ketimpangan pendapatan DIY, antara lain dilakukan oleh Khoirudin & Musta'in (2020), Anggina & Artaningtyas (2017), dan Sulisty (2017). Penelitian Khoirudin & Musta'in (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, desentralisasi fiskal, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan DIY selama periode 2012-2018. Dengan menggunakan analisis data panel, studi

tersebut menemukan bahwa tingkat pengangguran dan upah minimum berpengaruh positif signifikan sedangkan pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Anggina dan Artaningtyas (2017) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan DIY dengan metode regresi data panel 5 kabupaten/kota selama periode 2007-2014. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi berpengaruh negatif signifikan dan IPM berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan DIY.

Dalam studi tentang analisis pengaruh IPM, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di DIY dengan menggunakan data panel 5 kabupaten/kota selama 2012-2016, Sulisty (2017) menemukan bahwa IPM dan PAD berpengaruh positif signifikan sedangkan UMK dan jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan tinjauan literatur tersebut diatas, kerangka pikir penelitian ini didasarkan bahwa pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, PDRB per Kapita, IPM, TPT, dan upah minimum memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.



Gambar 5. Kerangka Pikir Penelitian

C. METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada level kabupaten/kota Tahun 2011-2019 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdiri dari data Rasio Gini, pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha

(sektor), PDRB per Kapita riil, IPM, TPT, dan upah minimum. Data upah minimum yang digunakan adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Namun, untuk data upah minimum Tahun 2011 dan 2012 menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) karena UMK belum tersedia. Dalam analisis, data PDRB per Kapita dan upah minimum diubah dalam bentuk logaritma.

Pertumbuhan sektor ekonomi yang dipilih dalam analisis adalah empat sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB, yaitu sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi Makan Minum, dan Pertanian. Selain itu, pemilihan sektor tersebut didasarkan pada kontribusi sektoral menurut kabupaten/kota. Sektor Pertanian dominan di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum dominan di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Sementara itu, beberapa tahun terakhir kontribusi sektor Konstruksi mengalami peningkatan hampir di semua kabupaten di DIY.

Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan sektor Pertanian, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, dan sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum, serta IPM, TPT, PDRB per Kapita, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di DIY digunakan model regresi panel data.

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8)$$

Secara eksplisit ditulis dalam persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Gini = & \beta_0 + \beta_1 Gagro_{it} + \beta_2 Gind_{it} + \beta_3 Gkons_{it} \\ & + \beta_4 Gakom_{it} + \beta_5 IPM_{it} + \beta_6 TPT_{it} \\ & + \beta_7 \log_PDRB_{it} + \beta_8 \log_UM_{it} + e \end{aligned}$$

Keterangan:

Gini = Rasio Gini; Gagro = pertumbuhan sektor pertanian; Gind = pertumbuhan sektor Industri Pengolahan; Gkons = pertumbuhan sektor Konstruksi; Gakom = pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum; IPM; TPT; log_PDRB = PDRB per Kapita; log_UM = upah minimum; $i = 1, 2, 3, \dots, n$ (data cross section 5 kabupaten/kota); $t = 1, 2, 3, \dots, t$ (data time series 2011-2019); e = variabel gangguan.

Dalam metode regresi data panel, terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan, yaitu pemilihan model regresi data panel, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Goodness of Fit. Dalam analisis regresi ini dilakukan tiga model estimasi, yaitu Model Common Effect atau Ordinary Least Square (OLS); Model Fixed Effect; dan Model Random Effect (Widarjono, 2018).

a) Persamaan regresi Model *Common Effect* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

Keterangan: Y = variabel terikat; X = variabel bebas; β_0 = intersep; β_1 = koefisien slope; i = observasi ke- i untuk data *cross section*; t = waktu; $n = 1, 2, 3, \dots, n$; e adalah *error term*.

b) Model *Fixed Effect* ditulis dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_n D_n + \dots + \beta_n X_{nit} + \dots + \varepsilon_{it}$$

Keterangan: Y = variabel terikat; X = variabel bebas; n adalah jumlah variabel bebas; i adalah individu; t adalah waktu; β = koefisien variabel bebas; α adalah koefisien variabel dummy (variabel dummy sebanyak $n-1$ dan $t-1$); ε adalah variabel gangguan.

c) Model *Random Effect* adalah teknik estimasi regresi data panel dengan memperhitungkan kemungkinan variabel gangguan saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Widarjono, 2018).

$$\begin{aligned} Y_{it} = & \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + v_{it} \\ \text{Dimana: } & v_{it} = e_{it} + \mu_i \end{aligned}$$

Variabel gangguan v_{it} terdiri dari dua komponen, yaitu variabel gangguan secara menyeluruh e_{it} kombinasi *time series* dan *cross section* dan variabel gangguan secara individu e_{it} . Variabel gangguan μ_i adalah berbeda-beda antar individu tetapi tetap antar waktu.

Tahap pemilihan model regresi dilakukan dengan melakukan Uji Chow; Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

Uji Chow adalah uji untuk membandingkan Model Common Effect dengan Fixed Effect dan mengetahui model yang lebih baik dalam

pengujian data panel. Hipotesis dalam Uji Chow adalah H_0 : Model Common Effect dan H_1 : Model Fixed Effect.

Uji Hausman adalah uji untuk menentukan model yang lebih baik dalam estimasi data panel antara Model Fixed Effect dan Random Effect. Uji Hausman menggunakan hipotesis H_0 : Model Random Effect; H_1 : Model Fixed Effect. Dalam menolak atau menerima hipotesis, uji ini mengikuti distribusi Chi Square dengan degree of freedom sebanyak k (jumlah variabel bebas).

Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah Model Random Effect lebih baik daripada Model Common Effect. Hipotesis Uji LM, yaitu H_0 : Model Common Effect dan H_1 : Model Random Effect.

Dalam regresi data panel perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan model. Model regresi data panel yang memenuhi asumsi klasik hanya model dengan metode Generalized Least Squared (GLS). Model yang menggunakan GLS hanya model Random Effect sedangkan Fixed Effect dan Common Effect menggunakan OLS.

Model regresi yang baik adalah model yang menghasilkan estimasi yang bersifat Best Linier Unbiased Estimator (BLUE). Model ini diperoleh jika beberapa asumsi klasik dipenuhi. Pada estimasi data panel, potensi masalah asumsi klasik yang dihadapi adalah heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas. Uji ini dapat dilakukan dengan meregresi model analisis kemudian dilakukan uji korelasi antarvariabel bebas dengan menggunakan variance inflating factor (VIF). Batas VIF adalah 10. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka dikatakan terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas. Heteroskedastis timbul apabila nilai residual dari model tidak memiliki varian yang konstan. Gejala ini sering terjadi pada data cross section sehingga sangat dimungkinkan terjadi heteroskedastisitas pada data panel.

Uji Autokorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lain. Hal ini disebabkan karena error pada individu cenderung mempengaruhi individu

yang sama pada periode berikutnya. Masalah ini sering muncul pada data time series.

Uji Goodness of Fit adalah uji untuk mengetahui seberapa baik garis regresi yang dibentuk sesuai dengan data (Widarjono, 2018). Uji ini terdiri dari uji koefisien regresi secara bersama (Uji F), uji signifikansi parameter individu (Uji t), dan uji koefisien determinasi (R^2).

- a) Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.
- b) Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh setiap variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variasi dari variabel bebas.
- c) Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi variabel terikat dijelaskan oleh semua variabel bebas. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1 ($0 < R^2 < 1$). Salah satu permasalahan dalam menggunakan R^2 adalah nilai R^2 akan meningkat ketika ada penambahan variabel bebas dalam model walaupun penambahan variabel bebas tersebut belum tentu mempunyai pembenaran dari teori atau logika ekonomi. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dapat digunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R^2) sebagai alternatif (Widarjono, 2018).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 2, Ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di DIY berada pada kategori sedang (30-50%) dengan ketimpangan terendah pada angka 30% dan tertinggi 45%. Sementara itu, nilai rata-rata ketimpangan pendapatan adalah 38,23%.

Menurut pertumbuhan sektor, sektor yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah sektor Konstruksi sebesar 8,41% dan terendah adalah sektor Pertanian sebesar 1,30%. Pertumbuhan sektor Konstruksi berada pada range yang cukup besar dengan nilai terendah 2,89% dan nilai tertinggi 69,08%. Hal ini juga terlihat dari nilai standar deviasi sebesar 12,44 yang menunjukkan bahwa variasi data terhadap nilai rata-ratanya cukup besar. Nilai pertumbuhan tertinggi ini terjadi karena pembangunan Bandara YIA di Kabupaten Kulon Progo dan beberapa proyek pembangunan infrastruktur pemerintah beberapa tahun terakhir.

Sektor Pertanian meskipun masih memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB DIY tetapi kontribusinya terus menurun. Pertumbuhan sektor ini juga relatif rendah. Pertumbuhan sektor pertanian tertinggi adalah 5,86% sedangkan terendah mencapai -4,76%.

Nilai rata-rata pertumbuhan sektor Industri Pengolahan adalah sebesar 6,47% dengan nilai terendah -4,09% dan tertinggi 8,55%. Sementara itu, sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum yang mencerminkan sektor pariwisata DIY, rata-rata pertumbuhannya relatif tinggi dan berada diatas sektor Industri Pengolahan, yaitu 8,41%. Pertumbuhan terendah sektor ini adalah 4,20% dan tertinggi adalah 9,11%.

Nilai rata-rata IPM adalah 76,65 dengan nilai minimum 64,83 dan maksimum 86,65. Berdasarkan nilai rata-rata dan rentang nilai minimum dan maksimum, IPM kabupaten/kota di DIY masuk dalam tiga kategori, yaitu sedang ($60 \leq \text{IPM} \leq 70$), tinggi ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$), dan sangat tinggi (≥ 80). Selanjutnya, nilai rata-rata TPT adalah 3,46% dengan nilai terendah 1,38% dan tertinggi 6,45%.

Nilai rata-rata PDRB per Kapita dan upah minimum berturut-turut adalah 4,34 dan 6,07. Kedua variabel ini memiliki standar deviasi dibawah nilai rata-rata yang berarti data bersifat homogen.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Min	Max	Std. Dev.
Gini	38,22889	30	45	4,236672
Gagro	1,301778	-4,76	5,86	2,035144
Gind	4,333556	-4,09	8,55	3,049103
Gakom	6,469556	4,20	9,11	1,164468
Gkons	8,412667	2,89	69,08	12,437590
IPM	76,64844	64,83	86,65	6,552764
TPT	3,460222	1,38	6,45	1,465074
PDRB per Kapita	4,343262	4,12	4,81	0,215910
Upah minimum	6,073083	5,91	6,27	0,105915

Sumber: diolah Peneliti, 2021

Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap pemilihan model regresi, tahap pengujian asumsi klasik, dan tahap uji *Goodness of Fit*.

1. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk memilih Model *Common Effect* atau *Fixed Effect* digunakan Uji Chow. Dari hasil estimasi regresi data panel dengan menggunakan Model *Fixed Effect* diperoleh *P-value* ($\text{Prob}>F$) sebesar 0.7298. Nilai *P-value* tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima artinya Model *Common Effect* lebih baik dari Model *Fixed Effect*.

Selanjutnya untuk mengetahui mana yang lebih baik antara Model *Fixed Effect* dan *Random Effect* dilakukan Uji Hausman. Dari hasil estimasi Uji Hausman diperoleh *P-value* ($\text{Prob}>\chi^2$) sebesar 0,9861. Nilai *P-value* tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima artinya Model *Random Effect* lebih baik dibandingkan Model *Fixed Effect*.

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Stat	P-value
Cross-section random	1,82	0,9861

Sumber: diolah Peneliti, 2021

Pada Uji Chow model yang terpilih adalah *Common Effect* sedangkan pada Uji Hausman model yang terpilih adalah *Random Effect* sehingga untuk menentukan model mana yang lebih baik antara Model *Common Effect* dan *Random Effect* perlu dilakukan Uji LM. Hasil estimasi Uji LM diperoleh *P-value* ($\text{Prob}>\chi^2$) sebesar 1,0000. Nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima artinya pilihan terbaik adalah Model *Common Effect*.

Tabel 4. Uji LM

Test Summary	Chi-Sq. Stat	P-value
Breusch-Pagan Lagrangian	0,00	1,0000
Multiplier test for random effects		

Sumber: diolah Peneliti, 2021

2. Uji asumsi Klasik

Berdasarkan hasil tahap pemilihan model, model yang terbaik untuk regresi data panel dalam analisis ini adalah model *Common Effect*. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik untuk menghasilkan model regresi yang baik, yaitu model yang memiliki parameter estimasi yang bersifat BLUE. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antarvariabel bebas dalam model regresi yang

akan digunakan maka dilakukan Uji Multikolinieritas. Deteksi ini dilakukan dengan melihat *tolerance value* atau VIF. Hasil estimasi Uji Multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas kurang dari 10, dengan rata-rata VIF 2,77. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
TPT	5,60	0,178697
IPM	4,98	0,200751
PDRB perkapita	4,02	0,248484
UMK	2,37	0,422466
Gind	1,48	0,674907
Gagro	1,27	0,786377
Gkons	1,24	0,804316
Gakom	1,18	0,846059
Mean VIF	2,77	

Sumber: diolah Peneliti, 2021

Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji eteroskedastisitas, yaitu untuk menguji apakah nilai residual dari model memiliki varian yang konstan atau tidak. Dari hasil estimasi uji heteroskedastisitas diperoleh nilai *P-value* ($\text{Prob} > \chi^2$) adalah 0,8737 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Test Summary	Chi-Sq. Stat	P-value
Breusch-Pagan/ Cook-Weisberg test for heteroskedasticity	0,03	0,8737

Sumber: diolah Peneliti, 2021

Uji Autokorelasi

Selanjutnya, uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lain. Dari hasil uji Autokorelasi diperoleh $\text{Prob} > F$ sebesar 0,3577 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti tidak terjadi autokorelasi pada model data panel.

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Test Summary	F-stat	Prob>F
Wooldridge test for autocorrelation in panel data	1,079	0,3577

Sumber: diolah Peneliti, 2021

3. Uji *Goodness of Fit*

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, regresi data panel dengan model *Common Effect* tidak memiliki masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi sehingga dapat dikatakan bahwa estimator regresi dalam model bersifat BLUE. Tahap selanjutnya adalah melakukan uji *Goodness of Fit*.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil estimasi regresi panel data dengan menggunakan model *Common Effect* disajikan pada Tabel 8. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,7087 artinya variasi ketimpangan pendapatan DIY dijelaskan oleh model sebesar 70,87% dan sisanya sebesar 29,13% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Sementara itu, nilai *adjusted R^2* sebesar 0,6439 atau 64,39%.

Uji F (Serempak)

Dari hasil estimasi diperoleh F-stat sebesar 10,95 dengan probabilitas 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel bebas (pertumbuhan sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan minum serta IPM, TPT, PDRB per Kapita, dan upah minimum) mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan DIY.

Uji t (uji signifikansi parameter individu)

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum, IPM, PDRB per Kapita, dan upah minimum. Sementara itu, variabel pertumbuhan sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Konstruksi, dan TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas t-Statistik sebesar 0,001, signifikan pada $\alpha = 0,001$. Nilai koefisien variabel adalah -1,29 artinya bahwa setiap pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum naik sebesar 1% akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 1,29%.

Tabel 8. Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Model *Common Effect*

Variabel bebas: Rasio Gini				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Stat	Prob.
C	-29.0771	26.51878	-1.10	0.280
Gagro	0.2401	0.21118	1.14	0.263
Gind	-0.2062	0.15215	-1.36	0.184
Gakom	-1.2888	0.35582	-3.62	0.001 ***
Gkons	0.0187	0.03417	0.55	0.587
IPM	0.5142	0.12981	3.96	0.000 ***
TPT	1.0630	0.61538	1.73	0.093
PDRB per Kapita	-10.0929	3.54112	-2.85	0.007 **
Upah min.	12.6484	5.53615	2.28	0.028 *
Number of Obs.	45			
F-stat	10,95			
Prob. (F-stat)	0.0000			
R ²	0.7087			
Adjusted R ²	0.6439			

Ket: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Sumber: diolah Peneliti, 2021

Menurut BPS (2020), sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Sektor ini dikelompokkan menjadi dua subsektor, yaitu Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. Jika dilihat dari peranannya dalam pembentukan PDRB selama 2015-2019, kontribusi subsektor Penyediaan Makan Minum lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi subsektor Penyediaan Akomodasi. Sebaliknya dilihat dari pertumbuhannya, subsektor Penyediaan Akomodasi tumbuh lebih tinggi dari subsektor Penyediaan Makan Minum (Tabel 8). Meskipun demikian, kedua subsektor ini potensial untuk dikembangkan karena keduanya menjadi penopang pariwisata DIY. Perkembangan subsektor Penyediaan Makan Minum antara lain ditunjukkan dari berkembangnya usaha kuliner sedangkan perkembangan subsektor Penyediaan Akomodasi dicerminkan dari semakin maraknya usaha penginapan, baik hotel bintang, hotel melati, maupun pondok wisata. Kedua subsektor ini merupakan lapangan usaha untuk pekerja formal dan informal. Dengan demikian,

mendorong pertumbuhan kedua subsektor ini selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga akan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat.

Tabel 9. Laju Pertumbuhan Subsektor Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum dan Peranannya terhadap Pembentukan PDRB DIY, 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Share</i>					
Penyediaan Akomodasi & Mamin	10,24	10,24	10,33	10,22	10,37
<i>Subsektor Penyediaan Akomodasi</i>	2,02	2,07	2,18	2,27	2,52
<i>Subsektor Penyediaan Mamin</i>	8,21	8,17	8,15	7,95	7,83
<i>Growth</i>					
<i>Subsektor Penyediaan Akomodasi</i>	7,17	8,16	11,13	13,06	18,86
<i>Subsektor Penyediaan Mamin</i>	5,46	4,68	5,06	5,21	6,24

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (diolah)

IPM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan ditunjukkan oleh nilai probabilitas t-Statistik sebesar 0,000 dan nilai koefisien variabel sebesar 0,51. Nilai koefisien tersebut berarti bahwa setiap IPM naik sebesar 1% akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,51 poin (*ceteris paribus*).

Jika dibandingkan dengan 34 provinsi di Indonesia, IPM DIY berada pada urutan tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Namun, capaian IPM pada level kabupaten/kota di DIY cukup bervariasi. Selain itu, gap capaian IPM relatif besar antara Kota Yogyakarta yang memiliki capaian tertinggi dengan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki capaian terendah. Capaian IPM Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman termasuk kategori sangat tinggi sementara capaian IPM Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan manusia di DIY kemungkinan menjadi salah satu sebab hubungan positif antara IPM dengan ketimpangan pendapatan.

PDRB per Kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan ditunjukkan

oleh nilai probabilitas t-Statistik sebesar 0,007 pada tingkat signifikan 0,01. Nilai koefisien variabel adalah -10,09 artinya setiap PDRB per Kapita naik sebesar 1% akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,10 poin (*ceteris paribus*). Temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa distribusi pendapatan akan membaik seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita.

Upah minimum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan ditunjukkan oleh nilai probabilitas t-Statistik sebesar 0.028 signifikan pada level 0,05. Nilai koefisien variabel adalah 12,65 artinya bahwa setiap upah minimum naik sebesar 1% akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,13 poin (*ceteris paribus*).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Selanjutnya, BPS mengelompokkan kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal meliputi tenaga kerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar atau buruh/ karyawan/ pegawai. Sementara itu, pekerja informal mencakup tenaga kerja dengan status pekerjaan: berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja tidak dibayar. Pada periode 2019-2021, jumlah pekerja informal di DIY tercatat lebih besar dibandingkan jumlah tenaga kerja formal.

Tabel 10. Persentase Pekerja Formal dan Informal di DIY, 2020 & 2021 (Februari)

Periode	Pekerja Formal	Pekerja Informal
2019	49,30	50,70
2020	48,41	51,59
2021	42,85	57,15

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Berdasarkan pengertian upah dan pengelompokan pekerja formal dan informal diatas dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan upah cenderung menyasar pekerja formal. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pekerja formal di DIY lebih kecil dibandingkan jumlah pekerja informal yang cenderung memiliki upah rendah (dibawah upah minimum). Dengan demikian, kebijakan kenaikan upah minimum kemungkinan hanya akan meningkatkan upah pekerja formal tetapi tidak pada upah pekerja informal. Hal ini menjelaskan pengaruh positif upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, simpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan DIY. Sementara itu, pertumbuhan sektor Pertanian, sektor Industri Pengolahan, dan sektor Konstruksi tidak berpengaruh signifikan.
2. IPM dan upah minimum memiliki pengaruh positif signifikan sedangkan PDRB per Kapita memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan DIY. Sementara itu, TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan DIY.

Berdasarkan simpulan tersebut, rekomendasi yang diberikan adalah:

1. Pembangunan ekonomi DIY agar diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum karena pertumbuhan sektor ini dapat dikatakan bersifat inklusif, tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menurunkan ketimpangan pendapatan.
2. Proses transformasi struktural yang sudah berjalan perlu ditinjau ulang untuk menemukenali kendala yang dihadapi dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik. Transformasi struktural diartikan sebagai pergeseran dari perekonomian tradisional ke modern. Perlu diperhatikan bahwa pergeseran ini tidak hanya mencakup antar sektor tetapi juga pergeseran dalam sektor. Dengan demikian, perlu adanya penguatan pada masing-masing sektor agar memiliki pertumbuhan yang berkualitas.

3. Perlu adanya perhatian dan upaya lebih dari semua pihak dalam pemerataan pembangunan manusia secara menyeluruh di DIY karena ketimpangan IPM yang terjadi antar kabupaten/kota di DIY memicu ketimpangan distribusi pendapatan.
4. Penetapan kebijakan upah minimum DIY baik UMP maupun UMK perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan memperhatikan struktur ekonomi dan tenaga kerja serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan termasuk kepatuhan terhadap upah minimum yang ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Anggina, Del, & Artaningtyas, W.D. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di DIY Tahun 2007-2014. *Buletin Ekonomi*, 15 (1), 1-154.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- BPS Provinsi DIY & Bappeda DIY. (2020). *Analisis Produk Domestik Regional Bruto DIY 2015-2019*. Yogyakarta.
- BPS Provinsi DIY & Bappeda DIY. (2020). *Analisis Ketimpangan DIY 2020*. Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar N. & Porter, Dawn C. (2009). *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Khoirudin, R., & Musta'in, J.L. (2020). Analisis Determinasi Ketimpangan Pendapatan di DIY. *Tirtayasa Ekonomika*, 15 (1).
- Peraturan Daerah DIY. (2017). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022*. Yogyakarta.
- Putra, Rivanda F.I. & Lisna, Vera. (2020). Segitiga Kemiskinan-Pertumbuhan-Ketimpangan (PGI Triangle): Pembangunan Keuangan, Pembangunan Manusia, dan Ketimpangan Pendapatan di Asia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28 (2).
- Raeskyesa, Dewa, G.S. (2020). Sectoral Growth and Income Inequality in Asean-5 Countries: Case of Low-Middle Income Economies. *Journal of ASEAN Studies*, 8 (1), 1-13.
- Romli, M.S., Hutagaol, M.P., & Priyarsono, D.S. (2016). Transformasi Struktural: Faktor-Faktor dan Pengaruhnya terhadap Disparitas Pendapatan di Madura. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 5 (1), 25-44.
- Sulistyo, R.A. (2017). Analisis Ketimpangan Ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta (Tahun 2012-2016). Yogyakarta: FE-UII.
- Todaro, Michael P. (1997). *Economic Development. The United States of America*: Addison-Wesley Reading.
- Widarjono, Agus. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Efektivitas Penyebarluasan Informasi Keistimewaan

Rufariza

ester.rufariza@gmail.com

Perencana Ahli Pertama, Paniradya Kaistimewaan DIY

Abstrak

Setelah Sembilan tahun keistimewaan berjalan di DIY, masih banyak masyarakat DIY yang belum memahami tentang keistimewaan DIY. Paniradya Kaistimewaan berusaha menyebarluaskan informasi terkait keistimewaan DIY melalui berbagai cara dan media. Penelitian ini mengambil posisi mengukur tingkat efektivitas diseminasi informasi keistimewaan DIY yang telah dilakukan selama dua tahun lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas penyebaran informasi keistimewaan yang telah dilakukan oleh Paniradya Kaistimewaan. Selanjutnya adalah untuk mengetahui media penyebaran informasi publik yang paling efektif untuk masyarakat DIY. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa statistik deskriptif sederhana. Dari 469 responden yang masuk didapatkan hasil bahwa tingkat efektivitas penyebaran informasi keistimewaan mencapai angka rata-rata 71% dan termasuk dalam kategori efektif. Sedangkan media komunikasi paling efektif untuk DIY adalah koran, mulut ke mulut, dan youtube.

Kata kunci: efektivitas, keistimewaan, penyebaran informasi publik

A. PENDAHULUAN

Keistimewaan DIY yang ditetapkan melalui UU nomor 13 tahun 2012 telah berjalan selama kurang lebih sembilan tahun. Namun begitu belum seluruh masyarakat DIY mendapatkan informasi terkait keistimewaan DIY sebagaimana yang diharapkan oleh para pemimpin daerah. Paniradya Kaistimewaan sebagai dinas yang mengampu pengelolaan dana keistimewaan telah mengadakan kegiatan dimana salah satu keluarannya adalah penyebaran informasi keistimewaan. Kegiatan tersebut dimulai pada tahun anggaran 2019 dan rutin dilakukan setiap tahunnya hingga sekarang. Dalam laporan akhir Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Dinas Paniradya Kaistimewaan tahun 2020 dinyatakan bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh Paniradya Kaistimewaan adalah nilai-nilai kearifan dan budaya lokal Yogyakarta yang bersifat makro dan multidimensi pada berbagai bidang antara lain religi, moral, kemasyarakatan, pendidikan dan pengetahuan, kesenian, dan lain sebagainya. Kegiatan ini merupakan upaya

internalisasi kembali nilai-nilai luhur kebudayaan jawa yang merupakan bagian dari identitas keistimewaan DIY.

Penyebarluasan tersebut dilakukan melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dan media luar ruangan. Media sosial yang digunakan sejauh ini ada lima pelantar yaitu: Youtube, Instagram, Tiktok, Facebook, dan Twitter. SKH Kedaulatan Rakyat, Harian Merapi, Harian Tribun Jogja, dan Harian Jogja merupakan media cetak yang digunakan oleh Paniradya dalam upaya penyebaran informasi. Sementara media elektronik yang digunakan adalah televisi dan radio berskala lokal DIY. Selanjutnya media luar ruangan yang digunakan adalah videotron. Paniradya Kaistimewaan juga bekerjasama dengan beberapa instansi lain seperti DPRD DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Humas Pemda DIY, dan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk menjangkau lebih banyak kalangan.

Sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian terkait seberapa efektif upaya penyebaran

informasi tersebut telah menyentuh masyarakat DIY khususnya, dan membantu masyarakat DIY dalam memahami tujuan penyebaran informasi seperti yang diharapkan. Pengukuran efektivitas dinilai penting untuk menilai keberhasilan strategi dan pengelolaan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Paniradya Kaistimewaan. Permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar tingkat efektifitas penyebaran informasi keistimewaan yang telah dilakukan oleh Dinas Paniradya Kaistimewaan melalui berbagai media diatas terhadap tujuan yang hendak dicapai.
2. Media apa yang paling efektif dalam upaya diseminasi informasi tentang keistimewaan.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengukur dan mendapatkan informasi terkait tingkat efektivitas penyebaran informasi keistimewaan yang selama ini telah dilakukan Dinas Paniradya Kaistimewaan terhadap tujuan yang hendak dicapai.
2. Menemukenali media yang paling efektif untuk penyebaran informasi keistimewaan DIY.

Manfaat penelitian ini adalah membantu Paniradya Kaistimewaan dalam melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas penyebaran informasi keistimewaan sehingga dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti akibat, pengaruh, membawa hasil, berhasil guna. Subagyo, Ahmad Wito (2000) menyatakan bahwa efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas merupakan upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu kegiatan/program/organisasi karena dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Suatu kegiatan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Menurut Sudarwan Danim (2004), Efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

1. Intensitas atau keadaan tingkatan atau ukuran intensnya yang akan dicapai, artinya memiliki rasa engagement dengan kadar yang tinggi.

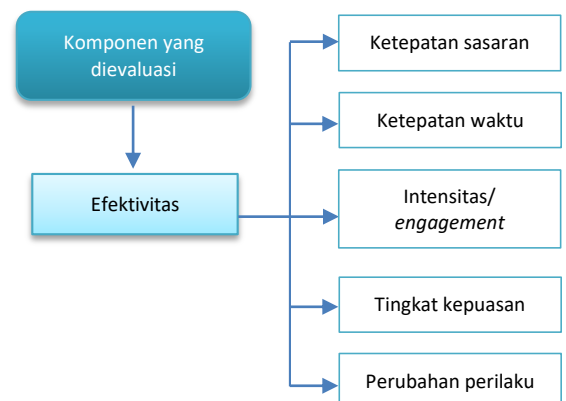
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas dapat kuantitatif dan dapat kualitatif. Juga dapat berarti tingkat pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai.

3. Komunikasi yang terjadi, artinya komunikasi diukur efektif apabila terdapat kejelasan, ketepatan, konteks, dan budaya dari bahasa maupun informasi serta etika dan tata krama yang disampaikan kepada komunikan.

Sutrisno (2007) mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu:

1. Pemahaman terhadap program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan/program melalui pelatihan keterampilan maupun melalui sosialisasi.
2. Tepat sasaran, adalah sasaran keterampilan yang diharapkan dan dianggap sesuai dengan program tersebut.
3. Tepat waktu, yaitu kesesuaian penggunaan waktu untuk pelaksanaan program dengan yang telah direncanakan.
4. Tercapainya tujuan, diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.
5. Perubahan nyata, yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Efektivitas merupakan terpenuhinya standar tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Ukuran efektivitas terdiri dari tingkat intensitas dan kepuasan serta komunikasi yang terjadi. Tercapainya tujuan itu disebut efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama. Variabel efektivitas yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Variabel penyebaran informasi

Sumber: Penulis, 2021

Penyebarluasan Informasi

Menurut Anggraeni dan Irviani (2017) informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah dan diorganisasi dengan cara tertentu sedemikian rupa sehingga mempunyai arti bagi penerimanya. Penyebarluasan informasi akan selalu berhubungan dengan komunikasi. Harold Laswell (1972), menyatakan bahwa komunikasi adalah siapa yang mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa. Sedangkan menurut Onong Uchjana, efektivitas komunikasi adalah proses komunikasi yang dibuat sedemikian rupa untuk menimbulkan efek kognitif, afektif dan konatif pada komunikan sesuai dengan tujuan komunikatornya. Berdasarkan beberapa literatur tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyebarluasan informasi adalah upaya untuk menyampaikan sekumpulan data dan fakta yang telah diolah sedemikian rupa sehingga mempunyai arti tertentu kepada khalayak luas, melalui media tertentu dan dengan tujuan tertentu.

Adapun fungsi komunikasi menurut Lasswell adalah sebagai pengamatan lingkungan, korelasi kelompok-kelompok dalam masyarakat ketika menanggapi lingkungan serta transmisi warisan sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain (Laswell, 1972). Lebih lanjut komponen proses komunikasi berdasarkan Laswell adalah:

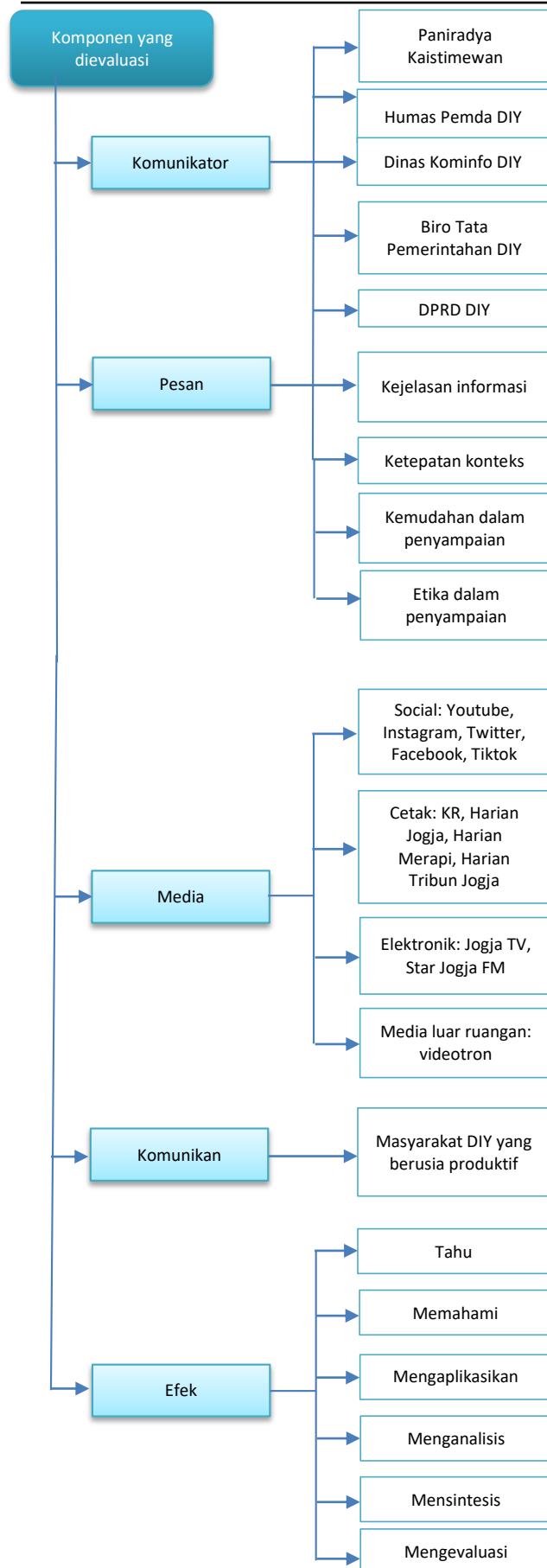
1. Komunikator/pengirim informasi
2. Pesan
 - 1) Media
3. Komunikan/penerima
- 2) Efek/tujuan tertentu yang ingin dicapai

Prinsip-prinsip dasar proses penyebarluasan informasi/publikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kreativitas
- 2) Varietas media yang digunakan
Adanya perkembangan media membuat penyebaran informasi sangatlah beragam. Baik itu melalui jurnal, televisi, ponsel, surat-menyerut, dan lain sebagainya.
- 3) Kuantitas
- 4) Visibilitas
Tingkat keterbacaan yang semakin besar terhadap teks maka semakin besar pula seseorang membaca semua informasi pada teks. Agar semua teks dapat terbaca maka para desain telah memastikan untuk memilih jenis-jenis huruf yang dapat terbaca dari jarak beberapa meter
- 5) Understandability
- 6) Advance Dahulu / koreksi

Efektif tidaknya sebuah komunikasi diukur dari efek ataupun dampak yang terjadi pada komunikan. Menurut Notoatmodjo (2010) terdapat enam tingkatan untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang, yaitu:

- a. Tahu (*know*)
Tingkatan dalam tahap awal ini berkaitan dengan bagaimana tingkat tahu seseorang dalam mengingat kembali materi yang telah didapatnya.
- b. Memahami (*comprehension*)
Didalam tingkatan tahap selanjutnya yaitu memahami yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami sebuah materi dengan menjelaskan kembali menggunakan pemahamannya sendiri.
- c. Aplikasi (*application*)
Pada tahapan ini, seseorang dilihat bagaimana menerapkan materi yang telah didapatnya, apakah seseorang tersebut dapat mengaplikasikan suatu materi yang telah didapatnya.
- d. Analisis (*analysis*)
Selanjutnya seseorang dinilai bagaimana ia menjabarkan suatu materi yang telah didapatnya.
- e. Sintesis (*synthesis*)
Berkaitan dengan bagaimana kemampuan seseorang dalam memadukan atau menggabungkan materi ke bentuk yang baru yang dibuatnya sendiri (membuat ringkasan dari materi yang telah didapat).
- f. Evaluasi (*evaluation*)
Berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menilai suatu materi yang telah didapatnya
Hovland beranggapan bahwa perubahan sikap serupa dengan proses belajar. Dalam mempelajari sikap yang baru ada tiga variabel penting yang menunjang proses belajar tersebut yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan.
Teori Stimulus Organism Respon (S-O-R) penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. Elemen-elemen dari model ini adalah pesan (stimulus), komunikan (organisme), dan efek (respon). Stimulus yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau dapat ditolak sehingga proses selanjutnya terhenti. Ini berarti stimulus tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi organisme, maka tidak ada perhatian (*attention*) dari pesan



Gambar 2. Diagram variabel penyebaran informasi

Sumber: Penulis, 2021

(stimulus). Jika stimulus diterima oleh organisme berarti terjadi komunikasi dan perhatian dari organisme, sehingga dalam hal ini stimulus efektif dan ada reaksi. Langkah selanjutnya adalah jika stimulus telah mendapat perhatian dari organisme, kemampuan dari organisme inilah yang dapat melanjutkan proses berikutnya. Variabel penyebaran informasi yang sesuai dengan penelitian ini tersaji pada gambar 2.

Keistimewaan

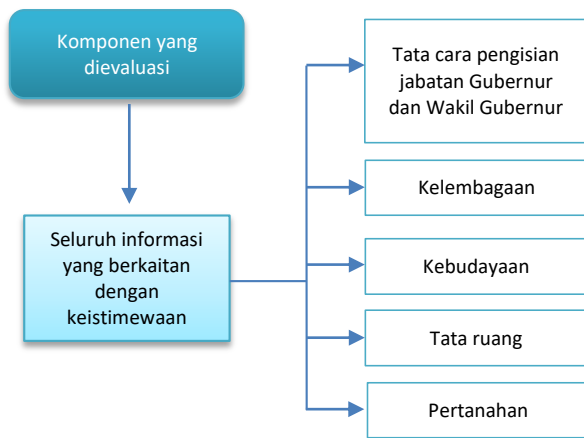
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
- c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menciptakan pemerintahan yang baik;
- e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Kewenangan urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan;
- e. tata ruang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka aspek keistimewaan yang dapat dijadikan variabel tersaji pada gambar 3.

**Gambar 3. Diagram variabel keistimewaan**

Sumber: Penulis, 2021

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan dukungan dua jenis data yaitu data primer dari hasil survey online dan data sekunder yang diambil dari Paniradya Kaistimewan. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara online melalui aplikasi *googleform*. Selanjutnya data dianalisis menggunakan statistic deskriptif sederhana untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penjabaran tujuan, variabel dan jenis data yang digunakan tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Penjabaran variabel

Tujuan Penelitian	Variabel	Subvariabel	Jenis Data
1. Mengukur tingkat efektivitas penyebarluasan informasi keistimewaan oleh Paniradya Kaistimewan yang bertujuan untuk internalisasi nilai-nilai keistimewaan DIY dalam kehidupan masyarakat sehari-hari	A. Komunikasi	1. ketepatan sasaran	nominal
	B. Komunikator	2. lembaga yang berperan sebagai komunikator	nominal
	B. Pesan	3. kejelasan informasi	ordinal, skala likert 1-5
		4. isi pesan	
		5. kemudahan akses informasi	
		6. kemudahan penyampaian	
		7. etika penyampaian	
		8. intensitas	
	C. Efek	9. tingkat kepuasan	ordinal, skala likert 1-5
		10. perubahan perilaku	
	D. Media	11. Tindak lanjut	nominal
		12. media	nominal & ordinal, skala likert 1-5
2. Menemukenali media yang paling efektif untuk penyebarluasan informasi keistimewaan DIY			

Sumber: Penulis, 2021

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili dan memiliki KTP DIY, dengan rentang usia produktif yaitu 17-65 tahun. Range usia ini diambil karena populasi dianggap telah dewasa dan mencapai tingkat kematangan berfikir sehingga mampu memberikan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Populasi juga terdiri dari semua jenis kelamin, tidak membatasi pada strata ekonomi atau jenis pekerjaan tertentu, dan mencakup berbagai tipe wilayah baik perkotaan maupun perdesaan. Sampel yang diambil idealnya merata dari kelima kabupaten/kota di DIY dengan menggunakan teknik random sampling, dimana sampel diambil 10% dari masing-masing total populasi di wilayah tersebut. Namun karena keterbatasan waktu, maka digunakan pendekatan lain yang lebih rasional untuk dilakukan dalam waktu singkat yaitu rumus Slovin dan table Isaac dan Michael.

Tabel 2. Jumlah Penduduk D.I Yogyakarta Menurut Golongan Usia 17-65

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Total
	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
2019	291.528	635.772	503.223	717.096	284.020	2.431.639
2020	292.348	643.891	510.105	729.632	286.136	2.462.112
Rata-rata	291.938	639.832	506.664	723.364	285.078	2.446.876

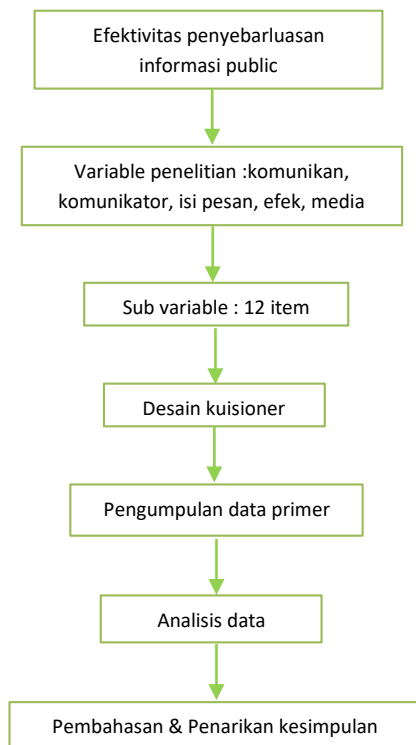
Sumber: Biro Tapem Setda DIY 2021 dengan pengolahan lebih lanjut

Tabel 3. Pendekatan Jumlah Sampel Berdasarkan Rumus Slovin dan table Isaac & Michael

Kab/kota	Jumlah populasi berdasarkan rata-rata jumlah penduduk usia 17-65	Rumus slovin		Table Isaac & Michael	
		Standar deviasi 5%	Standar deviasi 10%	Standar deviasi 5%	Standar deviasi 10%
Kulon Progo	291.938	399	100	348	270
Bantul	639.832	400	100	348	270
Gunungkidul	506.664	400	100	348	270
Sleman	723.364	400	100	348	270
Kota Yogyakarta	285.078	399	100	348	270

Sumber: Biro Tapem Setda DIY 2021 dengan pengolahan lebih lanjut

Dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu maka diambil sampel berdasarkan rumus slovin dengan standard deviasi 10%. Kerangka desain penelitian digambarkan pada Gambar 4.

**Gambar 4. Kerangka desain penelitian**

Sumber: Penulis, 2021

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui mekanisme penyebaran *googleform* yang disebarakan pada grup-grup whatsapp dan juga melalui koordinasi dengan beberapa lurah terpilih di seluruh kabupaten/kota di DIY, didapatkan respon balik sejumlah 469 dari target 500 responden. Hasil survey dapat disampaikan sebagai berikut:

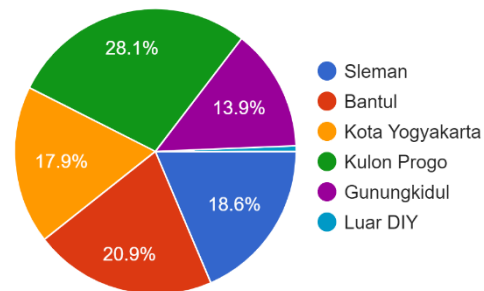
Tabel 4. Profil responden mayoritas

Profil responden	Modus	Nilai
jenis kelamin	laki-laki	64%
Kategori usia	usia bekerja 25-60th	86.4%
pendidikan	SMA/setara	52%
pekerjaan	lainnya	39.9%
domisili	kulon progo	28.1%

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Responden mayoritas adalah laki-laki dengan persentase lebih dari separuh yaitu 64%. Usia mayoritas berada pada usia produktif bekerja yaitu antara usia 25-60 tahun. Kelompok usia terbesar kedua adalah kelompok usia perkuliahan yaitu antara 20-24 tahun sebesar 7,4% dan dua kelompok terbawah yaitu usia pensiun (61-65 tahun) sebesar 4,2%, dan usia sekolah

SMA/ sederajat (17-19 tahun) sebesar 2,1%. Pendidikan responden cukup menggembirakan dengan porsi terbesar adalah lulus SMA/ sederajat dengan proporsi 52%, disusul dengan lulus S1 sebesar 34,7% dan S2 sebesar 7,6%. Selebihnya merupakan lulusan SMP dan sebagian kecil SD. Berdasarkan kelompok pekerjaan, sebesar 39,9% menjawab lainnya, sedangkan 14,4% karyawan swasta dan PNS sebesar 12,3%. Sebanyak 10,8% adalah ibu rumah tangga dan pelaku UMKM sebesar 9,1%.

**Gambar 5. Sebaran domisili responden**

Sumber: Penulis, 2021

Responden paling antusias adalah responden yang berasal dari Kulon Progo. Hal ini dibuktikan dengan adanya 132 respon atau sekitar 28,1% yang masuk dari target sebesar 100 orang per kabupaten/kota. Kabupaten yang berkontribusi paling kecil adalah Gunungkidul dengan total data masuk sebesar 65 respon atau sekitar 13,9%. Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul berbagi kontribusi yang hampir sama secara rata-rata. Data kemudian ditabulasi untuk selanjutnya diukur dengan menerjemahkan skoring dari skala likert yang digunakan (Sugiyono, 2016).

Tabel 5. Tingkat efektivitas penyebarluasan informasi keistimewaan

Pertanyaan	variable	skor	Skala	persentase
Q5	Kebermanfaatan	1.792	efektif	77%
Q4	akses	1.751	efektif	75%
Q3	menarik	1.722	efektif	74%
Q2	Kejelasan	1.676	efektif	72%
Q7	motivasi	1.660	efektif	71%
Q6	Kepuasan	1.628	efektif	70%
Q1	intensitas	1.469	efektif	63%
Rata-rata				71%

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Skor skala likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

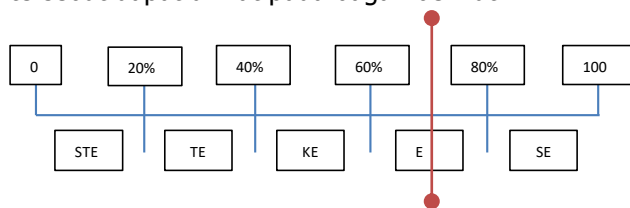
$$\text{Skala Likert} = T \times P_n$$

Keterangan:

T = Total jumlah responden yang memilih

P_n = Pilihan angka skor likert

Dari Tabel 5 didapatkan bahwa diseminasi informasi keistimewaan secara keseluruhan berada pada kategori efektif dengan persentase total rata-rata sebesar 71%. Persentase tingkat efektivitas masing-masing variable berurutan dari yang paling tinggi hingga ke rendah berdasarkan table diatas adalah: kebermanfaatan, akses, kemudahan dicerna/menarik, kejelasan, motivasi, kepuasan, dan intensitas. Hal ini menunjukkan bahwa output yang direncanakan oleh Paniradya Kaistimewan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Jika digambarkan pada rating scale 0-100% maka rata-rata nilai efektivitas diseminasi informasi tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 6. Rating scale tingkat efektivitas penyebarluasan informasi keistimewaan DIY

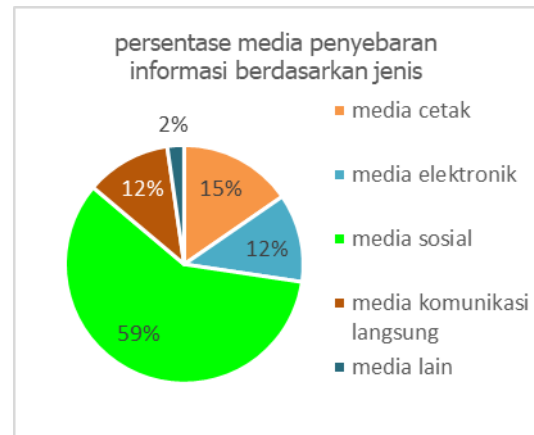
Sumber: Penulis, 2021

Meskipun hasil survey tersebut sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan kedepan agar menjadi lebih sempurna seperti misal pada variable intensitas dan tingkat kepuasan. Namun demikian diperlukan analisa lebih mendalam pada penelitian berikutnya untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas penyebarluasan informasi keistimewaan tersebut.

Tahap selanjutnya setelah mengetahui tingkat efektifitas penyebarluasan informasi keistimewaan adalah mengetahui media apakah yang paling efektif digunakan oleh pemerintah dalam diseminasi informasi keistimewaan.

Berdasarkan jenis media informasi yang digunakan maka media social secara agregat tetap menjadi primadona (59%) dalam upaya diseminasi informasi keistimewaan. Secara individual media cetak menempati urutan pertama dengan total skor sebesar 342 atau setara 25% dari total keseluruhan. Pada persentase berdasarkan jenis, koran menempati urutan kedua sebesar 15%,

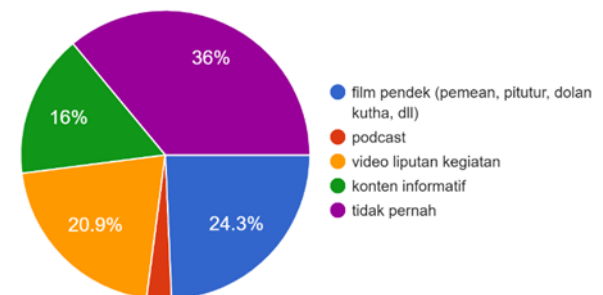
disusul oleh media elektronik dan media komunikasi langsung dari mulut ke mulut dengan persentase masing-masing sebesar 12%, seperti tersaji pada gambar 7.



Gambar 7. Persentase efektivitas media informasi keistimewaan berdasarkan jenis

Sumber: Penulis, 2021

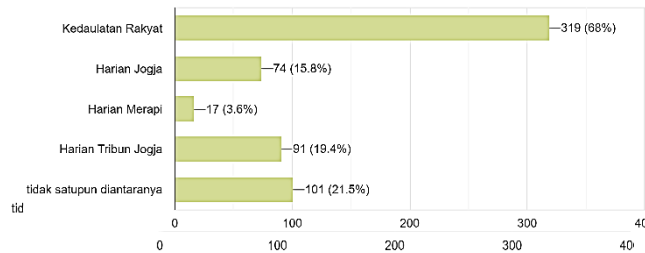
Media yang dominan digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi keistimewaan secara individual, tersaji pada gambar 8.



Gambar 8. Media yang dominan digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi keistimewaan

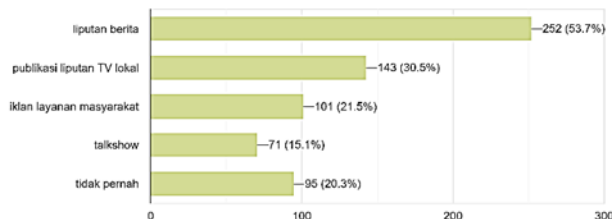
Sumber: Analisis Penulis, 2021

Media yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi keistimewaan adalah media cetak berupa koran lokal. Berdasarkan hasil riset Inside.ID, media cetak berupa koran unggul. Sebanyak 45% responden Indonesia masih terbiasa mendapatkan informasi berita dari koran, di tengah banyaknya portal berita online di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di pedesaan masih mengandalkan koran sebagai salah satu sumber informasi karena sulitnya akses internet serta keterbatasan terhadap gadget, terutama pada orang-orang dengan usia lanjut.



Gambar 9. Koran lokal yang paling banyak digunakan masyarakat sebagai sumber informasi
Sumber: Penulis, 2021

Kedaulatan Rakyat menjadi Koran lokal paling dominan dengan nilai 68 % disusul tribun jogja, dan harian jogja. Harian Merapi menjadi Koran lokal yang paling jarang digunakan oleh masyarakat. Media paling efektif kedua adalah youtube (20%). Akun youtube resmi paniradya kaistimewaan dibuat pada tanggal 14 agustus 2019 telah memiliki 57.8K subscriber dengan total video 129 buah dan total view sampai saat ini adalah 4.730.704 views. Publikasi yang paling populer adalah film pendek yang terkonfirmasi dari jumlah viewer. Film pendek berdurasi 11 menit 24 detik berjudul "Pemean" yang tayang perdana pada bulan November 2020 telah ditonton oleh 2,7 juta viewer. Film-film pendek ini menggambarkan kehidupan sehari-hari yang dekat dengan masyarakat, ringan, bergenre komedi dan memiliki pesan yang mendalam berupa nilai-nilai budaya.



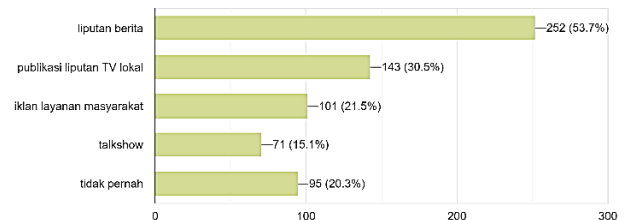
Gambar 10. Jenis publikasi youtube yang paling banyak ditonton oleh masyarakat
Sumber: Penulis, 2021

Selain film, akun youtube paniradya juga menampilkan video informasi liputan desa mandiri budaya, dan pesan social misalnya ajakan untuk tertib di jalan, disertai informasi alokasi penggunaan dana untuk pembangunan.

Media komunikasi langsung menjadi media favorit warga DIY yang ketiga (15%). Menurut Nielsen, 77% konsumen cenderung akan membeli sebuah produk setelah mereka mempelajarinya dari teman atau keluarga. Sementara 92% orang percaya terhadap rujukan terhadap suatu produk dari orang yang mereka kenal. Konsumen juga akan sukarela membagikan informasi kepada rekan-

rekannya bila ia puas atau kecewa terhadap suatu produk. Berger menyatakan bahwa pemasaran mulut ke mulut atau Word of Mouth (WOM) ini merupakan iklan secara tradisional yang 10x lebih efektif dibandingkan media lainnya. Sistem sosial kemasyarakatan DIY yang masih sangat tinggi kekeluargaannya dan masih sering melakukan pertemuan-pertemuan secara rutin menjadikannya salah satu media penyebaran informasi yang cukup efektif terhadap program-program pemerintah.

Media paling efektif selanjutnya adalah Instagram yang menunjukkan hasil sebesar 13%. Selanjutnya media elektronik berupa TV lokal menjadi andalan masyarakat. TV tidak memerlukan jaringan internet sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi.



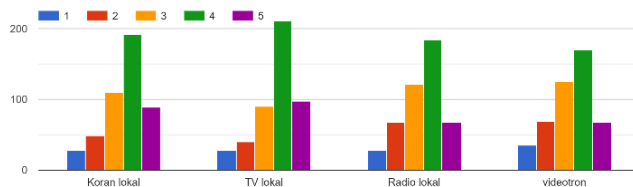
Gambar 11. Informasi keistimewaan yang paling banyak diakses melalui TV lokal
Sumber: Penulis, 2021

Jenis pemberitaan yang paling banyak ditonton di tv lokal adalah liputan berita sebanyak 53,7%. Publikasi liputan local menempati urutan kedua sebesar 30,5% dan iklan layanan masyarakat sebesar 21,5%. Talkshow menjadi acara yang paling sedikit diminati warga yaitu sebesar 15,1%. Youtube menjadi media social paling digemari warga dalam mendapatkan informasi terkait keistimewaan dengan total persentase sebesar 48% atau hampir separuh dari total. Disusul oleh Instagram sebanyak 26% dan facebook sebanyak 17%. Media social yang paling tidak menarik bagi masyarakat adalah twitter dan tiktok. Lebih jelas untuk media social dapat digambarkan pada Gambar 12.



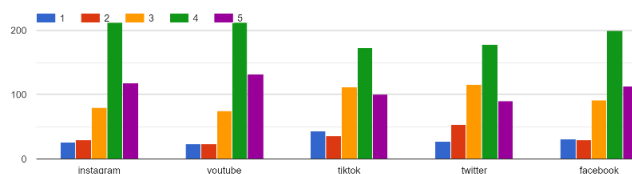
Gambar 12. Media sosial paling efektif dalam penyebaran informasi keistimewaan
Sumber: Penulis, 2021

Berdasarkan persepsi masyarakat, tingkat efektivitas media dalam penyebarluasan informasi keistimewaan tersaji pada gambar 13.



Gambar 13. Persepsi masyarakat terhadap tingkat efektivitas diseminasi informasi
Sumber: Penulis, 2021

Ada sedikit perbedaan antara hasil penelitian dengan persepsi masyarakat terkait dengan media mana yang paling efektif dalam penyebarluasan informasi keistimewaan DIY. Berdasarkan persepsi masyarakat TV lokal menjadi media yang dirasa paling efektif, dan diikuti oleh koran lokal. Sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa media cetak berupa koran adalah media yang paling efektif dalam diseminasi informasi keistimewaan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap suatu hal tidak merepresentasikan apa yang sebenarnya mereka lakukan atau inginkan dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 14. Persepsi masyarakat terhadap tingkat efektivitas diseminasi informasi
Sumber: Penulis, 2021

Khusus untuk media social, persepsi masyarakat sesuai dengan hasil dari penelitian. Instagram dan youtube menjadi dua jenis media sosial yang dianggap paling efektif dalam penyebarluasan informasi keistimewaan, diikuti oleh facebook pada posisi ketiga. Selanjutnya untuk mengukur kinerja akun social media Paniradya kaistimewaan, digunakan pendekatan sebagai berikut:

Tabel 6. Penilaian kinerja akun social media Paniradya Kaistimewaan

Penilaian	Skala
> Lembaga pemerintah lainnya, > non pemerintah	Sangat baik
< Lembaga pemerintah lainnya, > non pemerintah	Baik
> Lembaga pemerintah lainnya, < non pemerintah	Buruk
< Lembaga pemerintah lainnya, < non pemerintah	Sangat buruk

Sumber: Penulis, 2021

Tabel 7. Kinerja akun social media Paniradya Kaistimewaan

Media	Akun paniradya	akun pemerintah lainnya	akun non pemerintah	Skala
Youtube	19%	15%	13%	Sangat baik
Instagram	18%	18%	9%	Sangat baik
Facebook	10%	12%	14%	Sangat buruk
Twitter	7%	5%	7%	Buruk
Tiktok	5%	3%	6%	Buruk
Rata-Rata	12%	11%	10%	Sangat baik

Sumber: Penulis, 2021

Sosial media Paniradya kaistimewaan yang paling baik kinerjanya adalah youtube dengan nilai 19%. Instagram berada di urutan kedua dengan nilai 18% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Facebook mempunyai nilai yang cukup besar yaitu 10% namun kinerjanya sangat buruk, masih di bawah akun facebook Lembaga pemerintah lainn dan akun non pemerintah. Twitter dan tiktok menjadi sosial media yang paling jarang dilirik masyarakat dan berkinerja buruk. Secara rata-rata, kinerja akun media social paniradya kaistimewaan termasuk dalam kategori sangat baik. Efektivitas pada wilayah perkotaan dan pedesaan di DIY tersaji pada tabel 10:

Tabel 8. Jenis publikasi berdasarkan karakteristik wilayah pedesaan

Berdasarkan Karakteristik Wilayah			
Jenis Publikasi	Pedesaan		
	Kulon Progo	Gunungkidul	Rata-Rata
Koran	31%	37%	34%
Mulut Ke Mulut	24%	30%	27%
Tv	28%	13%	21%
Sosmed	15%	17%	16%
Radio	2%	3%	3%
Videotron	0%	0%	0%

Sumber: Penulis, 2021

Tabel 9. Jenis publikasi berdasarkan karakteristik wilayah perkotaan

Jenis Publikasi	Berdasarkan Karakteristik Wilayah			
	Perkotaan			
	Sleman	Kota	Bantul	Rata-Rata
Koran	43%	62%	48%	51%
Mulut Ke Mulut	17%	18%	22%	19%
Sosmed	18%	7%	16%	14%
Tv	20%	10%	11%	13%
Radio	2%	2%	2%	2%
Videotron	0%	1%	0%	0%

Sumber: Penulis, 2021

Masyarakat DIY baik di perkotaan maupun di pedesaan mengandalkan koran dan mulut ke mulut sebagai sarana penyebarluasan informasi. Pada masyarakat di pedesaan, TV menjadi pilihan selanjutnya untuk mendapatkan informasi keistimewaan. Pada masyarakat perkotaan, pilihan selanjutnya jatuh kepada media sosial. Radio dan videotron menjadi pilihan terakhir untuk mendapatkan informasi terkait keistimewaan.

E. KESIMPULAN

Tingkat efektivitas penyebarluasan informasi keistimewaan DIY berada pada rata-rata skala efektif 71%, dilihat dari 7 variabel. Hasil ini cukup menggembirakan meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih adanya ruang untuk perbaikan kedepan. Media komunikasi paling efektif untuk DIY adalah media cetak berupa koran, media online berupa youtube, dan media komunikasi langsung dari mulut ke mulut. Melihat hasil ini maka pemerintah DIY utamanya Paniradya Kaistimewan DIY perlu menekankan diseminasi informasi melalui platform-platform tersebut. Sebagai rekomendasi penelitian lebih lanjut, perlu diadakan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi diseminasi informasi keistimewaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosady, R. 1953- (pengarang). 2013. Kiat dan strategi kampanye public relations, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hevner, A. C., March, S., Park, J., dan Ram, S. 2004. Design Science in Information Systems. Research, Management Information Systems Quarterly, 28 (1), 77-105.
- Aras, D.W. 2003. Pengaruh pengadopsian teknologi baru terhadap peningkatan efektifitas dan kinerja pengembangan

bersama sistem informasi manajemen. Thesis S2. Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Subagyo, A.W. 2000. Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Yogyakarta: UGM.

Rosalina, I. 2012. Efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan pada kelompok pinjaman bergulir di desa mantren kec karangrejo kabupaten madetaan. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No. 01, Februari 2012.

Effendy, O.U. 2003. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

<https://www.epa.gov/fish-tech/8-assess-program-effectiveness-through-evaluation>

<https://www.govexec.com/management/2015/07/how-do-americans-measure-effectiveness-government/117814/>

<https://mrsc.org/Home/Explore-Topics/Management/Performance-Management/Performance-Measurement.aspx>

<https://www.sportphysio.ca/wp-content/uploads/formidable/10/government-program-evaluation-methods.pdf>

<https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2018/03/targeted-evaluations-can-help-policymakers-set-priorities>

<https://www.grosvenor.com.au/resources/how-assess-program-performance/>

<https://www.grosvenor.com.au/resources/program-evaluation-performance-monitoring/>

<https://www.epa.gov/fish-tech/8-assess-program-effectiveness-through-evaluation>

<https://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/alcohol/4-How%20to.pdf>

<https://nrsweb.org/sites/default/files/Planning-Guide-508.pdf>

<https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/evaluate/evaluation/framework-for-evaluation/main>

<https://www.republika.co.id/berita/o1boid284/riset-baca-koran-masih-budaya-orang-indonesia>

Creswell, J.W. (2004). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. New Jersey: Prentice Hall.

Creswell, J.W. (2008). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc.

SEMBILAN TAHUN PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN DIY URUSAN TATA RUANG

M. A. Fathoni

fathoni4@gmail.com

Perencana Ahli Muda Bappeda DIY

Abstrak

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan bagian dari sejarah pembentukan Republik Indonesia yang dikukuhkan melalui Undang-undang Nomor 03 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan Keistimewaan DIY terdiri dari 5 (lima) bidang urusan pemerintahan yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Pengelolaan kewenangan keistimewaan DIY sudah berjalan 9 (sembilan) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2021. Tulisan ini disusun untuk mengkaji implementasi keistimewaan DIY urusan tata ruang. Metode yang digunakan yaitu studi literatur dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keistimewaan DIY urusan tata ruang mengalami peningkatan dari aspek Perangkat Daerah pelaksana, jumlah program dan kegiatan, satuan ruang strategis, jenis kegiatan, dan pagu anggaran. Pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang berkontribusi terhadap aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan dan pelaksanaan urusan tata ruang di Pemerintah Daerah DIY antara tata ruang secara umum dengan tata ruang keistimewaan saling berintegrasi karena objek dan tujuan pada penyelenggaraan urusan tata ruang sama. Sasaran strategis urusan tata ruang secara umum dapat sejalan dengan urusan tata ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Kata kunci: Keistimewaan, Tata Ruang, Daerah Istimewa Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi (daerah otonom setingkat provinsi) tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. DIY memiliki status istimewa atau otonomi khusus, yang merupakan warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. DIY berperan besar dalam proses memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia sejak tanggal 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949.

Penggabungan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman ke dalam NKRI diproklamasikan oleh Sri Sultan Hamengku

Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dengan Amanat 5 September 1945, yang kemudian dikukuhkan dengan Piagam Presiden RI tentang penetapan kedudukan bagi penguasa tahta Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman tertanggal 19 Agustus 1945 yang diserahkan pada tanggal 6 September 1945.

DIY dibentuk dengan Undang-undang No. 3 Jo. No. 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. Pada pasal 4 disebutkan Kewenangan urusan pemerintahan DIY mengacu kepada pasal 23 dan 24 UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang memperlakukan sama dengan semua daerah lain di Indonesia. Artinya pengakuan status keistimewaan DIY belum diikuti dengan

pengaturan yang menyeluruh dan jelas mengenai kewenangan atas status keistimewaan tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada masa berlakunya UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sampai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keistimewaan DIY hanya berlaku pada kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Mengingat perubahan kedua UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, serta menimbang belum adanya pengaturan secara lengkap mengenai keistimewaan DIY pada UU No. 3 Jo No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955, maka diterbitkanlah UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pasal 7 ayat (2) diatur kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Selanjutnya pada pasal 42 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY berupa Dana Keistimewaan (Danais) yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah, dimulai sejak tahun 2013. Peraturan yang mendasari pelaksanaan keistimewaan DIY urusan tata ruang yaitu:

1. UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut:

1. Tahun 2013-2014, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Tahun 2015-2016, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Tahun 2017-2019, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Tahun 2020-2021, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 15/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan keistimewaan DIY urusan tata ruang harus memiliki manfaat bagi pembangunan daerah terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini disusun untuk mengkaji dampak dan manfaat dari sembilan tahun pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY urusan tata ruang.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur dan analisis kualitatif. Studi literatur dilakukan pada berbagai referensi serta analisa secara kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pembahasan yang bersifat deskriptif dengan menonjolkan proses dan makna (perspektif subjek). Pengambilan data primer dan sekunder dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan. Pengambilan data primer dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di satuan-satuan ruang strategis sebagai obyek penataan ruang melalui mekanisme dana keistimewaan. Data yang diperoleh kemudian dikompilasi dan dianalisis hingga mendapatkan gambaran implemmentasi keistimewaan DIY urusan tata ruang tahun 2013-2021.

C. TINJAUAN PUSTAKA

DIY merupakan provinsi atau daerah otonom setingkat provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Status ini merupakan sebuah warisan dari periode sebelum kemerdekaan. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi cikal bakal dari DIY. Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman didirikan tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo, saudara Sultan Hamengku Buwono II, kemudian bergelar Adipati Paku Alam I.

Kasultanan dan Kadipaten diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri.

Pemerintahan DIY merupakan gabungan dari Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Berlakunya undang undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mendudukan DIY sebagai daerah istimewa. Kewenangan kesitimewaan DIY terdiri dari 5 (lima) urusan yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Wujud dari keistimewaan yang diberikan ini salah satunya adalah adanya diberikannya dana keistimewaan (danais). Keistimewaaan urusan tata ruang DIY mencakup tiga aspek yang tidak terdapat di daerah lain sebagaimana tersaji pada Gambar 1.

Filosofi	Fisik	Peraturan
<ul style="list-style-type: none"> • Hamemayu Hayuning Bawana (konsep harmoni, keselamatan, kelestarian lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan mikro-makro kosmos) 	<ul style="list-style-type: none"> • Catur Gatra Tunggal (konsep pembangunan kota yang terdiri dari empat elemen) • Sumbu Filosofis (poros Tugu – Kraton – Panggung Krapyak) • Pathok Negoro 	<ul style="list-style-type: none"> • UU 13/2012 - Keistimewaan DIY • Perda DIY 1/2015 - Perubahan Atas Perda DIY 1/2013 - Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY • Perda DIY 2/2017 - Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten

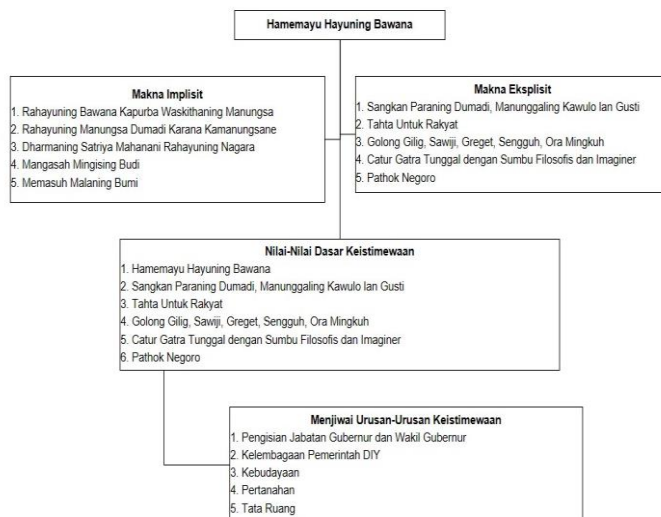
Gambar 1. Keistimewaan DIY urusan Tata Ruang

Aspek Filosofis

Dari aspek filosofis, DIY mempunyai banyak nilai keistimewaan. Nilai dasar dalam keistimewaan merupakan ketentuan-ketentuan budaya yang menjadi ruh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Naskah Babon Perda (2013) disebutkan mulanya nilai dasar ini terdiri dari 11 kata kunci filosofi yang digali dari beberapa sumber tekstual dan pendapat para pakar, yaitu:

- I. Hamemayu Hayuning Bawana (konsep harmoni, keselamatan, kelestarian lingkungan, social budaya, ekonomi, dan mikro-makro kosmos)
- II. Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning Manungsa (konsep keletarian alam dan kebijaksanaan manusia, teknologi ramah lingkungan)
- III. Rahayuning Manungsa Dumadi Karana kamanungsane (konsep humanisme)
- IV. Dharmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara (konsep kepemimpinan dan profesionalisme kinerja)
- V. Mangasah Mingising Budi (konsep kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial).
- VI. Memasuh Malaning Bumi (konsep amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah hal-hal yang merusak citra dan jati diri)
- VII. Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti (konsep spiritual, kepemimpinan dan solidaritas sosial)
- VIII. Tahta kagem Rakyat (konsep kepemimpinan pro rakyat)
- IX. Golong-gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh (konsep kesatuan komunitas, etos kerja, keteguhan hati, dan tanggung jawab sosial)
- X. Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak dan Sumbu Imajiner Gunung Merapi-Laut Selatan (konsep pembangunan ruang kota yang terdiri dari empat elemen dengan sumbu imajiner sebagai konsep perjalanan manusia mendekati kepada Tuhan dari lahir sampai meninggal)
- XI. Pathok Negara (konsep tata ruang dan teritori historis-simbolis)

Dari beberapa nilai dasar filosofis tersebut, Hamemayu Hayuning Bawana menjadi filosofi payung sebagaimana tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Nilai-Nilai Dasar Keistimewaan DIY

Sumber: Naskah Babon Perda (2013), diolah penulis

Aspek Fisik Penataan Ruang

Dalam hal fisik penataan ruang terdapat beberapa keistimewaan yang ada di DIY ini yaitu adanya Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Filosofis Tugu – Kraton – Panggung Krapyak dan Sumbu Imaginer Gunung Merapi – Laut Selatan (konsep tata ruang) dan Pathok Negara (konsep tata ruang dan teritori historis-simbolis) dan Pathok Negoro. Catur Gatra Tunggal adalah konsep pembangunan sebuah kota yang terdiri dari empat elemen:

(1) Karaton sebagai pusat pemerintahan.

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan tempat kediaman sultan beserta keluarganya dan menjadi simbol pusat kekuasaan Kasultanan Yogyakarta.

(2) Masjid sebagai pusat keagamaan/religi.

Masjid Gedhe Kauman melambangkan aspek religius. Masjid Gedhe Kauman merupakan tempat ibadah kasultanan di Keraton Yogyakarta. Secara simbolis Masjid Gedhe menunjukkan bahwa Sultan tidak hanya sebagai penguasa pemerintahan atau *senapati ing ngalaga*, tapi juga berperan sebagai pemimpin di bumi atau *sayidin panatagama khalifatullah*.

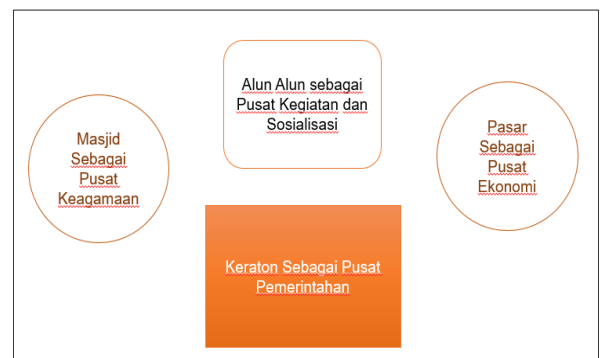
(3) Alun-alun sebagai pusat kegiatan dan sosialisasi kemasyarakatan.

Alun-alun Lor (utara) terletak di depan Keraton Yogyakarta, sedangkan Alun-alun Kidul (selatan) berada di belakang Keraton Yogyakarta. Di tengah kedua alun-alun tersebut, masing-masing terdapat sepasang pohon beringin yang dipagari keliling, sehingga disebut ringin kurung. Pohon beringin yang ada di tengah Alun-alun Utara sebelah timur

bernama Kyai Janadaru/Wijayadaru dan di sebelah barat bernama Kyai Dewandaru. Kedua pohon beringin melambangkan konsep Manunggaling Kawulo lan Gusti dan prinsip Hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan tuhan atau *hablun min annas* dan *hablun min Allah*.

(4) Pasar sebagai pusat perdagangan dan perekonomian.

Pasar Beringharjo menyimbolkan pusat perekonomian masyarakat. Pasar merupakan salah satu komponen utama di dalam tata kota lama. Lahirnya pasar seiring dengan keberadaan keraton. Pasar yang berada di kota dan menjadi pusat perekonomian di lingkungan keraton disebut Pasar Gedhe. Pada masa Sultan Hamengku Buwono I pendirian Pasar Gedhe berada di sebelah utara Alun-alun Utara yang dikenal dengan nama Pasar Beringharjo.

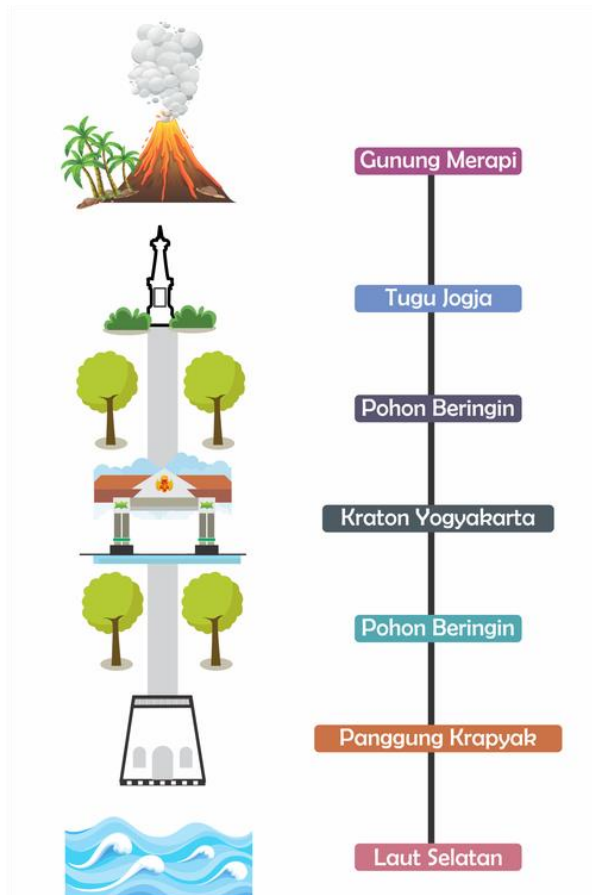


Gambar 3. Ilustrasi Catur Gatra Tunggal

Sumbu filosofis adalah sumbu garis lurus yang menghubungkan antara Tugu Pal Putih, Keraton Yogyakarta, dan Panggung Krapyak. Tugu pal putih, Keraton dan Panggung Krapyak tersebut adalah *landmark* yang ada di Yogyakarta. Sumbu filosofis terkait keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Sumbu filosofis melambangkan *Sangkaning Dumadi* yakni proses perjalanan manusia menuju eksistensi. Sepanjang jalur sumbu filosofis tersebut terdapat beberapa titik yang melambangkan fase kehidupan.

Diawali dengan pertemuan antara *wiji* (benih) yang merupakan proses terjadinya manusia (*dumadi*) dilambangkan oleh Panggung Krapyak yang berupa bentuk yoni dan bentuk Tugu Pal Putih yang berupa bentuk lingga. Selain itu Panggung Krapyak di selatan Alun-alun Kidul Yogy juga melambangkan fase kelahiran; Keraton

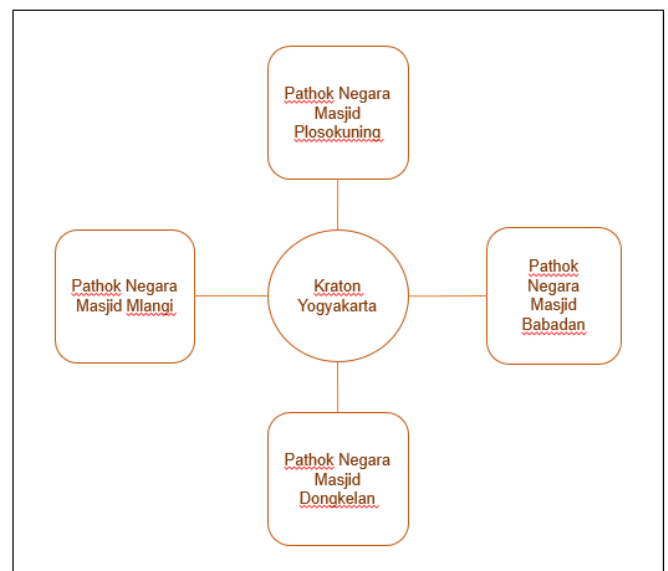
sebagai fase pertumbuhan manusia muda; Alun-alun Lor sebagai fase masuknya manusia muda ke manusia dewasa; Jalan Malioboro sebagai fase kejayaan manusia dewasa dalam hal kehidupan pribadi dan karir; Jalan Margo Utomo sebagai fase masuknya manusia dewasa ke masa tua; dan Tugu Pal Putih yang melambangkan batu nisan, sebagai fase meninggalnya manusia dari kehidupan duniawi dan masuk ke alam "kehidupan" berikutnya.



Gambar 4. Sumbu Filosofis dan Sumbu Imajiner

Sumbu imajiner melambangkan *Paraning Dumadi* bermakna perjalanan manusia kembali ke Sang Penguasa yaitu Laut Selatan yang melambangkan air sebagai sumber kehidupan manusia dan Gunung Merapi di utara Yogya sebagai tempat terakhir jiwa manusia akan bersemayam, yaitu surga. Keraton yang berada di tengah melambangkan manusia yang telah mapan dan dewasa. Pada akhirnya manusia akan mati dan kekal di akhirat yang dilambangkan Lampu Kyai Wiji di Gedhong Prabayeksa Keraton yang tak pernah padam sejak zaman Sultan HB I.

Laut selatan juga melambangkan perempuan dan Gunung Merapi melambangkan laki-laki. Hal ini tampak sama dengan hubungan Panggung Krapyak dan Tugu Pal Putih. Keraton yang berada di tengah-tengahnya menjadi penghubung dan penyeimbang di antara keduanya. Secara simbolis, garis ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta (*Ḥablun min Allāh*), hubungan manusia dengan sesamanya (*Ḥablun min an-Nās*), serta manusia dengan alam termasuk lima unsur pembentuknya yakni api (*dahana*) dari Gunung Merapi, tanah (*bantala*) dari Bumi Ngayogyakarta, air (*tirta*) dari Laut Selatan, angin (*maruta*), dan langit (*ether*). Konsep ini yang kemudian menjadi salah satu dasar keistimewaan penataan ruang DIY.



Gambar 5. Ilustrasi Masjid Pathok Negero

Keistimewaan selanjutnya dari tata ruang Yogyakarta adalah adanya Pathok Negero. Masjid Pathok Negara adalah predikat untuk empat masjid yang dikelola dan dibina oleh pihak Karaton Yogyakarta sebagai pembina keimanan masyarakat Yogyakarta, sekaligus membantu pelaksanaan upacara-upacara keagamaan karaton. Empat masjid pathok negara bertempat di empat penjuru mata angin. Pathok berarti sesuatu yang ditancapkan sebagai batas atau penanda, dapat juga berarti aturan, pedoman, atau dasar hukum. Pathok negara bisa diartikan masjid sebagai batas *Kuthanegara* (Ibukota Negara) dengan *Negara Agung* (wilayah keseluruhan Negara) serta sebagai pedoman bagi pemerintahan Negara. Keempat

masjid pathok negara juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, tempat upacara atau kegiatan keagamaan, bagian dari sistem pertahanan sekaligus sebagai tempat peradilan surambi atau peradilan syariah pada masa pemerintahan kesultanan Yogyakarta.

Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Aspek keistimewaan DIY dilihat dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- I. UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-Undang ini menegaskan DIY sebagai pemerintah daerah yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan Keistimewaan DIY. Undang-Undang ini mengatur pendanaan Keistimewaan yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
- II. Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda DIY No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY.
Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan filosofi seperti yang telah dijelaskan diatas. Selain itu dijelaskan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang termasuk tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Penataan ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dan berbasis kawasan.
- III. Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
Peraturan ini mengatur mengenai tata ruang serta Satuan Ruang Strategis (SRS) tanah kasultanan dan kadipaten. SRS Kasultanan/Kadipaten yaitu satuan ruang tanah kasultanan/kadipaten yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana, dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya,

kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan/atau kelestarian lingkungan. SRS ini terdiri dari 14 SRS Kasultanan yaitu: Karaton, Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak, Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Masjid Pathok Nagoro, Gunung Merapi, Pantai Samas – Parangtritis, Kerto – Pleret, Kotabaru, Candi Prambanan - Candi Ijo, Sokoliman, Perbukitan Menoreh, Karst Gunungsewu, dan Pantai Selatan Gunungkidul; serta 4 SRS Kadipaten yaitu: Puro Pakualaman, Makam Girigondo, Pusat Kota Wates, dan Pantai Selatan Kulon Progo. Arahan tata ruang pada 18 SRS ini tersaji pada tabel 2.

Amanah bagi pemerintah daerah DIY untuk memfasilitasi kasultanan dan kadipaten tersebut tertuang pada Pasal 43 ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Bentuk fasilitasi Pemda DIY kepada kasultanan dan kadipaten tertuang pada Pasal 44 Perda Nomor 2 Tahun 2017, yaitu:

1. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
2. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
3. Penyusunan rencana induk pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
4. Pelaksanaan Penataan Ruang;
5. Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Rencana Tata Ruang;
6. Penanganan sengketa atas pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
7. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan Ruang;
8. Pengendalian pemanfaatan ruang; dan
9. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

Arahan Tata Ruang Zona pada Inti Dan Penyangga berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Arahan Tata Ruang Zona Inti Dan Penyangga berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten

SRS	Zona inti	Zona penyangga	Tidak diperbolehkan
1. Karaton	1.kegiatan ekonomi dan wisata dengan tidak mengubah bentuk bangunan cagar budaya 2.kegiatan industri rumah tangga yang tidak berdampak pencemaran lingkungan; 3.kegiatan di alun-alun utara dengan memperhatikan fungsi alun-alun utara sebagai entitas dari catur gatra tunggal; 4.kegiatan penunjang wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	1.kegiatan ekonomi; 2. Wisata budaya dan sejarah; 3. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan 4. Bangunan pendukung fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.	1.kegiatan membangun bangunan bertingkat dan/atau bangunan dengan ketinggian melebihi tinggi bangunan siti hinggil pada zona inti; 2.kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya pada kawasan penyangga;
2. Makam Raja-Raja Di Imogiri	Rehabilitasi/ pengembangan bangunan makam imogiri yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip pelestarian cagar budaya;	1.fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kcb dan ilmu pengetahuan; dan 2. Bangunan baru dengan menggunakan gaya arsitektur tradisional Jawa.	1.membangun bangunan baru pada akses utama menuju makam imogiri; 2.merubah bentuk bangunan rumah tradisional pada kawasan penyangga, kecuali telah mendapatkan izin dari instansi yang membidangi kebudayaan; dan 3. Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
3. Sumbu Filosofi	Pemanfaatan ruang di kanan dan kiri sumbu filosofi menyesuaikan dengan makna dari sumbu filosofi;	1. Ketinggian bangunan mengikuti kemiringan sudut 45o (empat puluh lima derajat) dari as sumbu filosofi; 2. Ketinggian bangunan paling tinggi 18 (delapan belas) meter pada area yang berjarak 60 (enam puluh) meter diukur dari batas ruang milik jalan; dan 3. Bangunan baru menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Yogyakarta.	A.membangun bangunan baru yang melintang di atas jalan pada sumbu filosofi; B.membangun bangunan di kanan dan kiri sumbu filosofi dengan ketinggian yang akan mempengaruhi dan/atau menghilangkan nilai budaya sumbu filosofi.
4. Masjid Dan Makam Raja Mataram Di Kotagede	a. Kegiatan ekonomi skala kecil; b. Wisata budaya dan sejarah; c. <i>Home stay</i> ; d. Ruang bawah tanah untuk fasilitas umum; dan e. Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.		Pembangunan hotel dan bangunan baru dengan arsitektur yang tidak selaras dengan arsitektur kawasan
5. Masjid Pathok Negoro	a. Kegiatan ekonomi skala masyarakat; b. Wisata budaya dan sejarah; dan c. Pendidikan dan pengembangan budaya.		Membangun bangunan baru dengan arsitektur yang tidak selaras dgn arsitektur kawasan
6. Gunung Merapi	a. Kegiatan budi daya hutan; b. Kegiatan budi daya pertanian; c. Wisata alam; d. Pendidikan dan penelitian; e. Budi daya permukiman dengan syarat penerapan prinsip <i>zero delta q</i>		A. kegiatan pembangunan dengan intensitas sedang sampai tinggi; b.

SRS	Zona inti	Zona penyangga	Tidak diperbolehkan
	<i>policy</i> ; f. Kegiatan budi daya terbangun dengan syarat penerapan teknologi yang mampu mengganti daya resap air ke permukaan tanah; dan g. Pengembangan sistem mitigasi bencana		Penambangan terbuka yang berpotensi merubah bentang alam; c. Kegiatan yang dapat merubah bentang alam; dan d. Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung
7. Samas – Parangtritis	a. Pembangunan pelindung pantai; b. Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata diarahkan ke pantai samas; c. Pembuatan jalan sebagai pembatas sempadan pantai; d. Penangkapan hasil laut; e. Pangkalan pendaratan ikan; f. Pengembangan energi terbarukan; g. Pendidikan dan penelitian; h. Pariwisata terbatas dan minat khusus; i. Pembudidayaan terbatas pada wilayah diluar sempadan pantai; j. Pembangunan fasilitas umum; dan k. Pengembangan sistem mitigasi bencana		A. Pembangunan hotel dan pengembangan fasilitas pendukung pariwisata di pantai parangtritis; b. Bangunan yang berpotensi merusak ekosistem pantai; dan c. Kegiatan menutup akses publik ke pantai
8. Kerto – Pleret	a. Wisata budaya dan sejarah; b. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; c. Bangunan pendukung fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan d. Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.		A. Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan b. Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
9. Kotabaru	a. Ruang terbuka hijau; b. Permukiman; c. Bangunan pendukung fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; d. Perdagangan dan jasa; dan e. Sarana pelayanan umum; f.bangunan baru menggunakan gaya arsitektur <i>indische</i> dan kolonial		Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
10. Candi Prambanan – Candi Ijo	a. Wisata budaya dan sejarah; b. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; c. Bangunan pendukung fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan d. Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.		Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya
11. Sokoliman	a. Wisata budaya dan sejarah; b. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; c. Edukasi kepurbakalaan dan wisata minat khusus; d. Permukiman perdesaan; dan e. Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan.		Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan
12. Perbukitan Menoreh	a. Kegiatan budi daya hutan; b. Penanaman tanaman hijau alamiah; c. Permukiman perdesaan; d. Pertanian; e. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; f. Pembangunan pemantau bencana; dan g. Pemasangan sistem peringatan dini.		Kegiatan pertambangan, bangunan, dan pengembangan kegiatan baru yang berpotensi merusak bentang alam
13. Karst Gunungsewu	a. Penanaman tanaman hijau alamiah; b. Wisata alam; c. Penelitian; d. Pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; e. Kegiatan permukiman kepadatan rendah; f. Kegiatan budi daya terbatas untuk penduduk asli; dan g. Sarana prasarana umum.		Kegiatan pertambangan dan pengembangan kegiatan baru yang berpotensi merusak bentang alam karst
14. Pantai Selatan Gunungkidul	a. Pembangunan pelindung pantai; b. Konservasi ekosistem karst; c. Pendidikan dan penelitian; d. Pariwisata tanpa merubah bentang alam pantai; e. Penangkapan hasil laut; f. Pangkalan pendaratan ikan; g. Pembudidayaan terbatas di luar sempadan pantai; h. Tempat pelelangan ikan; i. Pelabuhan; j. Permukiman perdesaan; k. Pengembangan energi terbarukan; dan l. Pengembangan sistem mitigasi bencana.		Kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem pantai dan kegiatan menutup akses publik ke pantai

SRS	Zona inti	Zona penyangga	Tidak diperbolehkan
15. Puro Pakualaman	1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi kerakyatan yang mendukung puro pakualaman; dan 2. Kegiatan kebudayaan dan keagamaan.	1. Ruang terbuka hijau; 2. Permukiman; dan 3. Bangunan pendukung fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.	1. Pasar modern; 2. Kegiatan industri yang berupa pabrik; 3. Bangunan dengan ketinggian yang melebihi bangsal sewatama yaitu 13 (tiga belas) meter; dan 4. Kegiatan yang tidak selaras dengan nilai dan fungsi puro pakualaman. 5. Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kcb; dan 2. Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kcb dan ilmu pengetahuan.
16. Makam Girigondo	A. Pemakaman dan kegiatan adat dan tradisi; b. Pelestarian rumah tradisional di sekitar makam girigondo; c. Permukiman budaya; d. Pariwisata; e. Budi daya pertanian; f. Kegiatan perdagangan dan jasa; dan g. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; f. Bangunan baru menggunakan gaya arsitektur jawa dan/atau klasik		Kegiatan pembangunan baru yang tidak sesuai dengan fungsi dari zona inti satuan ruang strategis makam girigondo dan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi kawasan
17. Pusat Kota Wates	A. Pendukung kerajaan mataram; b. Heritage peninggalan kolonial belanda; c. Pusat pemerintahan kabupaten; d. Ruang terbuka hijau; e. Permukiman; f. Bangunan pendukung cagar budaya; dan g. Perdagangan dan jasa dengan kepadatan sedang dan tinggi diarahkan berada di dekat titik transit moda transportasi.		Kegiatan industri besar dan menengah serta kegiatan pertambangan
18. Pantai Selatan Kulon Progo	A. Pembangunan pelindung pantai; b. Pertahanan dan keamanan; c. Pangkalan pendaratan ikan; d. Pendidikan dan penelitian; e. Pariwisata terbatas dan minat khusus; f. Kegiatan penambangan pasir besi; g. Pembangunan fasilitas umum; dan h. Pengembangan sistem mitigasi bencana.		Kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem pantai dan kegiatan menutup akses publik ke pantai

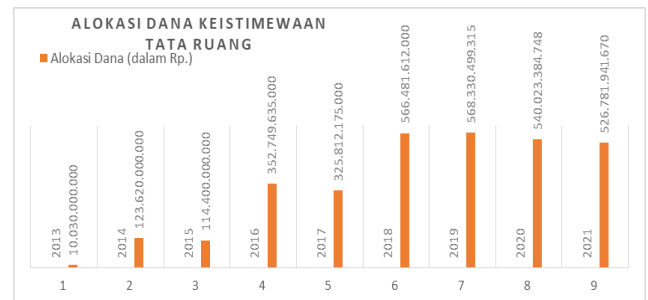
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan keistimewaan DIY urusan tata ruang dapat dilihat dari OPD pelaksana, besarnya anggaran dan jenis belanja, keluaran fisik serta dampak dan manfaat bagi masyarakat. Kewenangan dalam urusan keistimewaan ditugaskan kepada:

- SKPD Pemerintah Daerah DIY;
- Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
- Pemerintah Kalurahan

Penugasan urusan keistimewaan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.



Gambar 6. Alokasi Dana Keistimewaan DIY Urusan Tata Ruang tahun 2013-2021

Sumber: Bappeda DIY 2013 – 2021

Sebagaimana tersaji pada gambar 5, besarnya alokasi dana keistimewaan DIY urusan tata ruang ini mengalami tren kenaikan. Pada tahun pertama pelaksanaan yaitu 2013 mendapatkan alokasi Rp. 10.030.000.000,00 yang kemudian naik lebih dari sebelas kali lipat (yaitu 1.133%) pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 123.620.000.000,00. Selanjutnya sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 sebanyak 7% menjadi sebesar Rp. 114.000.000.000,00 dan kembali naik lebih dua dari dua kali lipat (yaitu 208%) pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 352.749.635.000,00. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan 8% menjadi sebesar Rp. 325.812.175.000,00 dan kenaikan yang cukup besar yaitu 74% pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 566.481.612.000,00. Besaran alokasi ini kemudian cenderung stabil pada tahun-tahun selanjutnya yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,3% pada tahun 2019 menjadi Rp. 568.330.499.315,00, penurunan 5 % pada tahun 2020 menjadi Rp. 540.023.384.748,00 serta penurunan 2 % pada tahun 2021 menjadi Rp. 526.781.941.670,00.

Pada tahun 2013, pelaksanaan keistimewaan DIY urusan tata ruang terdiri dari 4 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 Organisasi Perangkat Dinas (OPD) dengan pagu anggaran Rp. 10.030.000.000,00. Pada tahun pertama pelaksanaan ini terdapat 4 program yaitu: Program penataan ruang, Program penataan kawasan budaya, Program penataan ruang keistimewaan dan Program pengembangan transportasi perkotaan dengan OPD pelaksana yaitu Dinas PUPESDM DIY, Bappeda DIY, dan Dinas Perhubungan DIY.

Tabel 3. Program & OPD Pengampu Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2013-2020

Tahun	Program	OPD
2013	3 Program 1. Penataan Ruang Keistimewaan DIY 2. Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan 3. Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan 16 kegiatan	3 OPD (Pemda DIY)
2014	3 Program 1. Penataan Ruang Keistimewaan DIY 2. Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan 3. Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan 32 kegiatan	2 OPD (Pemda DIY)
2015	3 Program 1. Penataan Ruang Keistimewaan DIY 2. Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan 3. Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan 60 kegiatan	10 OPD (Pemda DIY & Kab /Kota)
2016	3 Program 1. Penataan Ruang Keistimewaan DIY 2. Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan 3. Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan	11 OPD (Pemda DIY & Kab /Kota)
2017	3 Program 1. Penataan Ruang Keistimewaan DIY 2. Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan 3. Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan 35 kegiatan	14 OPD (Pemda DIY & Kab /Kota)
2018	5 Program 1. Perencanaan Tata Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 2. Pemanfaatan Tata Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 4. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Tata Ruang 5. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 19 kegiatan	15 OPD (Pemda DIY & Kab /Kota)
2019	5 Program 1. Perencanaan Tata Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 2. Pemanfaatan Tata Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 4. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Tata Ruang 5. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 19 kegiatan	18 OPD (Pemda DIY & Kab /Kota)
2020	3 Program 1. Perencanaan Tata Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 2. Pemanfaatan Tata Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 17 kegiatan	15 OPD (Pemda DIY & Kab /Kota)
2021	1 Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 3 kegiatan	13 OPD (Pemda DIY & Kab /Kota)

Sumber: Bappeda DIY dan Paniradya, beberapa tahun

Kegiatan tahun 2013 dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu menyiapkan kerangka umum kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan dan tata ruang untuk tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY dan bersama DPRD DIY membentuk Perda tentang tata cara pembentukan Perda.

Pada tahapan awal ini, dilakukan fasilitasi penyusunan peraturan mengenai dana keistimewaan untuk urusan tata ruang. Dalam fasilitasi ini diharapkan adanya gambaran mengenai seperti apa keistimewaan urusan tata ruang ini akan dijalankan. Perda ini nantinya akan disahkan pada tahun 2017. Selain itu, dilakukan tahap awal penataan malioboro dengan agenda penjaringan masyarakat serta penataan kawasan di gunungkidul. Terdapat juga kegiatan fasilitasi perencanaan tata ruang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan urusan tata ruang baru memulai tahap awal untuk

perencanaan keistimewaan DIY urusan tata ruang jangka panjang, serta inisiasi penataan kawasan malioboro sebagai *landmark* DIY.

Tahun 2014 atau tahun kedua pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 123.620.000.000,00. Program dan kegiatan mulai fokus pada tanah kasultanan dan kadipaten sesuai dengan amanat UU Nomor 13 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta yaitu urusan tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Terdapat 3 program dan 32 kegiatan yaitu Program penataan kawasan budaya pendukung keistimewaan DIY, Program penataan ruang keistimewaan, Program pengembangan transportasi berbasis keistimewaan dengan dua OPD pengampu yaitu DPUP ESDM DIY dan Dinas Perhubungan. Pada tahun ini dilakukan sayembara untuk desain penataan kawasan malioboro dan sekitarnya. Selain itu juga berfokus pada penataan kawasan tanah kasultanan dan kadipaten baik penyusunan dokumen perencanaan maupun penataan fisik. Kawasan kasultanan dan kadipaten yang menjadi lokasi kegiatan danais tahun 2014 yaitu Imogiri, Nglanggeran, Ambarbinangun, Karaton, Puro Pakualaman, Kotagede, Gunung Gambar, dan Pantai Depok.

Tahun 2015, pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang sebesar Rp. 114.400.000.000,00. Tahun ini terdapat 4 program yaitu penataan ruang keistimewaan dengan kegiatan yang didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan yang ada di kawasan strategis keistimewaan yaitu peraturan zonasi, RDTR, RTBL, dan RTRW. Hal ini juga dilakukan oleh kabupaten dan kota dimana mereka mulai menyusun dokumen perencanaan seperti rencana induk dan RTBL pada. Pada program penataan kawasan budaya pendukung keistimewaan terdapat beberapa kegiatan fisik penataan kawasan yaitu lanjutan penataan kawasan sumbu filosofi, kraton, puro pakualaman, dan kotagede sebagai kawasan strategis dan kawasan keistimewaan. Untuk program pengembangan transportasi berbasis keistimewaan terdapat kegiatan pengadaan apill, dan kajian-kajian yang terkait dengan aspek perhubungan.

Tahun 2016, pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 352.749.635.000,00. Tahun ini terdapat 3 program yaitu Program penataan ruang keistimewaan DIY, Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan, Program Penataan Kawasan Budaya

Pendukung Keistimewaan. Tahun ini melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya yaitu penyusunan dokumen perencanaan Naskah Akademik dan Raperda PZ pada kawasan-kawasan strategis keistimewaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang, penyusunan raperdais yang akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan keistimewaan pada tahun-tahun berikutnya serta penetapan kawasan keistimewaan. Kabupaten/kota mulai melaksanakan penyusunan DED dan *master plan* pembangunan kawasan strategis kabupaten dan penataan fisik kawasan.

Tahun 2017, pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang memiliki pagu sebesar Rp. 325.812.175.000. Pada tahun ini terdapat 3 program yaitu: Program penataan ruang keistimewaan DIY, Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan, dan Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan. Pada tahun ini dilaksanakan penyusunan dokumen perencanaan di beberapa kawasan serta dimulainya pembangunan infrastruktur dengan dana besar di DIY menggunakan anggaran keistimewaan yaitu Jalur Jalan Lingkar Selatan atau JJLS. Kegiatan di kabupaten/kota didominasi dengan pembangunan fisik kawasan. Mulai terlihat konsistensi pelaksanaan kegiatan dari tahun sebelumnya dan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten. Kekurangan pelaksanaan keistimewaan sampai tahun ini adalah belum terdapat *road map* pembangunan di masing-masing kawasan. Hal ini diatasi melalui pengesahan Perdas 2/2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang mulai diacu untuk perencanaan tahun 2018.

Pada tahun 2018, pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 566.481.612.000,00 dan memasuki babak baru yaitu pelaksanaan Perdas 2/2017 serta mulai disusun Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) SRS Keistimewaan Kasultanan dan Kadipaten. Pasca terbitnya Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapuskan Kawasan Strategis Provinsi maka yang semula akan disusun Peraturan Daerah Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) SRS Keistimewaan Kasultanan dan Kadipaten diubah menjadi penyusunan Peraturan Gubernur **Strategi Pengembangan Wilayah (SPW)** SRS Kasultanan dan Kadipaten. Penyusunan aturan penataan ruang keistimewaan tersaji pada tabel 4.

Tabel 4. Penyusunan aturan penataan ruang keistimewaan.

SRS	Aturan penataan ruang
1. Karaton	1. SPW SRS (2018) 2. Rencana Induk (RI) (2014) 3. RTBL (2015)
2. Makam Raja-Raja di Imogiri	1. SPW SRS (2020) 2. RI (2015) 3. RTBL (2014, 2015, 2020)
3. Sumbu filosofi	1. SPW SRS (2020) 2. RI (2015) 3. RTBL (2014)
4. Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1. SPW SRS (2018) 2. RI (-) 3. RTBL (2015, 2019)
5. Masjid Pathok Negoro	1. SPW SRS (2019) 2. RI (2018) 3. RTBL (2015)
6. Gunung Merapi	1. SPW SRS (2021) 2. RI (2015, 2018) 3. RTBL (-)
7. Samas – Parangtritis	1. SPW SRS (2019) 2. RI (2014, 2020) 3. RTBL (2015, 2019, 2021)
8. Kerto – Pleret	1. SPW SRS (2021) 2. RI (-) 3. RTBL (2015)
9. Kotabaru	1. SPW SRS (2018) 2. RI (2015) 3. RTBL (2015)
10. Candi Prambanan – Candi Ijo	1. SPW SRS (2020) 2. RI (2016) 3. RTBL (-)
11. Sokoliman	1. SPW SRS (2020) 2. RI (2018) 3. RTBL Bejiharjo(2016)
12. Perbukitan Menoreh	1. SPW SRS (2020) 2. RI Suroloyo Sendangsono (2015) RI Kiskendo Sermo Wates (2020) 3. RTBL (2015, 2018)
13. Karst Gunungsewu	1. SPW SRS (2019) 2. RI (2015, 2018) 3. RTBL (2014)
14. Pantai Selatan Gunungkidul	1. SPW SRS (2020), Wediombo (2018) 2. RI (2019) 3. RTBL (2016)
15. Puro Pakualaman	1. SPW SRS (2018) 2. RI (2014) 3. RTBL (2015)
16. Makam Girigondo	1. SPW SRS (2018) 2. RI (-) 3. RTBL (2015)
17. Pusat Kota Wates	1. SPW SRS (2020) 2. RI (-) 3. RTBL (-)
18. Pantai Selatan Kulon Progo	1. SPW SRS (2021) 2. RI (2021) 3. RTBL (-)

Tahun 2019, pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 568.330.499.315,00. Kegiatan lebih terarah dengan adanya perda 2/2017. Program yang dilaksanakan pada tahun ini yaitu Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis, dan Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang. Kegiatan yang dilaksanakan tahun ini masih berupa lanjutan tahun sebelumnya yaitu penyusunan rencana rinci tata ruang, RTBL, dan rencana induk di berbagai satuan ruang strategis. Kemudian kegiatan pemanfaatan ruang yang didominasi oleh kegiatan pembangunan fisik. Selanjutnya adalah kegiatan yang didominasi oleh pengendalian tata ruang yang diisi dengan pengawasan pemanfaatan ruang terutama di satuan-satuan ruang strategis.

Tahun 2020, pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 540.023.384.748,00. Pelaksanaan kegiatan terdampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus ditunda pelaksanaannya atau tidak bisa dilaksanakan. Pada tahun ini kegiatan yang dilaksanakan hampir sama dengan tahun sebelumnya yaitu dalam kerangka perancaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang tersebar di 18 SRS Kasultanan dan Kadipaten yang ada.

Tahun 2021, pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang mendapatkan pagu anggaran Rp. 526.781.941.670,00. Pada tahun ini masih terjadi hambatan pada pelaksanaan kegiatan dengan adanya covid-19 yang belum usai. Kegiatan yang dilakukan berupa lanjutan dari kegiatan yang sebelumnya dengan rincian kegiatan fokus kepada Perencanaan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

E. KESIMPULAN

Implementasi pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selama sembilan tahun pelaksanaan keistimewaan DIY urusan tata ruang, telah dihasilkan dokumen perencanaan ruang berupa Rencana Induk (RI), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), serta Strategi Pengembangan Wilayah (SPW)

yang akan diintegrasikan ke dalam review RTRW DIY pada tahun 2022. Pemanfaatan ruang pada 18 SRS Kasultanan dan Kadipaten diantaranya berupa pembangunan fisik yang dilaksanakan di DIY seperti pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan penataan sumbu filosofis, pembangunan yang dilaksanakan di Kawasan Malioboro, Karaton, Pantai Selatan, dan satuan-satuan ruang strategis lainnya. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang mengalami banyak dinamika mulai dari jumlah program dan kegiatan, satuan ruang strategis, jenis kegiatan, pagu anggaran dan OPD pelaksana. Pengaturan dan pelaksanaan urusan tata ruang secara umum dengan tata ruang keistimewaan saling berintegrasi karena objek dan tujuan pada penyelenggaraan urusan tata ruang sama. Sasaran strategis urusan tata ruang secara umum dapat sejalan dengan urusan tata ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten. Secara bertahap penurunan kemiskinan terus berlangsung, nilai IPM terus meningkat, pertumbuhan ekonomi naik dengan stabil serta inflasi dapat ditekan. Pembangunan Satuan Ruang Strategis (SRS) keistimewaan yang berdampak positif bagi masyarakat Yogyakarta dan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan sekaligus konservasi.

F. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi terhadap sembilan tahun pelaksanaan keistimewaan DIY urusan tata ruang dapat dibagi menjadi aspek yuridis, integrasi perencanaan dan infrastruktur.

Aspek Yuridis

1. Dibutuhkan penetapan Peta Delineasi Kawasan 18 SRS Kasultanan dan Kadipaten melalui Pergub. Delineasi diperlukan agar ada kejelasan lokasi kegiatan yang akan diusulkan oleh OPD Pelaksana.
2. Perlu kejelasan kepemilikan aset-aset di kawasan SRS dan pengelolanya. Terdapat aset di Kawasan SRS yang kepemilikannya ada di Pemda DIY, namun pemeliharaan dan pengelolaannya ada di Pemkot/Pemkab.
3. Penataan Kawasan Destinasi Wisata di Lokasi SRS belum ada dasar penataan, tanah yang belum *clean and clear*, serta *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan) dan *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan) atau CHSE di kawasan destinasi wisata.

Aspek Integrasi Perencanaan

1. Keselarasan kebijakan perencanaan kegiatan kawasan SRS dan non SRS. Masing-masing Kawasan baik SRS maupun Non SRS ada kebijakannya sendiri – sendiri, sehingga perlu disinkronkan agar kegiatan di Kawasan SRS dan non SRS saling mendukung, melengkapi dan terintegrasi.
2. Penetapan Pergub Rencana Tata Ruang 18 SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. RTR 18 SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diperlukan sebagai dasar penataan ruang keistimewaan.
3. Pendampingan Pengusulan Program dan kegiatan sesuai muatan Rencana Tata Ruang 18 SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Usulan Program dan Kegiatan yang diajukan OPD Pemda DIY maupun OPD Pemkab/Pemkot belum sepenuhnya sesuai dengan Program Prioritas Gubernur dan / atau Rencana Tata Ruang 18 SRS Kasultanan dan Kadipaten.
4. Pencegahan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR/SPW di 18 SRS Kasultanan dan Kadipaten harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang melalui pengwasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Pelanggaran pemanfaatan ruang di SRS perlu ditindak dengan tegas, supaya ruang yang kita pakai bersama dapat digunakan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah tersusun, sehingga tujuan untuk mendapatkan ruang yang aman, nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan dapat diwujudkan.
6. Implementasi Roadmap penanganan SRS dan penyusunan Panduan Rencana Induk SRS. Pentahapan yang jelas untuk perencanaan setiap SRS dan adanya panduan penyusunan rencana induk untuk semua.
7. Keberlanjutan rencana Pembangunan Pedestrian Plengkung Gading-Panggung Krapyak. Pada tahun 2019 telah disusun Masterplan dan DED Penataan Kawasan Plengkung Gading-Panggung Krapyak oleh Dians PUPESDM DIY. Kondisi pedestrian yang ada di sepanjang jalan DI Panjaitan beragam variasinya dan terjadi penyempitan jalan pada sisi Selatan Panggung krapyak. Perlu dikawal untuk kelancaran pembebasan lahan sesuai dengan jadwal.
8. Penataan Kawasan Pantai Selatan yang belum optimal. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah penataan kawasan yang belum optimal

sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan ekonomi daerah. Hal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yaitu: kejelasan operasionalisasi proyek penambangan pasir besi PT. JMI; konflik ruang untuk usaha budidaya tambak udang dan tambak garam; kejelasan operasionalisasi Pelabuhan Tanjung Adikarto, serta penataan obyek wisata pantai Glagah, Trisik, dan Bugel.

9. Penyusunan dokumen perencanaan pada SRS belum selaras dan komprehensif. Perencanaan pemanfaatan ruang belum dapat dilaksanakan karena dokumen belum detail. Dokumen perencanaan ruang (RTBL) belum mencakup tentang gambar detail bangunan, pembebasan tanah dan DED. Perlu alokasi anggaran untuk tindak lanjut pelaksanaan RTBL yang telah disusun serta pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan SRS.
10. Kemudahan perijinan berusaha dari segi tata ruang di SRS Keistimewaan belum optimal sehingga perlu dilengkapi instrumen perijinan yang ada. Proses perijinan pemanfaatan ruang masih membutuhkan waktu yang lama perlu dipersingkat dengan memanfaatkan sistem informasi dan perkembangan teknologi.
11. Perlu ada adanya informasi penanda keistimewaa dan infrastruktur jaringan digital di lokasi SRS Kasultanan dan Kadipaten.

Aspek Infrastruktur

1. Pembangunan infrastruktur belum optimal dan terintegrasi. Infrastruktur dasar dan pendukung dibangun oleh OPD Pelaksana sesuai dengan kebutuhan mereka, seringkali kurang memperhatikan kebutuhan instansi maupun masyarakat lain secara luas.
2. Status Kepemilikan Tanah JJLS. Pengadaan tanah yang dilaksanakan Pemda DIY telah tercatat dalam aset Pemda DIY. Pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemkab Kulon Progo telah diserahkan dan tercatat dalam aset Pemda DIY sedangkan yang dilaksanakan oleh Pemkab Gunungkidul dan Pemkab Bantul belum diserahkan kepada Pemda DIY sehingga perlu ada tindak lanjut penyelesaian atas hal tersebut.
3. Perlu dilakukan Peningkatan kualitas infrastruktur di Kawasan Panggung Krapyak. Saluran drainase tidak berfungsi dengan baik sehingga timbul genangan saat musim hujan. Belum tercipta keteraturan bangunan dan kualitas permukiman serta Kepadatan lalu lintas yang tinggi di sekitar Kawasan Panggung Krapyak.

4. Perlunya penyediaan jaringan infrastruktur yang memadai di Kawasan Perbukitan Menoreh untuk mengurangi ketimpangan wilayah antara Kulon Progo bagian utara dan selatan. Kawasan SRS Perbukitan Menoreh berada pada lokasi strategis antara Bandara Internasional Yogyakarta dengan KSPN Borobudur. Dengan demikian, pengembangan wilayah di Perbukitan Menoreh ini perlu didorong dengan mengoptimalkan jaringan infrastruktur pendukung dalam rangka menangkap peluang keberadaan KSPN Borobudur. Beberapa upaya optimalisasi penyediaan jaringan infrastruktur yang perlu didorong pelaksanaannya yaitu: Pengembangan jalur Temon – Borobudur (Jalur Bedah Menoreh) serta Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata di Perbukitan Menoreh.
5. Sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan dan pengembangan Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri masih belum memadai. Kawasan sekitar Makam raja – raja Imogiri yang berpotensi mengalami banjir / genangan akibat saluran pembuang / afvour yang tidak berfungsi secara optimal. Penduduk sekitar Makam raja – raja di Imogiri yang Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani membutuhkan infrastruktur pendukung pertanian (saluran irigasi) yang memadai.
6. Sarana dan Prasarana pendukung pemanfaatan dan pengembangan SRS Kotagede perlu ditingkatkan. Kualitas permukiman dan lingkungan di Kawasan SRS Kotagede masuk dalam kawasan kumuh (Kalurahan Jagalan). Tingginya curah hujan di musim hujan dan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau di daerah aliran Sungai Gadjahwong menyebabkan terjadinya longsor dan banjir di wilayah permukiman. Saluran pembuang / afvour mengalami penyempitan dan sedimentasi menyebabkan banjir di selatan Pasar Kotagede. Akses jalan menuju Situs Beteng Cepuri (Kawasan Kotagede) yang kurang memadai (kondisi eksisting jalan sebagian besar masih paving block / belum ada perkerasan aspal).
7. Sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan dan pengembangan SRS Kawasan Kerto Pleret perlu ditingkatkan. Perlu Pembangunan Embung Segoroyoso untuk konservasi air dan mengembalikan nilai historis Kerajaan Mataram Kuno. Kawasan sekitar SRS Kerto - Pleret yang berpotensi mengalami banjir/genangan akibat saluran pembuangan yang tidak berfungsi secara optimal. Penduduk sekitar SRS Kerto – Pleret sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani membutuhkan infrastuktur pendukung pertanian yang memadai. Akses jalan menuju SRS Kawasan Kerto Pleret yang sempit dan kondisi jalan yang ekstrim sering menimbulkan kecelakaan.
8. Sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan dan pengembangan SRS Masjid Pathok Nagoro. Akses jalan menuju Kawasan Masjid Pathok Nagoro yang kurang memadai. Masih adanya bangunan lain di lingkungan masjid. Perlunya penataan / rehabilitasi bangunan dan lingkungan di Kawasan Masjid Pathok Nagoro.
9. Kawasan Rawan Tsunami di SRS Pantai Parangtritis dan Samas perlu dilakukan pembangunan sruktural dan non struktural terutama di kawasan padat permukiman. Selain itu khusus pantai Samas juga rawan abrasi.
10. Perlu penyelesaian untuk kawasan rawan genangan air di SRS Panggung Krapyak. Hujan deras dengan intensitas lama dapat mengakibatkan seputaran Panggung Krapyak tergenang air.

DAFTAR PUSTAKA

- Lay, dkk, Keistimewaan Yogyakarta, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yoyakarta, Monograph on Politic and Government*, Vol. 2, No. 1, JIP FISIPOL UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi, Yogyakarta, 2008.
- Masjkuri dan Sutrisno Kutoyo (ed), 1977. *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah,.
- Ridwan Mukti, *Pilkada dalam Demokrasi Asimetris*, Kompas, 2013. Roman Tomasic, *The Sociology of Law*, London: Sage Publications, 1986.
- Soedarisman Poerwokoesoemo, 1984. *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2013. *Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- _____. 2015. *Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa*.
- _____. 2016. *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2016 tentang Parampara Praja*.

- _____. 2017. *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*.
- _____. 2018. *Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- _____. 2018. *Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- _____. 2018. *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022*.
- _____. 2019. *Laporan Pelaksanaan Program dan Kebijakan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- _____. 2019. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018*.
- Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. 1950. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- _____. 2012. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta*.
- Kementerian Keuangan. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.140/PMK.07/2013 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013*.
- _____. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.173/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*.